RKPD KABUPATEN SERANG TAHUN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI SERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang – Undang ...

Dipindai dengan CamScanner

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 747);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 812);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 08);

16. Peraturan ...

Dipindai dengan CamScanner

16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Poduk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 05).

17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Bupati adalah Bupati Serang.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Rencana ...

Dipindai dengan CamScanner

8. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

11. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rencana program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.

13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.

15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Serang.

16. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serang.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Penyusunan RKPD dimaksudkan untuk menetapkan prioritas pembangunan dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. memiliki dampak yang besar pencapaian sasaran pembangunan sesuai tema pembangunan dengan sasaran terukur sehingga dapat langsung dirasakan oleh masyarakat;

b. mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan;

c. merupakan ...

Dipindai dengan CamScanner

c. merupakan tugas pemerintah daerah sebagai pelaku utama; dan

d. berpedoman kepada RPJPD dan RPJMD.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyusunan RKPD sebagai acuan dalam :

a. menetapkan prioritas pembangunan yang mendesak untuk dilaksanakan pada Tahun 2022;

b. menetapkan Renja yang dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022;

c. menyelaraskan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; dan

d. mengoptimalkan penggunaan sumberdaya pembangunan secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Fungsi RKPD adalah sebagai pedoman bagi :

a. Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;

b. penyusunan APBD Kabupaten Serang Tahun 2022;

c. bahan pembahasan dan penyusunan dokumen KUA, PPAS dan RKA-PD; dan

d. Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-PD setelah KUA dan PPAS disepakati.

BAB III

PRINSIP DAN PROSES PENYUSUNAN

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 5

Prinsip yang digunakan dalam penyusunan RKPD yaitu :

a. mengintegrasikan kebijakan Pemerintah Daerah dengan aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah;

b. keadilan ...

Dipindai dengan CamScanner

b. keadilan guna mengurangi kesenjangan dan menciptakan sinergitas secara regional;

c. mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan menggali potensi pendanaan dari masyarakat dalam penentuan prioritas program dan kegiatan pembangunan; dan

d. perencanaan partisipatif yang melibatkan sejumlah *stakeholder* pembangunan, baik unsur Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

Bagian Kedua

Proses Penyusunan

Pasal 6

Proses penyusunan RKPD dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran rencana Program yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah;

b. Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang mengacu pada rancangan awal RKPD, berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, dan selanjutnya disampaikan kepada Bappeda sebagai bahan penyelenggaraan forum Perangkat Daerah;

c. Forum Perangkat Daerah dipergunakan oleh Perangkat Daerah dalam merumuskan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

d. Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan rancangan awal RKPD, Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Nasional sebagai acuan dan evaluasi;

e. Rancangan RKPD menjadi bahan dalam Musrenbang RKPD;

f. Hasil Musrenbang RKPD digunakan untuk menyempurnakan Rancangan RKPD menjadi Rancangan Akhir RKPD Tahun 2022;

g. Bupati menetapkan RKPD dengan Peraturan Bupati;

h. Perangkat Daerah menyesuaikan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan; dan

i. Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PEDOMAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Bagian Kesatu

Pedoman

Pasal 7 ...

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 7

RKPD Tahun 2022 merupakan pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Serang Tahun 2022 dan merupakan penjabaran rencana program yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah prioritas Pembangunan Daerah, Renja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serang maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Bagian Kedua

Sistematika Penyusunan

Pasal 8

(1) RKPD Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN
Memuat latar belakang penyusunan RKPD, Dasar Hukum, Hubungan Antar Dokumen, Sistematika, serta Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD.

II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Memuat Gambaran Umum Kondisi Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan RKPD dan Permasalahan Pembangunan Daerah.

III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Memuat Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Memuat Tujuan dan Sasaran Pembangunan serta Prioritas Pembangunan Tahun 2022.

V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Memuat prioritas – prioritas pembangunan daerah beserta target-terget yang akan dicapai untuk mengatasi permasalahan yang menjadi isu strategis Tahun 2022.

VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

VII PENUTUP
Memuat kesimpulan RKPD.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Dipindai dengan CamScanner

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 5 Juli 2021

BUPATI SERANG,

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 5 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 NOMOR 28

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh,

Puji syukur Kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas karunia serta ridlho-Nya, maka **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Serang Tahun 2022** telah tersusun. Penyusunan laporan akhir ini merupakan tahap akhir dari serangkaian tahapan pelaporan dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Serang Tahun 2022 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Serang Tahun 2021.

Pada prinsipnya, laporan akhir ini menyajikan tentang: Pendahuluan; Gambaran Umum Kondisi Daerah; Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan Keuangan Daerah; Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah; Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; serta Penutup.

Akhir kata, Kami berharap semoga laporan akhir ini dapat memenuhi harapan dan bermanfaat bagi sebagai bahan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) kecamatan dan acuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Kabupaten Serang Tahun 2022. Atas partisipasi seluruh pihak dalam proses penyusunan laporan pendahuluan ini, Kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh.

Serang, Juni 2021

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iv
DAFTAR GAMBAR		vi
BAB I	**PENDAHULUAN**	I – 1
	1.1 Latar Belakang	I – 1
	1.2 Dasar Hukum penyusunan	I – 6
	1.3 Hubungan Antar Dokumen	I – 10
	1.4 Maksud dan Tujuan	I – 10
	1.5 Sistematika Dokumen Rancangan RKPD	I – 12
BAB II	**GAMBAR UMUM KONDISI DAERAH**	II – 1
	2.1. Gambaran Kondisi Umum Kondisi Daerah	II – 1
	2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi	II – 1
	2.1.2. Luas dan Batas Wilayah Administratif	II – 2
	2.1.3. Letak dan Kondisi Geografis	II – 5
	2.1.4. Kondisi Morfologi dan Topografi	II – 5
	2.1.5. Kondisi Hidrogeologi dan Hidrologi	II – 11
	2.1.6. Kondisi Klimatologi	II – 13
	2.1.7. Kondisi Pemanfaatan Ruang	II – 15
	2.1.8. Kondisi Demografi	II – 23
	2.1.9. Potensi Daerah	II – 25
	2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II – 26
	2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II – 26
	2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	II – 29
	2.3. Aspek Pelayanan Umum	II – 37
	2.3.1. Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar	II – 37
	2.3.2. Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	II – 44
	2.3.3. Fokus Urusan Pilihan	II – 54
	2.3.4 Fokus Pelayanan Penunjang Urusan	II – 57
	2.4. Aspek Daya Saing Daerah	II – 62

	2.4.1.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II – 63
	2.4.2.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita	II – 64
	2.4.3.	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II – 65
	2.4.4.	Fokus Iklim Berinvestasi	II – 66
	2.4.5.	Fokus Sumberdaya Manusia	II – 67
BAB III	**RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**		III – 1
	3.1.	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III – 1
	3.1.1	Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020 & Perkiraan Tahun 2021	III – 11
	3.1.2	Tantangan dan Prospek Ekonomi Daerah Tahun 2022	III – 12
	3.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III – 16
	3.2.1	Proyeksi Kebijakan Keuangan Daerahdan Kerangka Pendanaan	III – 16
	3.2.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III – 18
	3.2.2.1	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III – 19
	3.2.2.2	Arah Kebijakan Belanja Daerah	III – 20
	3.2.2.3	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III – 25
BAB IV	**PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**		IV – 1
	4.1.	Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Nasional	IV – 1
	4.2.	Prioritas Nasional, Kebijakan dan program Prioritas Tahun 2022	IV – 1
	4.3	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Banten	IV – 15
	4.4	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	IV – 16
BAB V	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**		V – 1
BAB VI	**KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**		VI – 1
BAB VII	**PENUTUP**		VII – 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Kecamatan Dan Desa Di Kabupaten Serang Tahun 2020	II – 2
Tabel 2.2.	Pulau-Pulau Di Kabupaten Serang	II – 6
Tabel 2.3.	Daftar Danau, Rawa, Situ, Telaga dan Waduk di Kabupaten Serang	II – 13
Tabel 2.4.	Rata – Rata Curah Hujan dan Jumlah Hari Hujan Per Bulan di Kabupaten Serang Tahun 2020	II – 14
Tabel 2.5.	Klasifikasi Iklim Kabupaten Serang menurut Pembagian Kecamatan Dengan Menggunakan cara Mohr (1993)	II – 15
Tabel 2.6.	Tutupan Lahan di Kabupaten Serang Interpretasi Citra Satelit Tahun 2010	II – 16
Tabel 2.7.	Luas Lahan Menurut Penggunaan Tahun 2017	II –17
Tabel 2.8.	Luas Kawasa Hutan Lindung Mneurut Lokasi Di Kabupaten Serang, 2020	II – 20
Tabel 2.9.	Kawasa Rawan Bencana Berdasarkan Data Kejadian Di Kabupaten Serang Tahun 2020	II – 23
Tabel 2.10.	Jumlah Penduduk Di Kabupaten Serang Tahun 2019 - 2020	II – 24
Tabel 2.11.	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Serang Tahun 2019 - 2020	II – 26
Tabel 2.12.	Perkembangan Nilai PDRB Kabupaten Serang Tahun 2019 - 2020	II – 26
Tabel 2.13.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten SerangAtas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019 - 2020 (Milyar Rupiah)	II – 27
Tabel 2.14.	Inflasi dan Indeks Daya Beli Kabupaten Serang Tahun 2019 - 2020	II – 28
Tabel 2.15.	Keadaaan PMKS Kabupaten Serang Tahun 2020	II – 30
Tabel 2.16.	Indikator dan Indeks Daya Beli Kabupaten Serang Tahun 20219 - 2020	II – 35
Tabel 2.17.	Indreks Pembangunan ManusiaKabupatenSerangTahun 2019 -2020	II – 36
Tabel 3.1	Target Indikator Makro Kabupaten Serang 2020 - 2021	III – 12
Tabel 3.2	Target Indikator Makro Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022	III – 16
Tabel 3.3	Target dan Proyeksi Pendapatan	III – 17

Tabel 4.1	Prioritas dan Fokus Pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2022	IV – 17
Tabel 4.2	Rencana Program Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022	IV – 19
Tabel 5.1	Nomenklatur Program Non Urusan untuk seluruh OPD	V – 3
Tabel 5.2	Rencana Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan Dalam Dokumen RKPD Kabupaten Serang Tahun 2022	V – 4
Tabel 6.1	Indikator Sasaran Makro Daerah Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2022	VI – 1
Tabel 6.2	Indikator Kinerja Utama Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2022	VI – 2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Wilayah Administratif Kabupaten Serang II – 4
Gambar 2.2. Peta Pola Ruang Wilayah Kabupaten Serang II – 19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satukesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut salah satunya adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

RKPD memuat gambaran umum kondisi daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Serang Tahun 2022 disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berbasis program (money follow program) melalui penganggaran berbasis kinerja dan dengan pendekatan **perencanaan partisipatif** yang melibatkan peran serta masyarakat sebagai stakeholders dengan proses yang partisipatif, memungkinkan masyarakat menyalurkan aspirasinya dan mampu memantau kinerja pemerintah, sehingga semakin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas aparatur pemerintah dalam mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat.

RKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. **Persiapan penyusunan RKPD**

   Pada tahap persiapan ini dilakukan beberapa proses yaitu:

   a) Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
   b) Orientasi mengenai RKPD oleh tim penyusun RKPD;
   c) Penyusunan agenda tim kerja tim penyusun RKPD;
   d) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD

2. **Penyusunan rancangan awal RKPD**

   Pada tahap penyusunan rancangan awal RKPD aktivitas yang dilakukan adalah menganalisis, merumuskan dan menelaah hal hal sebagai berikut :

a) analisis gambaran umum kondisi Daerah;

b) analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;

c) analisis kapasitas riil keuangan Daerah;

d) penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;

e) perumusan permasalahan pembangunan Daerah;

f) penelaahan terhadap sasaran RPJMD;

g) penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;

h) penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;

i) penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;

j) perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan

k) perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

Untuk penelaahan pokok pokok pikiran DPRD dalam rancangan awal tersebut dikarenakan pokok pokok pikiran DPRD yang harus diparipunakan belum masuk ke Bappeda dan untuk penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP , program strategis nasional dan Rancangan awal RKPD Propinsi baru sebatas tema dan prioritas, hal tersebut disebabkan karena materinya yang ada baru sebatas tema dan prioritas.

Adapun penyajian rancangan awal RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut :

1) Pendahuluan

2) Gambaran Umum Kondisi Daerah

3) Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

4) Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

5) Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

6) Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

7) Penutup

Rancangan awal dikonsultasi publikan untuk mendapat masukkan dan saran guna penyempurnaan Rancangan Awal RKPD, yang mana Rancangan Awal yang disempurnakan tersebut menjadi pedoman penyempurnaan Rancangan Awal RenjaPerangkat Daerah.

3. Penyusunan rancangan RKPD

Penysunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi renja OPD yang telah disempunakan dan berdasarkan hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP dan program strategis nasional. Verifikasi dimaksud adalah mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja OPD sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Kabupaten Serang dan penyelarasan dengan Tema Pembangunan, prioritas dan arah kebijakan Pemerintah maupun Propinsi.

4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Musrenbang RKPD merupakan forum pemangku kepentingan guna membahas Rancangan RKPD. Pelaksanaan musrenbang RKPD dimulai dari musrenbang kecamatan, Forum OPD dan musrenbang kabupaten.

5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Perumusan Rancangan Akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD menjadi Rancangan RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten.

Rancangan akhir RKPD yang sudah disempurnakan disampaikan ke Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk memastikan program dan kegiatan perangkat daerah telah diakomodir dalam Rancangan akhir RKPD.

6. Penetapan RKPD

RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah RKP dan RKPD Provinsi Banten ditetapkan. Hal tersebut bertujuan agar ada keselarasan antara perencanaan di tingkat pusat, propinsi dan daerah.

Dokumen Rancangan RKPD Kabupaten Serang Disusun Berdasarkan Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026, yang merupakan Cikal Bakal Penyusunan Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2021-2026.

Keberadaan Rancangan RKPD Kabupaten Serang Tahun 2022 merupakan satu bagian yang utuh dari pelaksanaan manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang, sebagai bahan Penyusunan Dokumen RKPD tahun 2022 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

RKPD Kabupaten Serang Tahun 2022 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 100 tahun 2018 tentang penerapan standar Pelayanan Minimal
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
25. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022
26. Peraturan Gubernur Banten Nomor 21 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 21);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 747);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 812);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembagian urusan pemerintah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 7);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang memiliki kedudukan strategis, yaitu untuk memfasilitasi antara perencanaan strategis jangka menengah daerah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan daerah. RKPD merupakan kompilasi dari seluruh Rencana Kerja OPD (Renja OPD) dalam mewujudkan visi, misi pembangunan daerah. Dalam kaitannya dengan dokumen perencanaan pembangunan tingkat OPD, RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Renja OPD, dimana program-program yang tercantum dalam Renja OPD merupakan bagian dari program-program yang tersusun dalam RKPD dengan berpedoman pada Rencana Strategis OPD (Renstra OPD) yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJMD. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa antara RKPD, RPJMD, Renstra OPD, dan Renja OPD memiliki keterikatan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Selain itu juga, dalam penyusunannya, RKPD harus berpedoman pada RPJMD dan selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah serta mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP.

RKPD Kabupaten Serang Tahun 2022 merupakan dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan satu tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang untuk periode Tahun 2022 yang memuat prioritas, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan serta kerangka perekonomian dan pembiayaan pembangunan yang disusun sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta berpedoman pada Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026

1.4. Maksud Dan Tujuan

RKPD Kabupaten Serang Tahun 2022 adalah dokumen Perencanaan daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 yang merupakan dokumen perencanaan tahun kedua dari Periode Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode tahun 2021-2026 yang pada saat dokumen rancangan RKPD tahun 2022 ini disusun sedang dilakukan penyusunan Dokumen RPJMD 2021-2026,

RKPD mengakomodir Isu strategis yang di peroleh dari dokumen Rancangan Teknokratis RPJMD 2021-2026, RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2006-2026 serta mengacu pada Rancangan RKPD Provinsi Banten Tahun 2022 dan Rancangan Kerja Pemerintah Pusat Tahun 2022. Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Serang Tahun 2022 dimaksudkan untuk memberikan pedoman, arahan dan acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Serang pada Tahun 2022 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan untuk menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Kabupaten Serang pada Tahun 2022.

Dengan demikian penyusunan RKPD Kabupaten Serang Tahun 2022 ditujukan untuk:

1. Merumuskan Rancangan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Serang yang mendesak untuk dilaksanakan pada Tahun 2022.
2. Merumuskan rancangan kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan daerah Kabupaten Serang pada Tahun 2022.
3. Merumuskan rencana kerja yang dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Serang disertai dengan indikasi pagu anggarannya yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022.
4. Menyelaraskan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Serang pada Tahun 2022.
5. Mengoptimalkan penggunaan sumberdaya pembangunan daerah Kabupaten Serang secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan pada Tahun 2022.

Mengacu pada maksud dan tujuan tersebut, maka RKPD Kabupaten Serang Tahun 2022 mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah terutama OPD Kabupaten Serang dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Serang pada Tahun 2022.
2. Menjadi masukan dalam Musrenbang kecamatan Tahun anggaran 2021 dan penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Serang Tahun 2022

3. Menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja OPD Kabupaten Serang Tahun 2022.

1.5 Sistematika Dokumen Rancangan RKPD

Sistematika penyusunan RKPD Tahun 2022 disajikan berdasarkan ketentuan C.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik :

1.1. Latar belakang Mengemukakan tentang pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dalam proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan RKPD Tahun 2022 Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD berupa peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan RKPD.

1.3. Hubungan Antar Dokumen Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya.

1.4. Maksud dan Tujuan Berisi uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menguraikan penjelasan tentang gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Serang, evaluasi RKPD sampai dengan tahun 2020, dan permasalahan pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun 2020 dan perkiraan tahun 2022, yang mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. GAMBARAN KONDISI UMUM DAERAH

2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi

Secara historis sebelum masa kemerdekaan RI, Kabupaten Serang pada awalnya merupakan wilayah Kesultanan Banten. Adapun setelah masa Kemerdekaan RI, Kabupaten Serang berada dalam lingkup wilayah Provinsi Jawa Barat. Setelah terbentuknya Provinsi Banten yang merupakan pemekaran dari Provinsi Jawa Barat pada tahun 2000, Kabupaten Serang menjadi salah satu daerah otonomnya dan berstatus sebagai Ibukota Provinsi Banten.

Namun sejalan dengan waktu, Kabupaten Serang selanjutnya dimekarkan menjadi tiga wilayah otonom yakni, Kota Cilegon yang disahkan oleh Undang- undang Nomor 15 Tahun 1999 pada tanggal 27 April 1999, Kabupaten Serang dan Kota Serang berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang pada tanggal 10 Agustus 2007. Dengan dimekarkannya Kabupaten Serang maka secara otomatis luas wilayah administrasinya pun berkurang menjadi sebesar 1.467,35 Km^2.

2.1.2. Luas dan Batas Wilayah Administratif

Dengan perkembangan terkini mulai dari pemekaran Kota Serang, pemekaran kecamatan dan pemekaran desa di Kabupaten Serang maka secara administratif, Kabupaten Serang terdiri dari:

- 29 Kecamatan, yang masing-masing dikepalai seorang Camat.
- 326 Desa, yang masing-masing dipimpin seorang Kepala Desa.

Berikut ini nama kecamatan, luas wilayah dan jumlah desa di Kabupaten Serang dalam Tahun 2020.

Tabel 2.1
Jumlah Kecamatan Dan Desa Di Kabupaten Serang
Tahun 2020

No	Kecamatan	Luas Area		Jumlah Desa
		Km2	%	
1	Cinangka	111.47	7.60	14
2	Padarincang	99.12	6.76	14
3	Ciomas	48.53	3.31	11
4	Pabuaran	79.14	5.39	8
5	Gunungsari	48.60	3.31	7
6	Baros	44.07	3.00	14
7	Petir	46.94	3.20	15
8	Tunjung Teja	39.52	2.69	9
9	Cikeusal	88.25	6.01	17
10	Pamarayan	41.92	2.86	10
11	Bandung	25.18	1.72	8
12	Jawilan	38.95	2.65	9
13	Kopo	44.69	3.05	10
14	Cikande	50.53	3.44	13
15	Kibin	33.51	2.28	9
16	Kragilan	36.33	2.48	12
17	Waringinkurung	51.29	3.50	11
18	Mancak	74.03	5.05	14
19	Anyar	56.81	3.87	12
20	Bojonegara	30.30	2.06	11
21	Pulo Ampel	32.56	2.22	9
22	Kramatwatu	48.59	3.31	15
23	Ciruas	34.49	2.35	15

No	Kecamatan	Luas Area		Jumlah
24	Pontang	58.09	3.96	11
25	Lebak Wangi	31.71	2.16	10
26	Carenang	32.80	2.24	8
27	Binuang	26.17	1.78	7
28	Tirtayasa	64.46	4.39	14
29	Tanara	49.30	3.36	9
	Kabupaten Serang	**1467.35**	**100.00**	**326**

Sumber: Disdukcapil Tahun 2020

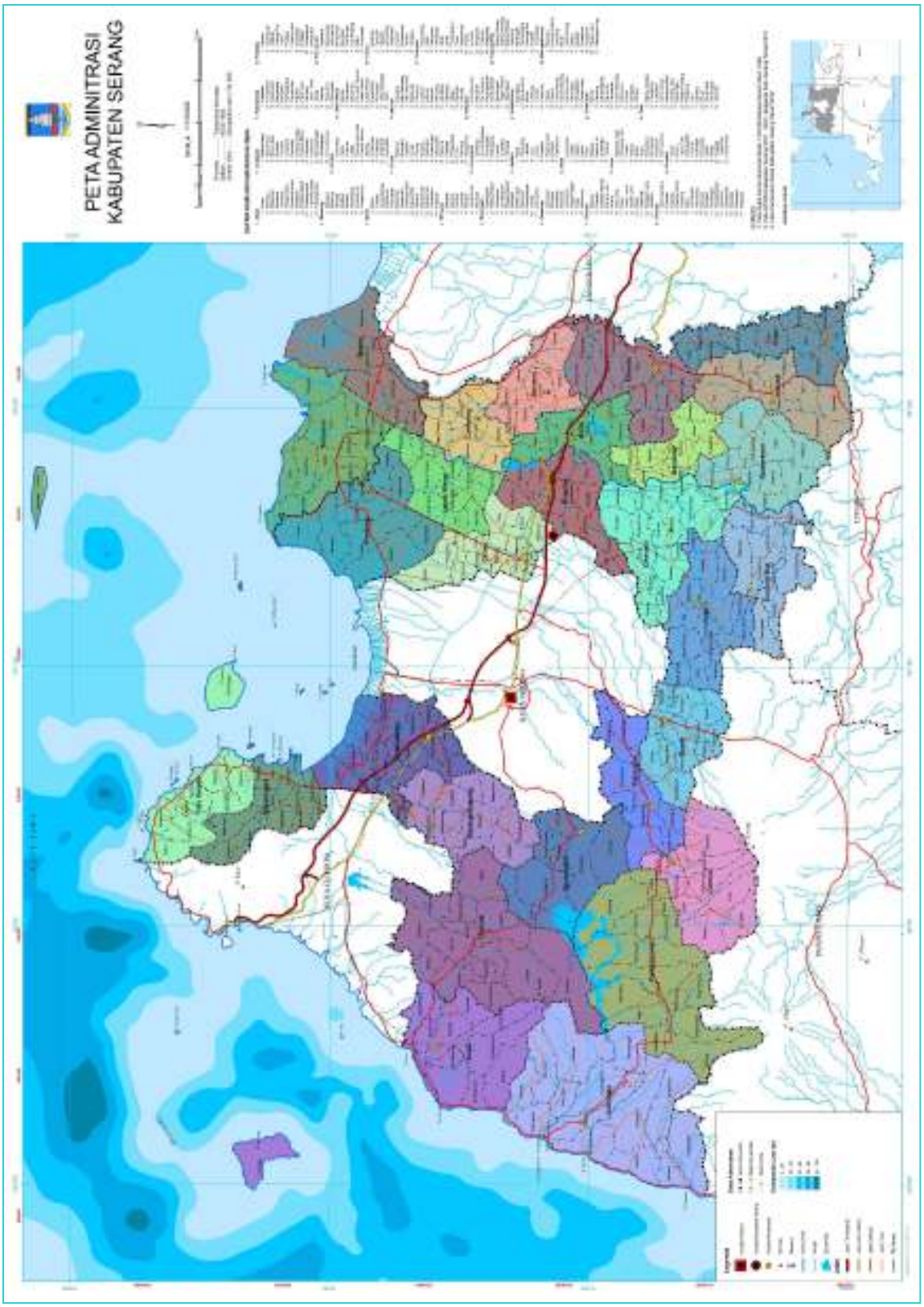

Gambar 2.1

Wilayah Administratif Kabupaten Serang

2.1.3. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis wilayah Kabupaten Serang terletak pada koordinat 50 50′ - 60 21′ Lintang Selatan dan 1050 0′ - 1060 22′ Bujur Timur. Jarak terpanjang menurut garis lurus dari utara ke selatan adalah sekitar 60 Km dan jarak terpanjang dari barat ke timur sekitar 90 Km, dengan luas wilayah 1.467,35 Km^2 dan berbatasan langsung dengan wilayah/daerah lain yaitu sebagai berikut:

Sebelah Utara : Laut Jawa dan Kota Serang
Sebelah Timur : Kabupaten Tangerang
Sebelah Selatan : Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang
Sebelah Barat : Kota Cilegon dan Selat Sunda

Secara letak geografis, Kabupaten Serang merupakan daerah yang sangat potensial dan amat diuntungkan. Posisi geografis dalam aksesibilitas keluar wilayah Kabupaten Serang cukup strategis, karena dilalui oleh Jalan Tol Jakarta - Merak yang merupakan akses utama dari dan menuju Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Penyeberangan Merak, menjadikan Kabupaten Serang sebagai wilayah transit perhubungan darat antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Disamping itu, Kabupaten Serang juga sebagai daerah alternatif dan penyangga *(hinterland)* Ibukota Negara, mengingat jaraknya jika diukur melalui jalan Tol Jakarta - Merak hanya sekitar 70 Km.

2.1.4. Kondisi Morfologi dan Topografi

Kabupaten Serang memiliki bentang alam yang beragam dari mulai dataran hingga perbukitan terjal. Ditinjau dari satuan morfologi daratan, Kabupaten Serang berada dalam ketinggian 0 - 1.778 mdpl (meter di atas permukaan laut) dan pada umumnya tergolong pada kelas topografi lahan dataran dan bergelombang. Pada umumnya (> 97,5%) wilayah Kabupaten Serang berada pada ketinggian rata-rata 25,66 mdpl. Ketinggian 0 mdpl

membentang dari Kecamatan Tirtayasa sampai Kecamatan Cinangka di pantai barat Selat Sunda dan ketinggian 1778 mdpl terdapat di kaki Gunung Karang yang terletak di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pandeglang.

Luas wilayah berdasarkan pembagian ketinggian tempat ini terbagi menjadi 6 (enam) kelompok, yaitu sebagai berikut:

Ketinggian tempat 0 - 3 meter, dpl	=	14.437 Ha	(9,56%)
Ketinggian tempat 3 - 25 meter, dpl	=	51.692 Ha	(34,22%)
Ketinggian tempat 25 - 100meter, dpl	=	51.101 Ha	(33,83%)
Ketinggian tempat 10 - 500 meter, dpl	=	31.191 Ha	(20,65%)
Ketinggian tempat 500 - 1000 meter, dpl	=	2.060 Ha	(1,36%)
Ketinggian tempat >1000 meter, dpl	=	590 Ha	(0,39%)

Satuan dataran rendah tersebar di seluruh wilayah dengan penyebaran paling besar di pantai utara dan sebaran terbatas di pantai barat serta sepanjang aliran sungai besar seperti Sungai Ciujung dan Cidurian. Secara administrasi penyebaran dataran rendah ini meliputi wilayah kecamatan Tirtayasa, Pontang, Carenang, Ciruas, dan Kramatwatu. Sedangkan Kecamatan Cikeusal, Pamarayan, Kragilan, Anyar, Cinangka, hanya sebagian wilayahnya yang termasuk dalam satuan dataran rendah.

Pulau yang berada di wilayah perairan Kabupaten Serang yang tercatat sebanyak 17 pulau. Adapun pulau-pulau di Kabupaten Serang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Pulau-Pulau Di Kabupaten Serang

No.	Nama Pulau	Letak Geografis	Topografi	Kondisi Lahan	Aksesabilitas	Luas (Ha)
1	Pulau Sangiang (Sanghyang)	106050'00"-105051'51" -6 BT dan 05059'00"LS Desa Cikoneng	Bergunung, berbatuan volkanik, pantai berpasir, 0-100 m dpl.	Kebun kelapa dan semak 450 ha, mangrove 200 ha, perumahan dan fasum 40 ha,	Kapal dari pelabuhan Anyar ± 1,5 jam, 11 km dari kecamatan dan 43 km dari	845,5

No.	Nama Pulau	Letak Geografis	Topografi	Kondisi Lahan	Aksesabilitas	Luas (Ha)
		Kecamatan Anyar		dan sisanya hamparan pasir.	Ibukota Propinsi	
2	Pulau Salira	1060 03′ 41″ - 106o 03′ 37″ BT dan 050 53′ 14″ - 050 53′ 17″ LS Desa Mangunrejo Kecamatan Pulo Ampel	Relatif datar 0-2 m dpl	Berawa	Kapal dari pelabuhan ikan Karangantu ± 2 jam, 12 km dari Kecamatan dan 34 km dari Ibukota Kabupaten	1,875
3	Pulau Kali utara	1060 05′ 21″ - 1060 05′ 51″ BT dan 050 53′ 51″ - 050 53′ 58″ LS Desa Pulau Ampel Kecamatan Pulo Ampel	Relatif datar 0-3 m dpl	Berawa	Kapal dari pelabuhan ikan Karangantu ± 2 jam	3
4	Pulau Kalih Selatan					3,5
5	Pulau Tarahan	1060 06′ 47″ - 1060 07′ 00″ BT dan 050 56′ 48″ - 050 57′ 05″ LS Desa Marga Giri Kecamatan Bojonegara	Datar 0-5 m dpl, Berbukit rendah, berbatuan volkanik	Berawa	Kapal dari pelabuhan ikan Grenyang/ Teratai ± 0,5 jam dari pelabuhan ikan Karangantu ± 1,5 jam dan 4,25 km dari Kecamatan 26 km dari kantor Kabupaten/ Ibukota Propinsi	11,875
6	Pulau Kemanisan	1060 06′ 16″ - 1060 06′ 29″ BT dan 050 58′ 01″ - 050 58′ 12″ LS	Datar 0-5 m dpl, Berbukit rendah, berbatuan volkanik	Berawa	Kapal dari pelabuhan Ikan Grenyang/ Teratai ± 0,5 jam dan dari	7,5

No.	Nama Pulau	Letak Geografis	Topografi	Kondisi Lahan	Aksesabilitas	Luas (Ha)
		Desa Bojonegara Kecamatan Bojonegara			Pelabuhan ikan Karangantu ± 1,5 jam dan 1,5 km dari kecamatan dan 23,5 km dari kantor Kabupaten/ Ibukota Propinsi	
7	Pulau Cikantung	1060 06′ 22″ - 1060 06′ 30″ BT dan 050 57′ 47″ - 050 57′ 50″ LS Desa Bojonegara Kecamatan Bojonegara	Datar 0-5 m dpl, Berbukit rendah, berbatuan volkanik	Berawa	Kapal dari pelabuhan ikan Grenyang/ Teratai 20 menit dan dari pelabuhan ikan Karangantu ±1,15 jam dan 24,5 km dari kantor Kabupaten/ Ibukota Propinsi	1,25
8	Pulau Panjang	1060 08′ 18″ - 1060 10′ 10″ BT dan 050 55′ 08″ - 050 56′ 41″ LS Desa Pulau Panjang Kecamatan Pulo Ampel	Relatif datar 0-4 m dpl	Kebun kelapa & semak belukar 400 ha, hutan mangrove 100 ha, perumahan dan fasum 100 ha, rawa-rawa dan pertambakan 135 ha	Dari Bojonegara 30 menit, 16 km dari Kecamatan, 22 km dari Ibukota Propinsi	502
9	Pulau Semut	1060 10′ 13″ - 1060 10′ 17″ BT dan 050 56′ 18″ - 050 55′ 22″ LS Desa Pulau	Datar 0-0,5 m dpl	Daerah Rawa-rawa mangrove	Kapal dari pelabuhan ikan Karangantu ±1,5 jam dan 14,5 km dari Kecamatan,	1,875

No.	Nama Pulau	Letak Geografis	Topografi	Kondisi Lahan	Aksesabilitas	Luas (Ha)
		Panjang Kecamatan Pulo Ampel			20,5 km dari kantor Kabupaten/ Ibukota Propinsi	
10	Pulau Kubur	1060 8′ 50″ - 1060 8′ 59″ BT dan 050 58′ 55″ - 050 59′ 01″ LS Desa Pulo Panjang Kecamatan Pulo Ampel	Relatif datar 0-2 m dpl	Daerah rawa-rawa mangrove	Kapal dari pelabuhan ikan Karangantu ± 50 menit dan jarak dari kecamatan 8,8 km, dari Kantor Kabupaten/ Ibukota Propinsi 13,8 km, Ibukota negara 104,8 km	1,563
11	Pulau Lima	1060 09′ 12″ - 1060 09′ 21″ BT dan 060 10′ 00″ - 060 00′ 00″ LS Desa Pulo Panjang Kecamatan Pulo Ampel	Relatif datar 0-4 m dpl	Rawa-rawa ± 900 m2, perkebunan kelapa 1000 m2 semak belukar ± 8000 m2 , dan sisanya lahan mangrove	Kapal dari pelabuhan ikan Karangantu ± 0.5 jam dan jarak dari Kecamatan 9 km, dari Kantor Kabupaten/ Ibukota Propinsi 15 km	3,5
12	Pulau Pisang	1060 08′ 45″ - 1060 08′ 56″ BT dan 050 59′ 45″ - 050 59′ 55″ LS Desa Pulo Panjang Kecamatan Pulo Ampel	Agak bergelombang, Berbukit rendah, berbatuan volkanik,0- 10 m dpl, warna tanah kecoklatan	Daratan bergelombang, semak belukar	Kapal dari pelabuhan ikan Karangantu ± 0,5 jam dan jarak dari Kecamatan 10 km, dari kantor Kabupaten/ Ibukota Propinsi 16 km	2,5
13	Pulau Karang	1050 51′ 06″ -	Pulau Karang	Tidak memiliki	Kapal dari	4,38

No.	Nama Pulau	Letak Geografis	Topografi	Kondisi Lahan	Aksesabilitas	Luas (Ha)
	Cawene	1050 51′09″ BT dan 060 08′ 14″ - 060 08′ 16″ LS Desa Cinangka Kecamatan Cinangka	Terjal	vegetasi dan tidak berpenduduk	pelabuhan Anyar	
14	Pulau Pamojan Besar	1060 13′ 10″ - 1060 12′ 42″ BT dan 050 56′ 40 - 050 56′ 28″ LS Desa Susukan Kec. Pontang	Agak berbukit, Berbukit rendah, berbatuan volkanik, 0-15 dpl tergolong lahan agak bergelombang	Berawa, 20 % perkebunan kelapa dan semak belukar	1 jam dari Pelabuhan Karangantu, 17,5 km dari Kecamatan, 37,5 km dari kantor Kab dan Ibukota Propinsi.	15
15	Pulau Pamojan Kecil	1060 10′ 15″ - 1060 10′ 17″ BT dan 050 57′ 47″ - 050 57′ 56″ LS Desa Damas Kec. Pontang	Datar 0-4 m dpl	Berawa	1 jam 15 menit dari Pelabuhan Karangantu. 18 km dari Kecamatan. 38 km dari kantor Kabupaten dan Ibukota Propinsi.	0,63
16	Pulau Tunda	1060 50′ 00″ - 1050 51′ 51″ BT dan 050 56′ 15″ - 050 59′ 00″ LS Desa Wargasara Kecamatan Tirtayasa	Relatif datar 0-5 m dpl	Perkebunan kelapa dan semak belukar (170 ha), mangrove (30ha), pemukiman dan fasum (27ha)	3 jam dari Pelabuh-an Karangantu, 22,5 km dari Keca-matan,42,5 km dari kantor Kabu-paten dan Ibukota Propinsi.	257,5
17	Pulau Karang Parejakah	1050 51′ 06″ - 1050 51′09″ BT dan 060 08′ 16″ - 060	Pulau Karang Terjal	Tidak memiliki vegetasi dan tidak berpenduduk	Kapal dari pelabuhan Anyar	3,50

No.	Nama Pulau	Letak Geografis	Topografi	Kondisi Lahan	Aksesabilitas	Luas (Ha)
		08′ 17″ LS Desa Cinangka Kec.Cinangka				

Sumber: Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Serang Tahun 2013-2032

2.1.5. Kondisi Hidrogeologi dan Hidrologi

Kondisi Hidrogeologi dan Hidrologi di Kabupaten Serang ditandai dengan terdapatnya Daerah Aliran Sungai. Pengelolaan sungai mengatur adanya Satuan Wilayah Sungai (SWS) dan Daerah Aliran Sungai (DAS). Secara umum, baik SWS maupun DAS yang berada di Kabupaten Serang relatif tidak luas. Sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten Serang memiliki lebar yang relatif kecil (lebar kurang dari 50 m) dan pendek (panjang kurang dari 100 Km). Selain itu, terdapat DPS (Daerah Pengelolaan Sungai) yakni pengelolaan satu atau beberapa DAS secara bersama yang dilakukan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan karena faktor efisiensi dana dan pelaksanaan. SWS yang terdapat di Kabupaten Serang yaitu Ciujung-Ciliman, terdiri atas DAS Cidurian, Ciujung, Cibanten, dan Cidanau. DAS tersebut terdiri dari sub-sub DAS. Sungai yang besar adalah Cidurian dan Ciujung. Sungai Cidurian berhulu di Kabupaten Tangerang. Sebagian besar sungai mengalir ke arah utara menuju Laut Jawa. DAS Cidanau mengalir ke barat Selat Sunda. Sebelah selatan terdapat DAS Ciliman dimana terdapat dua arah pengaliran, yang pada umumnya mengalir ke utara menuju Laut Jawa atau Teluk Banten, dan sebagian ke barat menuju Selat Sunda.

Ditinjau dari fisiografi dan morfologi permukaan tanahnya, sebagian besar (sekitar 35%) bagian utara Kabupaten Serang merupakan hilir tata air permukaan yang mengarah ke Laut Jawa bagian barat daya, khususnya ke Teluk Banten. Dari 35% tersebut, sekitar 25% daerah perbukitan sangat rendah atau mengalami pendataran sangat aktif *(peneplainisasi)* dan 10% berupa

dataran pesisir. Aliran air permukaan yang besar terutama berasal dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Cidurian dan DAS Ciujung. Sekitar 50% merupakan perbukitan daerah hulu terutama di bagian selatan dan sedikit di utara-barat laut, yaitu Kecamatan Bojonegara dan Kecamatan Pulo Ampel. Sisanya sekitar 14% merupakan wilayah perbukitan yang mengarahkan aliran air permukaannya ke arah barat di Selat Sunda terutama dari DAS Ciliman dengan dataran pesisir hilirnya di sebelah barat yang sangat sempit (1%).

Sungai Ciujung merupakan sungai terbesar di daerah ini yang sumber mata airnya berasal dari Gunung Halimun. Sungai Ciujung sebagian airnya telah dimanfaatkan untuk keperluan irigasi yang dialirkan melalui bendungan. Sedangkan Sungai Cidurian terletak di bagian timur yang sekaligus membatasi Kabupaten Serang dengan Kabupaten Tangerang.

Sungai Cidanau mengalir dari lereng Gunung Karang melalui beberapa anak sungai yang masuk ke Rawa Danau dan membentuk pola aliran *rectanguler*. Sungai ini mengalir ke arah barat dan bermuara di Selat Sunda. Air Sungai Cidanau telah dimanfaatkan oleh PT. Krakatau Steel sebagai sumber air baku yang dialirkan dan ditampung di Waduk Krenceng dengan mendapat tambahan air dari Sungai Krenceng dan Sungai Cadas Gantung.

Sungai Cibanten yang mengalir melalui Kota Serang sumber airnya berasal dari Gunung Karang, Gunung Payung, dan Gunung Kupak. Sebagian besar berasal dari mata air yang cukup dan membentuk *spring belt* pada kaki Gunung Karang. Sungai ini mengalir ke arah utara dan bermuara di Teluk Banten. Sungai ini berpola dendritik dan tidak pernah kering. Selain itu, kondisi hidrologi wilayah Kabupaten Serang ditandai dengan terdapatnya danau, rawa, situ atau waduk. Berikut ini diuraikan kondisi danau, rawa, situ atau waduk di Kabupaten Serang.

Tabel 2.3
Daftar Danau, Rawa, Situ, Telaga dan Waduk
di Kabupaten Serang

No.	Nama Perairan	Lokasi (Desa/Kecamatan)	Luas (Ha)	Volume Air (1.000 m^3)
1	St. Belungun	Cijeruk/ Kibin	2,5	75,5
2	St. Ciherang Banjar	Banjar/Cikande	5,3	156,0
3	St. Teratai	St. Teratai/Cikande	26,0	390,0
4	Wd. Cikande	Cikande/Cikande	4,0	254,0
5	St. Cibiral	Tanjungsari/Pabuaran	0,6	16,0
6	St. Rampones	Sindang Mandi/ Pabuaran		
7	St. Sindang Mandi	Sindang Mandi/ Pabuaran		
8	St. Tasik Kardi	Margasana/Kramatwatu	2,0	30,0
9	Rw. Danau	Cinangka/Padarincang	11,0	220,0
10	Telaga Wangsa	Cipayung/Padarincang		
11	St. Cirahap	Cipayung/Padarincang		
12	St. Ranca Gede Jakung	Babakan/Pamarayan	26,0	416,0
13	Rw. Gede Kawao	Binuang/Carenang		
14	Rw. Bojong Herang	Pamanuk/Carenang		
15	Rw. Bojong Pring	Gabus/Carenang		
16	Rw. Pasar Raut	Bojong Menteng/Petir		
17	Rw. Enang	Kemuning/Tunjung Teja		
18	St. Cibulakan	Sukabana/Ciomas		
19	St. Otaman	Tamansari/Baros		
20	Wd. Cilesung	Sukacai/Baros		
21	Wd. Belungun	Sentul/Kragilan	4,0	
22	Wd. Ciranjen	Junti/Junti	3,0	286,0
23	Wd. Cibulegar	Cibulegar/Cibulegar	2,0	46,0
24	Wd. Cipaseh	Anyer/Anyer	4,3	7,1
25	Wd. Citawing	Cinangka/Cinangka	3,2	110,6
26	Wd. Ciligawir	Kadu Embe/Citasuk	3,2	480,0
27	Wd. Ciujung Lama	Pepetan/Pontang	60,0	1.300,0
28	Wd. Lontar	Lontar/Tirtayasa	6,9	412,0

Keterangan : Rw = Rawa, St = Situ, Wd = Waduk

Sumber: DPU Kabupaten Serang, Tahun 2020

2.1.6. Kondisi Klimatologi

Berdasarkan aspek klimatologi, kondisi iklim di Kabupaten Serang relatif serupa dengan kondisi iklim di Indonesia pada umumnya sedangkan menurut

klasifikasi Koppen, iklim Kabupaten Serang terdiri dari beberapa klasifikasi, belahan utara Serang beriklim Monsun Tropis (Ama), belahan selatan Serang umumnya beriklim Hutan Hujan Tropis (Afa) dan sebagian beriklim Subtropis (Cfa). Dengan demikian belahan utara Serang mempunyai bulan kering selama satu bulan atau lebih dalam setahun. Bagian selatan Serang umumnya tidak mempunyai bulan yang dapat dipastikan sebagai bulan kering. Pada bagian yang beriklim Cfa mempunyai karakteristik hujan yang serupa dengan daerah bagian selatan Serang. Suhu udara di Kabupaten Serang selama tahun 2020 berkisar antara 23,3˚C – 33,4˚C dan kelembapan relatif sebesar 82%.

Curah hujan terbesar di tahun 2020 berada pada bulan Desember dengan rata-rata curah hujan 88,5 mm dan curah hujan terendah berada pada bulan April dengan rata-rata curah hujan 27,7 mm namun di bulan selanjutnya meningkat kembali. Hal ini diluar perkiraan dimana biasanya bulan september hingga desember masuk pada musim kemarau. Rata-rata curah hujan pada tahun 2020 di Kabupaten serang dalam sebulan adalah 88,5 mm dengan lama dalam setahun masing- masing 242 hari.

Tabel 2.4

Rata- rata Curah Hujan dan Jumlah Hari Hujan Per Bulan di Kabupaten Serang Tahun 2020

Bulan	Curah Hujan (Mm)			
	Terendah	Tertinggi	Rata- rata	Hari Hujan
Januari	0,0	33,8	13,4	24
Februari	0,0	44,1	11,0	22
Maret	0,0	44,6	6,3	18
April	0,0	27,7	4,5	21
Mei	0,0	54,2	10,2	14
Juni	0,0	33,8	6,7	15
Juli	0,0	37,5	8,2	13
Agustus	0,0	30,2	3,6	5
September	0,0	40,0	4,8	10
Oktober	0,0	49,6	7,0	16
Nopember	0,0	49,8	7,3	21
Desember	0,0	89,6	15,3	23

Bulan	Curah Hujan (Mm)			
	Terendah	Tertinggi	Rata- rata	Hari Hujan
Rata – rata	**0**	**45**	**8**	**17**

Sumber : BPS Kabupaten Serang

Menurut klasifikasi Mohr daerah serang memiliki 6 (enam) bulan basah (November-April) dan 6 (enam) bulan yang tidak termasuk bulan basah maupun bulan kering, yaitu bulan Mei hingga Oktober. Pada saat bulan basah, curah hujan melebihi laju penguapan. Pada bulan yang diguyur curah hujan antara 60 mm sampai 100 mm terjadi keseimbangan antara curah hujan dan besar penguapan. Secara umum daerah Kabupaten Serang sebenarnya cukup memperoleh air dari hujan secara alami. Oleh karena itu dengan pengelolaan air-tanah-hutan yang baik dan benar serta sistem irigasi dan drainase yang baik dan tepat, maka daerah penduduk Kabupaten Serang secara umum sebenarnya dapat memenuhi kebutuhan airnya sendiri. Adapun klasifikasi iklim Kabupaten Serang menurut klasifikasi Mohr adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Klasifikasi Iklim Kabupaten Serang Menurut Pembagian Kecamatan Dengan Menggunakan Cara Mohr (1933)

Tipe Iklim	Daerah Penyebaran (Kecamatan)
B1	Padarincang
C2	Cinangka, Kopo
C3	Cikeusal,
D1	Ciomas
D2	Pabuaran, Pamarayan
D3	Kragilan, Petir, Anyer
E2	Waringin Kurung, Mancak
E3	Baros, Ciruas, Tirtayasa

2.1.7. Kondisi Pemanfaatan Ruang

A. Pola Tutupan dan Pengunaan Lahan

Berdasarkan hasil interpretasi Citra Satelit SPOT-4 tahun 2010, tutupan lahan di Kabupaten Serang didominasi oleh lahan pertanian yang mencapai ±

57,07% dari total luas lahan di Kabupaten Serang. Pertanian ini dibedakan menjadi pertanian pada lahan basah dan lahan kering. Yang dimaksud dengan pertanian lahan basah adalah persawahan sedangkan pertanian lahan kering seperti perkebunan, tegalan, dan ladang. Untuk pertanian lahan basah secara umum paling banyak terdapat di wilayah Serang Barat bagian Utara terutama di Kecamatan Pontang, Tirtayasa, Tanara, Carenang dan Binuang. Sedangkan untuk pertanian lahan kering terutama berada di wilayah Serang Selatan, terutama di Kecamatan Baros, Petir, Cikeusal, Pabuaran, Ciomas dan Padarincang.

Tutupan lahan berikutnya yang cukup mendominasi adalah hutan dengan proporsi sebesar ± 30,96% dari total luas lahan di Kabupaten Serang. Tutupan hutan ini terdiri dari hutan primer, hutan sekunder, kebun campuran (*mixed use* antara hutan dan kebun), dan hutan mangrove. Keberadaannya tersebar di wilayah Serang Selatan hingga Barat, terutama di Kecamatan Ciomas, Padarincang, Gunungsari, Mancak, Waringinkurung, serta Anyer. Sementara untuk hutan mangrove sebarannya terutama di wilayah pesisir Barat dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Serang.

Adapun sisanya atau sekitar ± 11,97% dari total luas lahan di Kabupaten Serang, tutupannya terdiri dari berbagai macam fungsi yang mencakup permukiman, tambak/empang, tubuh air/sungai, semak belukar, dan lahan terbuka.

Tabel 2.6
Tutupan Lahan Di Kabupaten Serang Interpretasi Citra Satelit Tahun 2010

NO.	JENIS TUTUPAN LAHAN	LUAS TUTUPAN LAHAN		%
		HEKTAR (Ha)	AREA (Km^2)	
1	Hutan Primer	495,59	4,96	0,33
2	Hutan Sekunder	5.523,76	55,24	3,68
3	Kebun Campuran	39.653,09	396,53	26,45
4	Ladang/Tegalan	35.924,70	359,25	23,96
5	Lahan Terbuka	271,15	2,71	0,18
6	Mangrove	746,72	7,47	0,50

NO.	JENIS TUTUPAN LAHAN	LUAS TUTUPAN LAHAN		%
		HEKTAR (Ha)	AREA (Km^2)	
7	Perkebunan	8.876,35	88,76	5,92
8	Permukiman	8.554,70	85,55	5,71
9	Sawah	40.770,95	407,71	27,19
10	Semak Belukar	652,15	6,52	0,43
11	Tambak/Empang	7.261,85	72,62	4,84
12	Tubuh Air/Sungai	1.199,32	11,99	0,80
	TOTAL	**149.930,32**	**1.499,30**	**100,00**

Sumber: Hasil interpretasi Citra Satelit SPOT-4, Tahun 2010

Secara garis besar pemanfaatan lahan di Kabupaten Serang pada tahun 2010 dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Kawasan pertanian, tutupannya cukup dominan dengan sebaran persawahan (lahan basah) terutama terdapat di Kecamatan Tirtayasa dan untuk tegalan (lahan kering) paling banyak di Kecamatan Baros.
- Kawasan hutan terutama berupa hutan primer dan sekunder, sebarannya terutama di kecamatan-kecamatan yang berada di Serang bagian Barat dan Serang bagian Selatan.
- Kawasan permukiman, tersebar disetiap kecamatan yang berada di Kabupaten Serang, konsentrasinya terutama disekitar pusat-pusat kecamatan.
- Kawasan tambak/empang, sebarannya terutama di wilayah pesisir Serang Utara mulai dari Kecamatan Bojonegara, Pontang, Tirtayasa, dan Tanara.

Sedangkan penggunaan lahan di Kabupaten Serang pada Tahun 2020 berdasarkan data pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Luas Lahan Menurut Penggunaan
Tahun 2017

Penggunaan	Luas Lahan	Persentase
	Area (Ha)	(%)
Bandar Udara	38,10	0,03
Emplasemen	0	0

Penggunaan	Luas Lahan	Persentase
	Area (Ha)	(%)
Hutan Belukar	9.190,43	6,27
Hutan Rawa	375,49	0,26
Industri	2.277,33	1,55
Kebun Campuran	33.154,26	22,64
Ladang/Tegalan	7.599,74	5,19
Padang Rumput	2.796,93	1,91
Perkampungan	12.441,06	8,49
Perkebunan Besar	397,92	0,27
Perumahan	569,46	0,39
Rawa	1.477,52	1,01
Sawah	59.001,02	40,28
Semak Belukar	6.615,07	4,52
Sungai/Danau/Telaga	1.254,13	0,86
Tambak	7.331,71	5,01
Tanah Kosong	1.937,76	1,32
Jumlah	**146.457,94**	**100,00**

Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka Tahun 2019

Penggunaan lahan di Kabupaten Serang pada tahun 2020 didominasi oleh penggunaan lahan untuk sektor pertanian, hortikurtura, perkebunan, dan perikanan dimana penggunaan lahannya sekitar 75 % (persen) dari luas wiayah keseluruhan Kabupaten Serang.

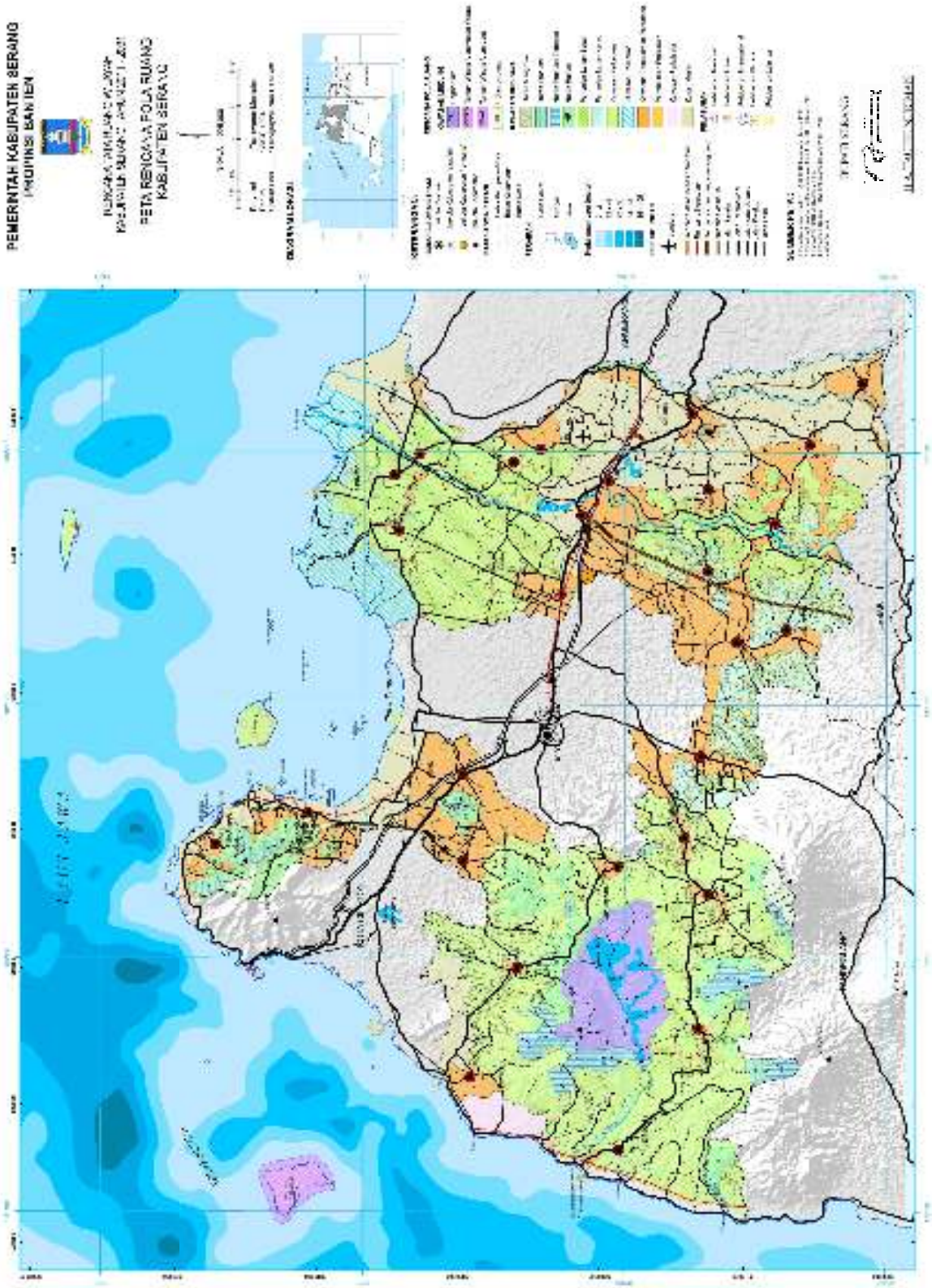

Gambar 2.2

Peta Pola Ruang Wilayah Kabupaten Serang

B. Kawasan Lindung

Kawasan lindung di Kabupaten Serang tersebar di seluruh wilayah yang meliputi sempadan sungai dan sempadan pantai, sedangkan kawasan lindung selain sempadan sungai dan pantai, terdapat di wilayah Serang Selatan dan Utara yaitu di wilayah Kecamatan Ciomas, Padarincang, Mancak, dan Kramatwatu. Sedangkan di wilayah utara terdapat di Kecamatan Bojonegara dan Puloampel. Adapun kawasan lindung memiliki persentase sebesar 11,63 % dari total luas lahan di Kabupaten Serang. Kawasan lindung ini mencakup hutan lindung, cagar alam, daerah resapan *(Catchment Area),* lahan kritis hutan bakau, dan danau/situ.

Perkembangan yang terjadi terhadap keberadaan hutan lindung ini mengalami penurunan, sehingga diperkirakan telah terjadi penyusutan luas hutan lindung sebesar 4.361,79 Ha, dari 17.906,61 Ha, menjadi 13.544,82 Ha. Kawasan hutan lindung berada pada 12 kecamatan, yaitu kecamatan-kecamatan yang berada di Serang bagian Barat dan Serang bagian Selatan. Kawasan bendungan air irigasi yang berada pada Kecamatan Cikeusal yang dialirkan di kawasan pertanian. Berikut ini diuraikan mengenai kondisi kawasan hutan lindung di Kabupaten Serang.

Tabel 2.8
Luas Kawasan Hutan Lindung Menurut Lokasi Di Kabupaten Serang, 2020

No	Kawasan Hutan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Cagar Alam Rawa Danau	3.542,70	56.07
2	Cagar Alam Tukung Gede Timur	406,70	6.44
3	Cagar Alam Tukung Gede Barat	1.121,00	17.74
4	Taman Wisata Alam Pulau Sangiang	528,15	8.36
5	Taman Wisata Alam Laut Pulau Sangiang	720,00	11.40
Luas Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Serang		**6.318,55**	**100.00**

C. Bencana Alam

Bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain adalah gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Sedangkan kawasan yang rawan bencana adalah daerah yang pernah mengalami bencana atau daerah dikategorikan mempunyai potensi terjadinya bencana. Beberapa potensi bencana yang ada di wilayah Kabupaten Serang antara lain adalah sebagai berikut:

a. Banjir

Kawasan rawan banjir umumnya adalah daerah di sepanjang tepi Sungai Ciujung bagian hulu bahkan hingga bagian hilir di daerah muara Sungai Ciujung dengan anak-anak sungainya. Dalam setiap tahunnya Sungai Ciujung ini menyebabkan banjir di daerah muara sungai di Kecamatan Tirtayasa dan Kecamatan Pontang, Beberapa kecamatan yang juga terkena banjir antara lain : Kecamatan Baros, Kecamatan Cikande, Kecamatan Cinangka, Kecamatan Ciruas, Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Kibin, Kecamatan Kopo, Kecamatan Kramatwatu, Kecamatan Mancak, Kecamatan Padarincang, Kecamatan Pamarayan, Kecamatan Petir dan Kecamatan Puloampel. Penyebab banjir lainnya adalah terjadinya sedimentasi/pendangkalan pada sungai-sungai tersebut, sehingga menyebabkan sumbatan. Hal ini lebih terlihat di wilayah muara Sungai Ciujung.

b. Gunung Api

Potensi bencana gunung meletus yang ada di wilayah Kabupaten Serang berasal dari Gunung Anak Krakatau yang berada di Kawasan Selat Sunda. Wilayah yang potensial terkena dampak letusan gunung ini berada diwilayah pesisir barat Kabupaten Serang yaitu kawasan Anyar dan Cinangka. Selain itu terdapat pula kawasan rawan bencana disekitar

Gunung Karang di wilayah Serang bagian Selatan. Walaupun pada dasarnya Gunung Karang sudah tidak aktif namun kawasan disekitar lereng gunung tersebut tetap merupakan kawasan yang rawan bencana.

c. Tanah Longsor

Kondisi topografi dan morfologi Kabupaten Serang yang sangat bervariarif dari wilayah pesisir sampai dengan wilayah perbukitan memiliki potensi adanya bencana tanah longsor. Wilayah yang rawan terkena bencana tanah longsor ini biasanya dikawasan perbukitan atau lereng perbukitan. Beberapa kawasan yang rawan terkena bencana tanah longsor antara lain adalah di bagian selatan Kabupaten Serang yang berada di kawasan G. Karang yang meliputi Kecamatan Padarincang, Ciomas, Pabuaran, Gunung Sari dan Baros. Selain itu juga dibeberapa kawasan lainnya yaitu di Kecamatan Anyar, Waringin Kurung, Bojonegara dan Pulo Ampel.

d. Gempa Bumi

Potensi bencana gempa bumi di wilayah Kabupaten Serang secara umum dapat diakibatkan karena adanya aktivitas vulkanik (Gn. Anak Krakatau) maupun pergerakan lempeng tektonik. Seluruh wilayah Kabupaten Serang merupakan daerah yang potensial terkena dampak gempa bumi, terutama adalah wilayah pesisir Barat Kabupaten Serang (Kawasan Pesisir Selat Sunda).

e. Tsunami

Kawasan yang berpotensi terkena dampak bencana Tsunami adalah dikawasan Pesisir Kabupaten Serang yang terletak di Kawasan Pantai Barat yaitu sepanjang Pesisir Pantai Anyar sampai Cinangka, kedua daerah ini merupakan daerah dengan potensi terkena tsunami tertinggi karena terletak pada Kawasan Selat Sunda yang merupakan daerah patahan serta Gunung Anak Krakatau.

Wilayah pesisir lain yang rawan terkena bencana tsunami adalah kawasan pesisir Utara yang berada di Laut Jawa atau Teluk Banten, walaupun tingkat kerawanannya tidak sebesar wilayah pesisir Barat. Wilayah ini meliputi kawasan Pulo Ampel, Bojonegara, Pontang, Tirtayasa dan Tanara.

Adapun daerah-daerah yang memiliki potensi rawan bencana di Kabupaten Serang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9
Kawasan Rawan Bencana Berdasarkan Data Kejadian Di Kabupaten Serang Tahun 2020

Banjir	Cuaca Ekstrim	Pergerakan Tanah	Kebakaran
22 Kec. Yaitu : Baros, Cikande, Cinangka, Ciruas, Gunungsari, Kibin, Kopo, Kramatwatu, Bojonegara, Padarincang, Petir, Anyer, Tanara, Carenang, Binuang, Kragilan, Lebakwangi, Pontang, Tirtayasa, Jawilan, Cikeusal, Pabuaran	22 Kec. Yaitu : Kecamatan Anyer, Bandung, Binuang, Carenang, Cikeusal, Cinangka, Ciomas, Gunungsari, Kibin, Kopo, Kramatwatu, Padarincang, Pamarayan, Petir, Pontang, Ciruas, Mancak, Waringin kurung, Kragilan, Cikande, Jawilan, Pabuaran	7 Kec. Yaitu: Kecamatan Mancak, Bojonegara, Cinangka, Puloampel, Cikeusal, Petir, Kragilan	21 Kec. Yaitu: Kecamatan Anyer, Bandung, Baros, Carenang, Cikande, Cikeusal, Cinangka, Ciomas, Ciruas, Jawilan, Kibin, Kragilan, Kramatwatu, Lebakwangi, Pabuaran, Padarincang, Pamarayan, Petir, Puloampel, Tirtayasa, TunjungTeja

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang, Tahun 2020

2.1.8. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Serang pada Tahun menurut data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DKPS) Kabupaten Serang Tahun 2019 dan 2020, jumlah penduduk Kabupaten Serang pada Tahun 2019 mencapai 1.482.987 jiwa dan 1.488.922 Jiwa tahun 2020. Berikut ini diuraikan jumlah penduduk Kabupaten Serang pada Tahun 2019 & 2020 menurut DKPS Kabupaten Serang.

Tabel 2.10

Jumlah Penduduk Di Kabupaten Serang Tahun 2019-2020

No.	Kecamatan	2019 (DKPS)	2020 (DKPS)
		Jumlah (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1	KRAMATWATU	92,668	98,202
2	WARINGINKURUNG	45,082	47,961
3	BOJONEGARA	46,185	48,790
4	PULO AMPEL	37,783	39,512
5	CIRUAS	77,313	82,393
6	KRAGILAN	73,832	79,501
7	PONTANG	44,479	46,996
8	TIRTAYASA	44,303	47,223
9	TANARA	38,173	42,019
10	CIKANDE	100,979	108,791
11	KIBIN	52,868	56,358
12	CARENANG	36,989	39,233
13	BINUANG	28,773	31,539
14	PETIR	56,493	61,395
15	TUNJUNGTEJA	43,148	46,900
16	BAROS	52,958	58,256
17	CIKEUSAL	71,665	77,207
18	PAMARAYAN	54,210	59,229
19	KOPO	48,400	52,766
20	JAWILAN	55,538	60,211
21	CIOMAS	37,421	42,137
22	PABUARAN	39,466	43,641
23	PADARINCANG	62,308	68,788
24	ANYAR	53,316	57,453
25	CINANGKA	53,794	58,762
26	MANCAK	43,118	48,616
27	GUNUNGSARI	21,413	23,711
28	BANDUNG	34,553	37,279
29	LEBAK WANGI	35,759	38,388
Kabupaten Serang		**1,482,987**	**1,603,257**

Sumber: BPS Kabupaten Serang dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang 2020

Apabila dibandingkan data-data kependudukan pada tahun 2019, dengan jumlah penduduk sebesar **1.482.987** jiwa dengan komposisi jumlah laki-laki sebanyak **757.412** jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak

725.575 jiwa, maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk Kabupaten Serang dari tahun 2019-2020 adalah sebesar **8,10** %.

2.1.9. Potensi Daerah

Kabupaten Serang memiliki lahan pertanian sangat luas yang dikelola oleh masyarakat. Hasil pertanian yang beragam seperti buah- buahan pisang, mangga, rambutan dan durian untuk konsumsi lokal dan memasok kebutuhan buah kota Jakarta. Kabupaten Serang juga memiliki perkebunan rakyat yang menghasilkan kelapa, kacang tanah, melinjo, kopi, cengkeh, lada, karet, vanili, kakao dan bumbu- bumbu. Juga untuk memenuhi kebutuhan lokal serta lebih banyak untuk memesok kebutuhan Jakarta.

Industri di Kabupaten Serang terbagi 2 zona industri. Zona industri Serang Barat yang terletak di Kecamatan Bojonegara, Pulo Ampel dan Kramatwatu dengan luas total 4.000 Ha berada disepanjang pantai Teluk Banten untuk pengembangan industri mesin, logam dasar, kimia, maritim dan pelabuhan.

Untuk kawasan zona industri Serang timur terletak di kecamatan Cikande, Kibin, Kragilan dan Jawilan dengan luas kawasan industri 1.115 Ha. Terdapat beberapa kawasan industri seperti Nikomas Gemilang, Indah Kiat dan Cikande Modern. Total perusahaan industri besar dan sedang di Kabupaten Serang sebanyak sekitar 145 perusahaan.

Dari segi Pariwisata, Kabupaten Serang memiliki potensi pariwisata sangat besar. Hal ini mengingat terdapat lokasi wisata berupa Pantai Anyar dan Kawasan Heritage Banten Lama, Rawa Dano, Cagar Alam Pulau Dua, Pemandian Air Panas Batukuwung serta Air Terjun, Situ, Pulau- pulau kecil yang berpontensi dijadikan objek wisata dan yang lainnya. Jumlah hotel di Kabupaten Serang terdapat sekitar 86 Hotel serta sekitar 74 lokasi Objek Wisata.

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Indikator kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam melihat kemajuan suatu wilayah. Pada bagian ini akan diuraikan mengenai kondisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi yang mencakup Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Kesenjangan dan Kemiskinan, Kesejahteraan Sosial, dan Seni Budaya dan Olah Raga.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. PDRB Tahun 2019-2020

Pada tahun 2020, PDRB Kabupaten Serang atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp 76,60 triliun, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai Rp 76,94 triliun. Tahun 2020, PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Serang tercatat sebesar Rp 53,29 triliun, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai Rp 54,40 triliun.

Tabel 2.11

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Serang Tahun 2019-2020

TAHUN	LAJU PERTUMBUHAN %	
	LPE (PDRB ADHK)	PDRB ADHB
2019	5,08	76.94
2020	-1,96	76,60

Sumber : PDRB Kabupaten Menurut Lapangan Usaha 2019-2020,

Tabel 2.12

Perkembangan Nilai PDRB
Kabupaten Serang Tahun 2019-2020

TAHUN	NILAI (Rp. Trilliun)	
	PDRB KONSTAN (PDRB ADHK)	PDRB BERLAKU (PDRB ADHB)
2019	54,40	76,94
2020	53,29	76,60

Sumber : PDRB Kabupaten Serang 2019-2020, BPS Kabupaten Serang

Perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan selama 2 (Dua) Tahun menunjukan penurunan sebagaimana terlihat pada tabel PDRB atas dasar harga berlaku dan tabel PDRB atas dasar harga konstan dibawah ini.

Tabel 2.13

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Serang

Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019-2020 (Milyar Rupiah)

LAPANGAN USAHA		2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7 308,80	7 666,90
2	Pertambangan dan Penggalian	87,60	87,35
3	Industri Pengolahan	36 350,34	35 282,53
4	Pengadaan Listrik, Gas	269,57	254,03
5	Pengadaan Air	21,89	23,91
6	Konstruksi	8 527,73	8 580,99
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7 001,79	7 005,04
8	Transportasi dan Pergudangan	2 965,56	2 980,34
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1 830,27	1 754,18
10	Informasi dan Komunikasi	598,28	654,39
11	Jasa Keuangan	2 100,94	2 102,79
12	Real Estate	3 706,12	3 837,73
13	Jasa Perusahaan	181,39	184,66
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1 746,11	1 837,71
15	Jasa Pendidikan	2 967,36	3 040,26
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	429,63	463,16
17	Jasa lainnya	850,19	845,13
PDRB ADHB		**76 943,59**	**76 601,09**

Sumber : Kabupaten Serang Dalam Angka 2020

Struktur Perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari distribusi persentase PDRB sektoral atas dasar harga berlaku, dapat berubah dari waktu ke waktu. Terjadinya perubahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu perkembangan teknologi, adanya perbedaan investasi yang dilakukan, serta perkembangan dan ketersediaan sumber daya atau faktor produksi suatu sektor usaha.

Selain itu, perubahan struktur ekonomi dapat juga disebabkan oleh adanya perbedaan laju pertumbuhan antar sektor ekonomi. Sektor ekonomi yang tingkat pertumbuhannya lebih tinggi akan memiliki kontribusi yang semakin besar, sebaliknya sektor dengan pertumbuhan yang kecil akan mengalami penurunan kontribusi terhadap total nilai tambah wilayah. Akibatnya sektor dengan kontribusi yang semakin menurun pada beberapa tahun terakhir akan menjadi kurang menarik bagi investor dibandingkan sektor

ekonomi lain yang pertumbuhan dan kontribusinya semakin besar. Sehingga akan terjadi pergeseran faktor produksi ke sektor-sektor yang semakin berkembang dengan potensi pendapatan yang lebih tinggi.

Selama ini struktur perekonomian Kabupaten Serang belum mengalami perubahan yang cukup berarti. Kategori Lapangan Usaha Industri Pengolahan, Kategori Lapangan Usaha Konstruksi, Kategori Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, serta Kategori Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masih mendominasi perekonomian Kabupaten Serang di tahun 2018. Keempat sektor ini memberikan kontribusi jauh di atas sektor-sektor lainnya dalam membentuk Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Serang.

Perekonomian Kabupaten Serang pada tahun 2020 melemah, diakibatkan Pandemi Covid-19

B. Inflasi Dan Daya Beli

Inflasi bisa memperburuk tingkat kesejahteraan masyarakat akibat menurunnya daya beli masyarakat secara umum akibat harga-harga yang naik. Selain itu distribusi pendapatan pun semakin buruk akibat tidak semua orang dapat menyesuaikan diri dengan inflasi yang terjadi. Menurut Boediono, inflasi sebagai kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada atau mengakibatkan kenaikan sebagian besar dari barang-barang lain.

Tabel 2.14

Inflasi dan Indeks Daya Beli Kabupaten Serang

Tahun 2019-2020

NO.	URAIAN	SATUAN	2019	2020
A	**INFLASI**			
1	Inflasi	%	3,3	1,91
B	**INDEKS DAYA BELI (IDB)**			
1	Indeks Daya Beli (IDB)	Poin	72,49	72,10
2	Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan	Rp.Ribu	10.802	10.665

Sumber : BPS Kabupaten Serang

Berdasarkan data diatas, Inflasi di Kabupaten Serang menurun tajam di tahun 2020, peningkatan penurunan tersebut diakibatkan oleh pandemi covid-19.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

A. Jumlah PMKS dan Penduduk Miskin

Permasalahan kesejahteraan sosial merupakan masalah yang sangat kompleks dan akan terus berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat. Hal tersebut muncul disebabkan oleh perubahan-perubahan masyarakat yang selalu menunjukan perkembangan di segala bidang baik ekonomi. sosial. budaya dan khususnya teknologi.

Seiring dengan kemajuan yang dicapai maka dampaknya semakin dirasakan. yaitu terjadinya kesenjangan sosial pada beberapa aspek kehidupan. Satu sisi menunjukan kemajuan dan meningkatkan mutu kehidupan. sedangkan di sisi lain menunjukan makin tertinggalnya kelompok-kelompok tertentu oleh kemajuan-kemajuan tersebut. Kelompok-kelompok ini dikatakan sebagai bermasalah karena keberadaannya menyebabkan dampak negatif terhadap pembangunan yang sedang dilaksanakan. Berkembangnya kelompok ini merupakan masalah sosial dan lebih lanjut merupakan penghambat pembangunan.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang. keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan. kesulitan atau gangguan. tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani. rohani. dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan. kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan. keterlantaran. kecacatan. ketunasosialan.

keterbelakangan atau keterasingan. dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan.

Deskripsi mengenai perkembangan jumlah penyandang kesejahteraan sosial di kabupaten Serang dalam beberapa tahun terakhir menunjukan adanya penurunan jumlah pada beberapa kriteria PMKS.

Tabel 2.15

Keadaan PMKS Kabupaten Serang Tahun 2020

No.	Uraian	Satuan	2020
1	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Orang	343,991
2	Jumlah PMKS yang tertangani program kesejahteraan sosial	Orang	91.695

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Serang. 2019

Berdasarkan data diatas dari jumlah PMKS pada tahun 2020 sebesar 343.991 baru tertangani sebesar 91.695 orang (26.65%).

Jumlah dan persentase Penduduk Miskin

Memasuki jaman yang penuh dengan kompetisi dan sangat mengedepankan kekuatan pasar menyebabkan beberapa bagian dari masyarakat tentunya mengalami kerentanan dalam menghadapi kondisi ini. Di sisi lain buruknya akses pendidikan, kesehatan dan lingkungan bisa membuat mereka yang semula berada di atas garis kemisinan terperosok ke dalam kategori penduduk miskin. Kondisi ini menyajikan pada kita bahwa masih banyak penduduk yang hidupnya hanya sedikit berada di atas garis kemiskinan (masyarakat rentan/berpotensi miskin). Kelompok masyarakat ini sangat rentan untuk "jatuh" pada kelompok masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan. Oleh karena itu upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara komprenhensif, mencakup berbagai aspek kehidupan harus dilakukan secara lintas sektoral. Pengentasan kemiskinan memerlukan upaya yang sungguh-sungguh, perlu komitmen bersama dari segenap unsur (pemerintah, swasta dan masyarakat) untuk menghindari kemungkinan merosotnya mutu generasi muda (*lost generation*) dan menjamin

kelangsungan pembangunan (*sustainable development*) di masa mendatang, semua ini dengan alasan semua tidak ingin pembangunan yang sudah dilakukan di berbagai bidang kemudian menjadi stagnan bahkan tidak bermanfaat lagi.

B. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2020

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas penduduk. Indeks ini dihitung secara komposit, dengan cara mengukur Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), Rata-Rata Lama Sekolah, serta kemampuan daya beli yang diperoleh dari rata-rata Pengeluaran Per Kapita Riil. Angka IPM menjelaskan kesempatan masyarakat untuk mengakses pelayanan, khususnya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Nilai Indeks Pembangunan Manusia dihitung berdasarkan pencapaian nilai indeks yang menjadi komponen penyusunnya. Indeks penyusun tersebut adalah indeks pendidikan. indeks kesehatan dan indeks daya beli. Masing-masing indeks tersebut pada dasarnya menggambarkan kondisi capaian kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi pelayanan dasar terkait dengan aspek pendidikan. aspek kesehatan dan aspek ekonomi.

Banyaknya komponen besaran indeks yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Indeks*) membuat indeks IPM ini merupakan indeks komposit yang secara sederhana dapat secara cepat memberikan gambaran tentang pencapaian pembangunan manusia yang dicapai oleh suatu wilayah. Indeks ini dapat dikatakan sebagai penyederhanaan dari kenyataan hidup yang sejatinya lebih kompleks

Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat) dan meningkatkan pendidikan (kemampuan

baca tulis dan keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi). Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM merupakan Indikator komposit tunggal yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan di suatu wilayah. Oleh karena itu, intervensi yang dilakukan untuk mengakselerasi indikator IPM harus dilakukan terhadap indikator-indikator tunggalnya. Berikut ini diuraikan kondisi capaian indikator dan indeks kesehatan, pendidikan dan daya beli masyarakat Kabupaten Serang.

Indeks Kesehatan

Peningkatan kualitas kehidupan manusia yang merupakan tujuan dari pembangunan manusia sangat terkait dengan seberaba jauh peningkatan kondisi kesehatan dapat dilakukan. Oleh karena itulah, indikator kesehatan menjadi salah satu komponen pembentuk IPM.

Indikator kesehatan yang dijadikan komponen penghitungan IPM adaalah Angka Harapan Hidup (AHH). AHH ini secara sederhananya dapat menggambarkan keberhasilan pencapaian tingkat kesehatan yang dicapai masyarakat. Konsep dasar yang digunakan adalah bahwasannya semakin baik tingkat kesehatan suatu masyarakat maka pencapaian umur tertingginya pun meningkat atau harapan untuk hidup lebih lama akan semakin besar.

Secara umum, indikator angka harapan hidup ini digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan. Hal ini berdasarkan pada konsep bahwa meningkatnya angka harapan hidup dapat berati adanya perbaikan pembangunan di bidang kesehatan yang biasanya diawali dengan membaiknya kondisi sosial ekonomi penduduk, membaiknya kondisi layanan kesehatan, serta meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan perubahan perilaku masyarakat yang lebih sehat.

Besaran Angka harapan hidup (AHH) masyarakat di Kabupaten Serang pada rentang waktu Tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan. Hal ini

dapat dilihat dari peningkatan besaran Angka Harapan Hidup (AHH) masyarakat di Kabupaten Serang dengan pencapaian 64,47 tahun pada Tahun 2019 menjadi 64,64 tahun pada Tahun 2020. Peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) masyarakat di Kabupaten Serang tentunya terkait dengan keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat. Pencapaian Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten.

Berdasarkan angka harapan hidup selanjutnya dihitung indeks kesehatan. Sejalan dengan peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) maka Indeks Kesehatan masyarakat di Kabupaten Serang dalam periode Tahun 2019-2020 juga memperlihatkan peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya besaran indeks kesehatan masyarakat Kabupaten Serang dari 74,12 poin pada Tahun 2019 menjadi 74,4 poin pada Tahun 2020. Hal ini berarti bahwa indeks kesehatan masyarakat Kabupaten Serang pada Tahun 2020 bertambah sekitar 0,28 point dari Tahun 2019.

Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan diukur berdasarkan indikator Harapan Lama Sekolah(HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Indeks pendidikan ini diukur untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat. Harapan Lama Sekolah diyakini dapat menggambarkan kemampuan dasar yang perlu dimiliki setiap individu untuk dapat memiliki peluang yang sama untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan. Selanjutnya, ukuran rata-rata lama sekolah dapat menggambarkan tingkat pengetahuan dan keterampilan lainnya secara umum.

Terkait dengan ukuran Harapan Lama Sekolah (HLS), terjadi peningkatan ukuran ini dalam kurun waktu 2019-2020. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian nilai HLS sebesar 12,43 tahun pada Tahun 2019 menjadi 12,57 Tahun pada Tahun 2020. Angka tersebut menggambarkan harapan lama sekolah di Kabupaten Serang pada Tahun 2019 adalah 12 hingga 13 tahun.

Indikator Rata-rata lama sekolah (RLS) masyarakat Kabupaten Serang dalam kurun waktu Tahun 2019-2020 juga mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari semakin lamanya rata-rata lama sekolah masyarakat

Kabupaten Serang dari 7,33 tahun pada Tahun 2019 menjadi 7,50 tahun pada Tahun 2020. Ukuran ini menggambarkan bahwa rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Serang pada Tahun 2020 bertambah sekitar 0,17 tahun dari kondisi pada Tahun 2019.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa pada Tahun 2020, rata-rata penduduk usia 15+ mencapai 7,50 tahun sekolah atau setara kelas 2 SLTP. Hal ini terlihat dari angka rata-rata lama sekolah (RLS). Dalam konteks ini, kondisi pencapaian rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Serang belum begitu besar dan masih dalam taraf setara dengan pendidikan SLTP kelas 2 (dua). Rendahnya rata-rata lama sekolah dapat disebabkan karena masih cukup besarnya penduduk yang tingkat pendidikannya tidak tamat SD maupun yang tidak sekolah.

Untuk menghitung Indeks Pendidikan, yang akan dijadikan komponen penghitungan indeks pembangunan manusia, angka rata-rata lama sekolah selanjutnya diturunkan menjadi indeks rata-rata lama sekolah yang telah dicapai dibandingkan dengan kondisi ideal sesuai standar UNDP yaitu 15 tahun (100 persen).

Berdasarkan pada nilai nilai indeks harapan lama sekolah dan indeks rata-rata lama sekolah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dihitung besaran indeks pendidikan masyarakat Kabupaten Serang. Besaran nilai indeks pendidikan di Kabupaten Serang mengalami peningkatan dari 58,35 poin pada Tahun 2018 menjadi 58,96 poin pada Tahun 2019. Berdasarkan kondisi ini, dapat dikatakan bahwa telah terjadi peningkatan nilai indeks pendidikan masyarakat Kabupaten Serang pada kurun waktu 2016-2018 atau mengalami pertumbuhan sebesar 0.61 point

Indeks Daya Beli

Ukuran Indeks Daya Beli merupakan ukuran indeks yang juga digunakan dalam penghitungan IPM. Indeks ini secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan kualitas keterampilan, kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat di suatu wilayah. Namun demikian, pengukuran indeks disederhanakan dengan menggunakan besarnya konsumsi per kapita yang telah disesuaikan. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa penggunaan

variabel konsumsi riil ini dapat mengeliminir perbedaan dan perubahan harga (inflasi) yang terjadi. Dengan demikian, angka yang berhasil dihitung dapat dibandingkan baik antar daerah dan maupun antar waktu.

Berdasarkan hasil pengukuran, daya beli masyarakat Kabupaten Serang selama periode Tahun 2019-2020 mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya daya beli masyarakat Kabupaten Serang dari Rp. 10,802 juta pada Tahun 2019 menjadi Rp. 10,665 juta pada Tahun 2020. Hal ini memperlihatkan bahwa dalam kurun waktu tersebut daya beli masyarakat Kabupaten Serang mengalami penurunan Rp.137.000,-.

Untuk lebih jelas mengenai gambaran perkembangan indikator dan indeks daya beli masyarakat di Kabupaten Serang periode 2019-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.26 berikut.

Tabel 2.16

Indikator dan Indeks Daya Beli

Kabupaten Serang Tahun 2019-2020

NO.	URAIAN	SATUAN	2019	2020
	INDEKS DAYA BELI (IDB)			
1.	Pengeluaran per Kapita per Tahun yang Disesuaikan (PPP/DB)	Rp. Juta	10,802	10,665
	Indeks Daya Beli (IDB)	**Poin**	**72,49**	**72,10**

Sumber : LKPJ Kabupaten Serang 2020

Pencapaian Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Nilai Indeks Pembangunan Manusia dihitung berdasarkan pencapaian nilai indeks yang menjadi komponen penyusunnya. Indeks penyusun tersebut adalah indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya beli. Masing-masing indeks tersebut pada dasarnya menggambarkan kondisi capaian kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi pelayanan dasar terkait dengan aspek pendidikan, aspek kesehatan dan aspek ekonomi.

Banyaknya komponen besaran indeks yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Indeks*) membuat indeks IPM ini merupakan indeks komposit yang secara sederhana dapat secara cepat memberikan gambaran tentang pencapaian pembangunan manusia yang dicapai oleh suatu wilayah. Indeks ini dapat dikatakan sebagai penyederhanaan dari kenyataan hidup yang sejatinya lebih kompleks

IPM merupakan indeks gabungan dari beberapa indeks yaitu : indeks kesehatan (angka harapan hidup), indeks pendidikan (Harapan Lama Sekolah dan rata-rata lama sekolah) dan indeks daya beli (pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan atau daya beli). Ketiga indikator tersebut dianggap dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan dan keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah. Penghitungan IPM ini merupakan formula yang digunakan oleh UNDP *(United Nation Development Program)* untuk mengukur upaya pembangunan manusia. Walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun indeks ini mampu mengukur dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk.

Berdasarkan kondisi indikator pembentukan IPM sebagaimana telah disampaikan di atas, maka nilai indeks pembangunan manusia Kabupaten Serang dalam kurun waktu Tahun 2018-2019 adalah berikut :

Tabel 2.17

Indeks Pembangunan Manusia

Kabupaten Serang Tahun 2019-2020

NO.	URAIAN	SATUAN	2019	2020
I.	**INDEKS KESEHATAN (IK)**	**Poin**	**74,12**	**74,4**
1.	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)	Tahun	64,47	64,64
II.	**INDEKS PENDIDIKAN (IP)**	**Poin**	**58,96**	**59,92**
1.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,43	12,57
2.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,33	7,50
III.	**INDEKS DAYA BELI (IDB)**	**Poin**	**72,49**	**72,10**
1.	Pengeluaran per Kapita per Tahun yang Disesuaikan (PPP/DB)	Rp. Ribu	10,802	10,665
IV.	**INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)**	**Poin**	**66,38**	**66,70**

Sumber : IPM Kabupaten Serang, BPS Kabupaten Serang

Berdasarkan uraian nilai komponen pembentuk indeks pembangunan manusia, dapat dilihat bahwa nilai IPM Kabupaten Serang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dalam rentang waktu Tahun 2019-2020, kecuali pada Indeks Daya Beli masyarakat Kabupaten Serang yang mengalami penurunan. Hal ini disebabkan adanya pandemic covid-19 yang melanda wilayah Kabupaten Serang dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Pada tabel diatas terlihat adanya peningkatan nilai IPM Kabupaten Serang dari 74,12 poin pada Tahun 2019 menjadi 74,4 poin pada Tahun 2020. Selama kurun waktu tersebut, terjadi peningkatan sebesar 0,28 poin atau terjadi pertumbuhan sebesar 0,38%.

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1. Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan ini meliputi enam bidang urusan yang seluruhnya wajib diselenggarakan dengan baik demi memenuhi hak masyarakat yang paling mendasar. Pelayanan dasar tersebut meliputi bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, sosiali, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta ketentaraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

A. Pendidikan

Sesuai dengan amanah Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya maka pemerintah daerah memiliki peran yang penting dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah mengenai pendidikan agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dalam penyelenggaraan bidang urusan pendidikan di Kabupaten Serang, pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan tujuan utama yang ingin dicapai.

1. Partisipasi Sekolah

Sesuai dengan amanah Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya maka pemerintah daerah memiliki peran yang penting dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah mengenai pendidikan agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dalam penyelenggaraan bidang urusan pendidikan di Kabupaten Serang

Indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat pemerataan pendidikan di suatu wilayah adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK menunjukkan proporsi antara jumlah penduduk

yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sementara APM menunjukkan Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Nilai APM berkisar antara 0-100, sedangkan nilai APK dapat lebih dari 100, hal ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya karena adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas.

Angka Partisipasi Kasar (APK) baik tingkat SD dan SMP pada tahun 2020 sebesar 116,78 % dan 116,96%. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) nya pada tahun yang sama masing-masing sebesar 100,00% dan 99,45%.

2. Fasilitas Pendidikan

Tingkat partisipasi sekolah tergantung pada kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat serta ketersediaan fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar Ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai penting untuk menjamin kegiatan belajar mengajar yang berkualitas bagi murid serta mendukung upaya pemerataan pendidikan. Selain fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana fisik, ketersediaan tenaga pengajar merupakan elemen penting yang secara langsung berperan dalam meningkatkan kualitas murid. Sekolah, sarana dan prasarana, guru, serat murid merupakan elemen yang saling terkait. Murid akan lebih terbantu dengan dukungan sarana prasarana pembelajaran. Di sisi lain, bagi guru akan terbantu dengan dukungan fasilitas sarana prasarana.

Secara keseluruhan maupun jenjang, jumlah sekolah di Kabupaten Serang mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Jumlah sekolah yang mengalami peningkatan paling besar adalah jenjang Madrasah Aliyah. Pada tahun 2016 Madrasah Aliyah baik negeri maupun swasta di Kabupaten Serang

sebanyak 78 unit sekolah meningkat 2 unit menjadi 80 unit sekolah pada tahun 2020. Sementara itu, pada tahun 2020 secara total terdapat 1.504 unit sekolah dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, MI, MTs, dan MA. Jumlah unit sekolah yang semakin bertambah menunjukkan upaya pemerintah dalam meningkatkan pemerataan pendidikan.

Jumlah guru pada jenjang MI, MTS, dan MA mengalami peningkatan pada periode 2016-2020. Pada tahun 2016 jumlah guru MI sebanyak 1.185 orang meningkat menjadi sebanyak 1.298 orang pada tahun 2020. Selanjutnya, jumlah guru pada jenjang MTs pada tahun 2016 sebanyak 2.387 orang meningkat menjadi sebanyak 2.732 orang pada tahun 2020, sementara jumlah guru MA mengalami peningkatan paling besar dari sebelumnya pada tahun 2016 sebanyak 849 orang menjadi 1.149 orang pada tahun 2020.

B. Kesehatan

Salah satu komponen penting dalam upaya pengembangan kualitas sumber daya manusia adalah sektor kesehatan. Semakin baik tingkat kesehatan masyarakat di suatu wilayah, maka kualitas sumberdaya manusia diharapkan juga semakin baik.

1. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan jumlah kematian bayi (usia 0-11 bulan) per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. AKB menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi seperti tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. Nilai AKB tinggi menunjukkan status kesehatan diwilayah tersebut rendah.

Pada tahun 2020 capaian AKB sebesar 8,29 kematian per 1.000 kelahiran hidup.

2. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) menggambarkan risiko yang dihadapi ibu selama kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan. Yang dimaksud dengan Angka Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya per 100.000 kelahiran hidup. Beberapa faktor yang mempengaruhi AKI diantaranya keadaaan sosial ekonomi, kehamilan yang tidak sehat, komplikasi kehamilan, stautus gizi ibu dan janin, serta ketersedian fasilitas pendukung kesehatan ibu dan persalinan. Tingginya angka kematian ibu menunjukkan keadaan sosial ekonomi yang rendah dan fasilitas pelayanan kesehatan yang rendah pula.

Sebagian besar kasus kematian ibu biasa terjadi karena tidak tersedianya akses ke pelayanan kesehatan yang berkualitas dan memadai khususnya saat menghadapi kejadian kegawat daruratan. Kematian ibu biasanya terjadi karena tidak mempunyai akses ke pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, terutama pelayanan kegawat daruratan. Sulitnya mengenal tanda bahaya dan mengambil keputusan membuat ibu terlambat mencapai fasilitas kesehatan, serta terlambat mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi adalah usia Ibu melahirkan. Terdapat dua kategori usia yang memiliki risiko tinggi kematian saat melahirkan yaitu terlalu tua pada saat melahirkan (>35 tahun) dan terlalu muda pada saat melahirkan (<20 tahun).

Pada tahun 2020 capaian AKI sebesar 204 kematian per 100.000 kelahiran hidup.

3. Fasilitas dan Layanan Kesehatan

Untuk menganalisis lebih dalam mengenai kecukupan fasilitas kesehatan di suatu daerah dapat digunakan rasio fasilitas kesehatan terhadap jumlah penduduk. Rasio rumah sakit per 100.000 penduduk Kabupaten Serang pada tahun 2019 sebesar 0,31 per 100.000 penduduk yang berarti 1 rumah sakit

melayani 323.953 penduduk. Dengan kondisi ideal 1 unit rumah sakit melayani 100.000 penduduk maka Pemerintah Kabupaten Serang perlu meningkatkan ketersediaan rumah sakit.

Dengan asumsi jumlah penduduk pada tahun 2020, kondisi ideal jumlah puskesmas di Kabupaten Serang adalah 50 unit puskesmas, sedangkan jumlah puskesmas baru ada 32 puskesmas, masih kurang 18 puskesmas lagi supaya kondisi ideal untuk pelayanan di wilayah Kabupaten Serang.

4. Tenaga Kesehatan

Dalam melaksanakan pembangunan kesehatan diperlukan sumber daya manusia kesehatan yang mencukupi dalam jumlah, jenis dan kualitasnya serta terdistribusi secara adil dan merata. Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2014, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. tenaga kesehatan meliputi: tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, dan tenaga keteknisian medis.

Jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Serang yang meliputi dokter umum, dokter ahli, dokter gigi, bidan, dan perawat pada tahun 2016 sebanyak 1.187 orang bertambah sebanyak 632 orang pada tahun 2019 sehingga jumlah keseluruhan menjadi 1.819 orang.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pekerjaan umum salah satunya dapat dilihat dari indikator kondisi jalan dan infrastruktur lainnya. Jaringan jalan yang baik, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial

masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai.

Pelaksanaan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang memiliki tujuan untuk mewujudkan pelayanan dasar masyarakat dengan tujuan mengembangkan infrastruktur, pengelolaan lingkungan hidup, dan penataan ruang yang berbasis eco-city. Adapun sasaran dari urusan ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan transportasi dan meningkatnya pelayanan drainase, dan pengendalian banjir dan air bersih. Beberapa indikator yang dapat menjelaskan pencapaian kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang antara lain perkembangan persentase jalan kabupaten, jembatan, dan drainase dalam kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan kabupaten, jembata, dan drainase.

Jalan merupakan sarana yang sangat penting untuk memperlancar dan mendorang roda perekonomian. Jalan meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Sarana jalan yang baik dapat meningkatkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Perkembangan persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan kabupaten di Kabupaten Serang mengalami kenaikan setiap tahunnya dalam lima tahun terakhir dengan rata-rata peningkatan pertahunnya sebesar 6,26 persen. Pada tahun 2016, jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang sebesar 74,13 persen meningkat menjadi sebanyak 92,05 persen pada tahun 2020. Peningkatan tersebut menujukkan capaian positif pemerintah daerah dalam perawatan dan perbaikan jalan kabupaten.

D. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Salah satu kriteria rumah layak huni adalah akses air minum layak. Rumah dianggap layak huni apabila memiliki sumber air minum yang layak. Kelayakan sumber air minum tersebut diukur dari jenis sumber air minum utama dan sumber air untuk kegiatan domestik lain seperti untuk memasak dan Mandi Cuci Kakus (MCK).

Akses air minum dianggap layak jika sumber air minum utama rumah tangga termasuk dalam sumberair terlindungi, yaitu diantaranya:

1. ledeng meteran
2. ledeng eceran
3. keran umum
4. hidran umum
5. terminal air
6. penampungan air hujan
7. sumur bor/pompa
8. sumur terlindung, dan
9. mata air terlindung.

Apabila sumber air minum utama rumah berasal dari air kemasan dan/atau air isi ulang, maka kelayakan dapat dilihat dari sumber air yang digunakan untuk kegiatan domestik lainnya seperti memasak dan kegiatan mck. Jika sumber air untuk masak dan kegiatan MCK berasal dari salah satu dari 9 jenis sumber air terlindungi, maka rumah dianggap layak dari segi akses air minum.

E. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat merupakan hal yang dapat membantu proses pembangunan suatu wilayah. Untuk itu, perlu

adanya pemantauan mengenai tindak pidana kriminalitas yang terjadi pada wilayah tersebut dengan tujuan mendukung proses pencapaian ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Data capaian pada tahun 2020, persentase penurunan jumlah pelanggaran terhadap perda sebesar 22,86 persen. Persentase penurunan wilayah rawan trantibum mencapai 33,33 persen dan persentase gangguan terhadap masyarakat yang dapat diselesaikan telah mencapai 100 persen.

F. Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya meliputi jasmani, rohani, dan sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan secara mendadak yang kurang mendukung atau menguntungkan.

Data jumlah PMKS yang tertangani pada tahun 2020 sebesar 98,24 persen dari total jumlah PMKS yang ada di Kabupaten Serang.

2.3.2. Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

A. Tenaga Kerja

Aspek ketenagakerjaan menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan penduduk. Beberapa masalah muncul di sektor ketenagakerjaan, seperti jumlah perusahaan yang telah melakukan syarat kerja serta jumlah kasus penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada tingkat mediasi. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan terkait

ketenagakerjaan bagi para penduduk. Menghadapi masalah dan tantangan tersebut memerlukan kebijakan pemerintah sebagai bentuk perhatian untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Capaian indikator untuk peningkatan kesempatan dan lapangan kerja serta kualitas dan produktivitas tenaga kerja pada tahun 2020. Realisasi jumlah perusahaan yang telah melakukan syarat kerja sebanyak 614 perusahaan dari target sebanyak 820 perusahaan. Selanjutnya, realisasi jumlah kasus penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada tingkat mediasi sebesar 100,00 persen sementara target RPJMD sebesar 100,00 persen.

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan daerah membutuhkan dukungan dari tiga pilar utama, yaitu pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Nilai IPG mendekati 100 mengindikasikan semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki- laki dan perempuan.

Data capaian IPG Kabupaten Serang pada tahun 2020 sebesar 92,14 point lebih tinggi dari target yang ditetapkan didalam RPJMD yaitu sebesar 91,98 point.

C. Pangan

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Pemenuhan pangan menjadi kebutuhan hidup yang tidak dapat digantikan. Ketersediaan pangan menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintah daerah. Berdasarkan data rata-rata konsumsi kalori per kapita sehari menurut

kelompok komoditas makanan dan kelompok pengeluaran jumlah konsumsi kalori Kabupaten Serang sebesar 1.374 kcal untuk penduduk dengan pengeluaran 40 persen terbawah, 2.202 kcal untuk penduduk dengan pengeluaran 40 persen tengah, serta 2.726 kcal untuk penduduk dengan pengeluaran 20 persen teratas. Sedangkan berdasarkan komoditasnya, untuk semua kelompok pengeluaran didominasi oleh padi-padian.

D. Pertanahan

E. Lingkungan Hidup

Isu mengenai kualitas hidup berkaitan erat dengan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang dilakukan sekarang untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa harus mengurangi manfaatnya bagi generasi yang akan datang. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indeks komposit yang menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Tiga indikator yang menjadi dasar penilaian adalah Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Nilai indeks berkisar antara 0-100, dengan kategori nilai:

1. Sangat Baik : IKLH > 80
2. Baik : 70 < IKLH ≤ 80
3. Cukup Baik : 60 < IKLH ≤ 70
4. Kurang Baik : 50 < IKLH ≤ 60
5. Sangat Kurang Baik : 40 < IKLH ≤ 50

Pada tahun 2020, nilai IKLH Kabupaten Serang mengalami penurunan signifikan menjadi 62,78 dari data capaian tahun 2019 sebesar 67,17. Hal ini menunjukkan perlu adanya evaluasi upaya pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Selain indikator IKLH, urusan lingkungan hidup yang ditangani Pemerintah Kabupaten Serang di antaranya adalah penanganan dan pengelolaan sampah serta peneglolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Data cakupan pelayanan pengelolaan sampah 3R pada tahun 2020 cakupannya mencapai 21,25 persen. Sementara itu, tingkat pengelolaan RTH pada tahun 2020 cakupannya mencapai 90 persen.

F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menjadi rujukan penting dalam proses pelaksanaan kebijakan-kebijakan seperti politik, sosial, dan ekonomi agar tepat sasaran. Pelayanan dokumen kependudukan yang dimaksud diantaranya meliputi pembuatan KTP, KK, Akte Kelahiran, dan Akte Kematian.

Realisasi cakupan pelayanan dokumen kependudukan dan catatan sipil pada tahun 2020 sudah tercapai 100 persen.

G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa Kabupaten Serang dapat tercermin dalam pelayanan pemerintah desa yang mengalami peningkatan. Beberapa indikator pemberdayaan desa diantaranya prosentase desa memiliki bumdes aktif, jumlah TTG yang dimanfaatkan, jumlah desa dengan kategori minimal berkembang, jumlah sarana prasarana desa yang dibangun mandiri, prosentase desa dengan tertib administrasi, serta prosentase desa dengan efektivitas anggaran.

Capaian Program Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Serang Tahun 2020 relatif baik, semua indikator mencapai target yang sudah ditetapkan didalam RPJMD. Indikator-indikator tersebut adalah Prosentase Desa Memiliki BUMDes Aktif; Jumlah TTG yang dimanfaatkan; Jumlah Desa

dengan Kategori Minimal Berkembang; Jumlah Sarana Prasarana Desa Yang Dibangun Mandiri; Prosentase Desa dengan Tertib Administrasi; dan Prosentase Desa dengan Efektivitas Anggaran.

H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) diukur dengan menurunnya laju pertumbuhan penduduk dan capaian peserta KB aktif.

Data jumlah tempat pelayanan KB di Kabupaten Serang pada tahun 2020 sebanyak 1.778 unit yang terdiri atas 326 unit Pos KB dan 1.452 unit Sub Pos KB. Berdasarkan kecamatan, jumlah tempat pelayanan KB paling banyak berada di Kecamatan Cinangka, Cikeusal, dan Padarincang dengan jumlah unitnya berturut-turut sebanyak 97, 94, dan 93 unit.

I. Perhubungan

Dalam hal target penyelenggaraan aspek pelayanan publik bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah, maka terdapat beberapa sasaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Serang, diantaranya rasio jumlah angkutan darat terhadap jumlah penumpang angkutan darat, tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten, tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek, serta tersedianya pelabuhan penyeberangan pada kabupaten yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran.

Secara umum, data-data sampai dengan tahun 2020, untuk seluruh sasaran telah berhasil untuk dilaksanakan selatif sudah cukup baik. Namun demikan, beberapa catatan muncul terutama berkaitan dengan tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan

untuk jaringan jalan kabupaten. Cakupan yang dicapai indikator tersebut selama empat tahun terakhir terus menurun. Cakupan jaringan angkutan umum penting untuk mempermudah akses masyrakat dalam mencapai daerah lain guna membantu aktivitas baik ekonomi maupun non-ekonomi.

J. Komunikasi dan Informatika

Keberadaan hotspot internet di tingkat kecamatan diharapkan dapat meningkatkan penyebarluasan informasi. Sampai dengan tahun 2020, peningkatan ketersedian hotspot internet cukup baik dan melebihi dari target yang ditetapkan didalam dokumen RPJMD Kabupaten Serang.

K. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Didalam dokumen RPJMD tahun 2016-2021, indikator yang menjadi tanggung jawab didalam urusan koperasi usaha kecil & menengah adalah rasio koperasi aktif (proporsi jumlah koperasi aktif terhadap total jumlah koperasi yang ada) dan rasio usaha mikro & kecil (rasio jumlah usaha mikro & kecil terhadap jumlah usaha kecil & menengah).

Data capaian pada tahun 2020 untuk kedua indikator tersebut diatas adalah 74,72 persen dan 99,28 persen.

L. Penanaman Modal

Penanaman modal atau investasi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, sehingga semakin tinggi penanaman modal di suatu daerah akan mendorong pertumbuhan ekonomi untuk semakin meningkat. Oleh karena itu, untuk mengarahkan potensi ekonomi lokal, penyelenggaraan urusan penanaman modal menjadi salah satu urusan yang dapat mendukung peningkatan kontribusi sektor keuangan terhadap PDRB di Kabupaten Serang.

Penanaman modal sendiri dapat dibedakan menjadi Penamanan Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). PDMN adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Sedangkan PMA adalah penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia, artinya bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut.

Pada tahun 2020, nilai investasi PMA dan PMDN masing-masing sebesar 4,53 trilyun dan 3,37 trilyun. Nilai investasi PMA tahun 2020 ini sedikit mengalami penurunan bila dibandingkan capaian tahun 2019 sebesar 4,55 trilyun. Tetapi sebaliknya untuk nilai investasi PMDN tahun 2020 ini mengalami peningkatan yang signifikan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2019 sebesar 2,31 Trilyun.

M. Kepemudaan dan Olah Raga

Pada dasarnya kepemudaan dan olahraga melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kepemudaan dan olahraga. Urusan kepemudaan dan olah raga diarahkan pada penyiapan sumber daya manusia untuk menjadi pemimpin masyarakat serta sebagai pelaku utama dalam pembangunan di dalam lingkup kepemudaan dan olahraga. Dalam rangka memenuhi arahan tersebut diperlukan program-program yang berkaitan dengan sektor lain, misalnya pendidikan, kesehatan, kepemimpinan serta profesionalitas.

Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang bekerja sama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jumlah organisasi pemuda dihitung dari jumlah organisasi pemuda yang aktif sampai dengan tahun pengukuran. Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan kepemudaan dan olahraga

dapat diukur melalui indikator jumlah organisasi pemuda, cakupan pembinaan organisasi kepemudaan, cakupan atlit berprestasi, dan tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga masyarakat.

Data capaian untuk indikator cakupan atlet berprestasi pada tahun 2020 sebesar nol persen, hal ini disebabkan tidak ada event olahraga akibat Pandemi Covid-19. Sedangkan untuk indikator Tingkat Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga masyarakat (kecamatan) mencapai target sebesar 4 % dari yang ditetapkan didalam dokumen RPJMD.

N. Persandian

Salah satu urusan wajib diluar pelayanan dasar yang perlu diatur oleh Perangkat Daerah adalah bidang persandian. Kewenangan daerah terkait dengan urusan persandian telah dijabarkan dalam Pemetaan Urusan Persandian dalam rangka Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Bidang Persandian Sesuai Arah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam lampiran Undang-Undang Pemerintah Daerah telah dijelaskan terkait pembagian urusan pemerintahan untuk bidang persandian.

Kewenangan pertama adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, yaitu dengan melaksanakan tata kelola Jaminan Keamanan Informasi (JKI) yang meliputi aspek kerahasiaan, ketersediaan, keutuhan, keaslian dan/atau nir-sangkal. Indikator keberhasilan dari layanan ini dapat dilihat dari jumlah informasi dan juga jumlah konten informasi yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu layanan yang juga perlu dilaksanakan yaitu dukungan kegiatan pengamanan informasi, indikatornya dilihat dari jumlah aset atau fasilitas yang harus diamankan serta jumlah rata-rata kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi per bulannya.

Kewenangan kedua yaitu terkait penetapan pola hubungan komunikasi sandi yaitu dengan layanan berupa pelaksanaan pola hubungan komunikasi sandi, indikatornya dilihat dari jumlah organisasi pemerintah daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan atau rasio dari jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah dengan jumlah total perangkat daerah (Majalah Info Singkat Permendagri Vol. VIII, No. 09/I/P3DI/Mei/2016). Untuk mengaplikasikan indikator tersebut perlu adanya kerjasama antara urusan komunikasi dan informatika dengan Persandian dan Telekomunikasi di Kabupaten Serang.

O. Kebudayaan

Pembangunan bidang urusan kebudayaan sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab, serta mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk pencapaian masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan kebudayaan di Kabupaten Serang dapat diukur dengan indikator cakupan SDM, organisasi, pelestarian, kajian, fasilitasi, gelar, misi dan tempat kesenian dan budaya.

Data capaian tahun 2020, realisasi capaian indikator tersebut jauh dengan target yang ingin dicapai dengan realisasi capaian sebesar 26 persen, dari target yang ditetapkan 100 persen.

P. Perpustakaan

Bidang urusan perpustakaan, merupakan suatu wadah atau tempat yang di dalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat yang disusun menurut sistem tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan perpustakaan, dapat diukur melalui indikator: koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (Rasio jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah terhadap jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah) serta jumlah pengunjung perpustakaan daerah terhadap target jumlah kunjungan perpustakaan daerah.

Berdasarkan data capaian tahun 2020, capaian indikator jumlah pengunjung perpustakaan daerah terhadap target jumlah kunjungan perpustakaan daerah turun menjadi 83 persen dan berada di bawah target RPJMD. Sedangkan capaian indikator koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (Rasio jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah terhadap jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah) tercapai 100 persen.

Q. Kearsipan

Berbagai macam kegiatan operasional maupun program kerja yang dijalankan oleh pemerintah perlu didukung oleh sistem pengarsipan yang baik agar dapat menyajikan informasi perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dari tahun ke tahun. Terlebih untuk menciptakan tata kelola administrasi yang baik juga diperlukan pemeliharaan dan pelestarian arsip daerah yang merupakan bahan kerja dalam mencapai tujuan pemerintahan. Oleh karena itu, seluruh jajaran pemerintah perlu menyadari pentingnya arsip, sehingga akan mempermudah dalam penyelenggaraan program kearsipan.

Berdasarkan data tahun 2020, realisasi indikator Rasio Jumlah SKPD yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku Terhadap Total Jumlah SKPD Yang Ada (%), cukup baik dengan capaian berada di atas target RPJMD.

2.3.3. Fokus Urusan Pilihan

A. Kelautan dan Perikanan

Pengelolaan perikanan harus dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan. Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Adapun sasaran pembangunan di bidang perikanan di Kabupaten Serang adalah untuk meningkatkan produksi dan mutu perikanan. Hal tersebut berkaitan dengan seberapa tinggi kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB, tingkat konsumsi ikan, jumlah produksi perikanan, dan nilai produksi perikanan yang menjadi indikator kinerja pemerintah daerah Kabupaten Serang. Hal ini tentu ditujukan untuk mencapai peningkatan produksi dan produktivitas perikanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan.

Untuk melihat keberhasilan pelaksanaan bidang urusan kelautan dan perikanan di Kabupaten Serang, terdapat indikator yang menjadi tolak ukur penilaiannya. Di Kabupaten Serang, empat indikator yang digunakan adalah : kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB, tingkat konsumsi ikan, jumlah produksi perikanan, dan nilai produksi perikanan.

Data capaian indikator-indikator tersebut diatas pada tahun 2020, berturut-turut sebesar : 9,50%; 37,21 kg/kapita/tahun; 49.704,77 ton dan 373,92 milyard.

B. Pariwisata

Pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pariwisata di Kabupaten Serang diarahkan untuk mencapai tujuan pengembangan potensi dan ketahanan budaya dengan sasaran meningkatnya kontribusi sektor pariwisata. Pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Serang sendiri, terdiri dari jenis objek wisata alam dan objek wisata buatan. Data sampai dengan tahun 2018, total objek wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Serang sebanyak 99 buah.

C. Pertanian

Sebagai salah satu sektor penting, pertanian memiliki hubungan langsung dengan kehidupan manusia karena menyediakan kebutuhan dasar bagi manusia. Pertanian, dalam arti luas, tidak hanya mencakup kegiatan tanaman pangan, seperti jagung dan padi, tetapi juga mencakup perkebunan dan peternakan. Kegiatan pertanian merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, dan sumber energi. Penyelenggaraan urusan pertanian bertujuan untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian yang mencakup indikator kontribusi sub sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan terhadap PDRB serta tingkat pembangunan kawasan pertanian, perkebunan, dan peternakan di Kabupataen Serang. Penyelenggaraan urusan pertanian juga memuat indikator tentang ketersediaan energi dan protein serta pencapapian skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Luas lahan pertanian tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan kawasan pertanian dan perkebunan. Kegiatan tersebut tentu membutuhkan lahan agar pertanian dan perkebunan dapat optimal.

Data capaian tahun 2020 untuk indikator kontribusi subsektor pertanian & perkebunan terhadap PDRB; dan indikator tingkat pembangunan kawasan pertanian, masing-masing sebesar 10,01 persen dan 151 persen, melebihi dari target yang sudah ditetapkan didalam RPJMD.

D. Perdagangan

Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan ha katas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Pengertian perdagangan tersebut merupakan pengertian yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Adapun sub urusan perdagangan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari perizinan dan pendaftaran perusahaan, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standarisasi, serta perlindungan konsumen.

Apabila suatu daerah memproduksi barang dan/atau jasa melebihi dari kebutuhan domestik, maka daerah tersebut dapat tertarik untuk memperluas pasar ke luar daerah, bahkan ke luar negeri.

Kinerja pemerintahan urusan perdagangan memiliki beberapa indikator, yaitu kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, rasio jumlah pasar rakyat yang direvitalisasi terhadap total jumlah pasar rakyat, jumlah pasar rakyat yang dibangun, dan tingkat pembangunan resi gudang. Pada tahun 2020, capaian masing-masing indikator tersebut berturut-turut sebesar : 9,3 persen; 87 persen; nol/tidak ada pembangunan pasar; dan nol/tidak ada pembangunan resi gudang.

E. Perindustrian

Industri besar merupakan industri yang menyerap tenaga kerja paling banyak di Kabupaten Serang, diikuti oleh industri kecil/rumah tangga dan industri sedang. Pada tahun 2018, tercatat ada 119 perusahaan besar dengan tenaga kerja terserap sebanyak 50.522 jiwa. Pada tahun yang sama, terdapat 124 industri sedang dengan 5.683 tenaga kerja.

Indikator kinerja pembangunan daerah urusan pelayanan pilihan terkait perindustrian di Kabupaten Serang terdiri dari kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB, tingkat pembangunan kawasan sentra industri kecil menengah (IKM), dan tingkat pengembangan kawasan sentra IKM lama.

Data capaian indikator tersebut diatas pada tahun 2020, untuk indikator kontribusi sektor perindustrian mencapai 49,42 persen, untuk indikator tingkat pembangunan kawasan sentra IKM baru di Kabupaten Serang sebesar 45 persen dan untuk indikator Tingkat pengembangan kawasan sentra IKM lama sebesar 100 persen.

F. Transmigrasi

Transmigrasi merupakan salah satu upaya untuk pengembangan wilayah. Metodenya tidak lagi bersifat sentralistik dan top down dari Pusat, melainkan berdasarkan Kerja sama Antar Daerah pengirim transmigran dengan daerah tujuan transmigrasi dengan tujuan untuk mendukung ketahanan pangan dan penyediaan papan; Mendukung kebijakan energi alternatif (bio-fuel); Mendukung pemerataan investasi ke seluruh wilayah Indonesia; Mendukung ketahanan nasional pulau terluar dan wilayah perbatasan dan menyumbang bagi penyelesaian masalah pengangguran dan kemiskinan.

2.3.4. Fokus Pelayanan Penunjang Urusan

Urusan pemerintahan fungsi penunjang, menurut Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang

Perangkat Daerah, adalah urusan yang dimiliki oleh satuan kerja perangkat daerah yang memberikan pelayanan bagi organisasi maupun perangkat daerah lain. Adapun yang termasuk dalam urusan pemerintahan fungsi penunjang adalah:

1. Fungsi penunjang administrasi pemerintahan,
2. Fungsi penunjang perencanaan pembangunan,
3. Fungsi penunjang penelitian dan pengembangan,
4. Fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan,
5. Fungsi penunjang keuangan, dan
6. Fungsi penunjang pengawasan.

Setiap fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan pada prinsipnya diwadahi dalam satu satuan kerja perangkat daerah. Hal itu ditujukan agar fungsi penunjang tersebut dapat terselenggara secara optimal yang didukung oleh sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup dengan kompetensi yang sesuai berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut.

A. Fungsi penunjang administrasi pemerintahan

Indikator kinerja pembangunan daerah urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi pemerintahan di Kabupaten Serang memiliki beberapa indikator terkait untuk menunjang pelayanan yang optimal bagi masyarakat. Adapun indikator tersebut adalah indikator yang terkait dengan kapasitas kelembagaan daerah dan kualitas pelayanan informasi.

Adapun indikator yang terkait dengan kapasitas kelembagaan daerah terdiri dari tiga indikator: tingkat pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran, tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur, dan tingkat penataan kelembagaan pemerintah daerah. Capaian tiga indikator diatas pada

tahun 2020, masing-masing sebesar 100 persen, melebihi target yang ditetapkan didalam RPJMD.

Indikator terkait kualitas pelayanan informasi terdiri dari dua indikator, yaitu terbangun dan teraksesnya media pelayanan informasi daerah serta cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat kecamatan. Capaian dua indikator diatas pada tahun 2020, masing-masing sebesar 100 persen, melebihi target yang ditetapkan didalam RPJMD.

B. Fungsi penunjang perencanaan pembangunan

Fungsi penunjang perencanaan pembangunan merupakan fungsi penunjang yang berperan untuk memastikan ketersediaan dan kualitas data dan informasi yang mendukung penyusunan dokumen rencana pembangunan. Selain itu, fungsi ini perlu untuk menyinkronkan dokumen rencana pembangunan di berbagai tingkat administratif, yaitu pusat, provinsi, dan kota/kabupaten, beserta realisasinya. Untuk melihat kinerja pemerintah daerah, beberapa sasaran dan indikator perencanaan pembangunan disusun. Sasaran dari urusan pemerintahan fungsi penunjang perencanaan di Kabupaten Serang yang terkait adalah kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran SKPD, kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Serang, pembangunan yang sesuai dengan perencanaan, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, penyelenggaraan pemerintah daerah, serta keselarasan perencanaan pembangunan daerah.

Data capaian tahun 2020 untuk sasaran pemerintah daerah terhadap kualitas perencanaan, pengendaliann dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran SKPD yang menggunakan indikator tingkat pemenuhan

ketersediaan dokumen rencana lima tahunan maupun tahunan, pelaporan kinerja, dan pelaporan keuangan SKPD berturut-turut mencapai 100%.

Untuk mencapai sasaran peningkatan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, pemerintah Kabupaten Serang perlu memastikan ketersediaan dokumen-dokumen yang mendukung sasaran tersebut. Pemerintah Kabupaten Serang berhasil menyediakan data/informasi pembangunan daerah setiap tahunnya, terbukti dengan pencapaian 100 persen setiap tahun.

C. Fungsi penunjang penelitian dan pengembangan

Adanya penyelenggaraan urusan pemerintahan fungsi penunjang penelitian dan pembangunan tak lepas dari penyelenggaraan pemerintah daerah. Fungsi tersebut berkaitan dengan penyusunan kebijakan pemerintah daerah dan evaluasi atas kebijakan yang disusun dan diimplementasikan sebelumnya. Terkait urusan pemerintahan fungsi penunjang penelitian dan pembangunan, data yang berhasil diperoleh adalah data LKPJ Bupati Serang pada tahun 2018. Pada tahun 2018 tersebut, sebanyak 86 persen hasil penelitian yang dimanfaatkan di Kabupaten Serang. Tentu akan terlihat kualitas dan peningkatannya apabila terdapat tren data yang lengkap pada kurun waktu 2016 - 2019 sehingga dapat menjadi evaluasi dan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Serang dalam mengembangkan dan mengimplementasikan hasil penelitiannya.

D. Fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan

Kesesuaian antara Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki dengan deskripsi pekerjaan yang dilaksanakan menjadi salah satu hal penting dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat yang optimal. Keberadaan SDM yang berkualitas pun juga pada akhirnya akan mendorong pelayanan kepada

masyarakat yang lebih baik. Kinerja pembangunan daerah urusan pemerintahan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan di Kabupaten Serang memiliki beberapa sasaran, yakni peningkatan kualitas SDM aparatur, peningkatan jumlah ASN yang tidak melanggar disiplin, dan pencapaian pejabat struktural yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) di Kabupaten Serang.

Pada tahun 2020, terdapat beberapa indikator terkait fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan di Kabupaten Serang. Indeks kepuasan terhadap pelayanan kepegawaian mencapai angka 95,10 pada tahun tersebut. Adapun persentase ASN yang tidak terkena sanksi disiplin sedang berat mencapai 100 persen. Pada tahun yang sama, pejabat struktural yang memenuhi SKJ sebesar 94,01.

E. Fungsi penunjang keuangan

Urusan pemerintahan fungsi penunjang keuangan diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait dengan pelaksanaan kegiatan keuangan di pemerintahan daerah, seperti peningkatan pendapatan dan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Adapun pemerintah Kabupaten Serang secara konsisten menerbitkan dokumen pelaksanaan keuangan daerah, seperti peraturan daerah dan peraturan bupati mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara tertib. Kegiatan pelaksanaan keuangan daerah pun juga diterbitkan dokumen pertanggungjawabannya dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang akan diaudit oleh BPK.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan, pemerintah wajib menerbitkan dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya. Laporan tersebut akan diaudit oleh Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melihat kewajaran penggunaan anggaran di daerah. Selama empat tahun berturut-turut pada 2016-2019, Kabupaten Serang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD yang dilakukan oleh BPK dan pada tahun 2020 masih dalam progres. Artinya, tidak ditemukan ketidakwajaran penggunaan anggaran dalam laporan keuangan di Kabupaten Serang.

F. Fungsi penunjang pengawasan

Pada urusan pemerintahan fungsi penunjang pengawasan, pemerintah Kabupaten Serang telah melaksanakan akuntabilitas capaian kinerja dan keuangan pada tahun 2020. Fungsi pengawasan juga berfokus pada pelaksanaan monitoring tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan. Pemerintah Kabupaten Serang berhasil mempertahankan kapabilitas APIP pada level 3 hingga tahun 2020.

Selanjutnya, tingkat maturitas Standar Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Serang berada pada level 4,0 pada tahun 2020. Adapun tingkat kuantitas APIP di Kabupaten Serang pada tahun 2020 sebesar 85,48 persen. Tingkat temuan Inspektorat Kabupaten Serang yang ditindaklanjuti adalah sebesar 90,21 persen pada tahun 2020 dan tingkat temuan BPK RI yang ditindaklanjuti adalah sebesar 84,00 persen pada tahun yang sama.

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam meningkatkan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Kondisi daya saing daerah akan berpengaruh terhadap daya tarik investasi derah. Daya saing yang relatif rendah tentunya akan menyebabkan daya tarik investor yang akan

melakukan investasi di daerah menjadi relatif kecil begitu pula sebaliknya. Hal ini selanjutnya akan berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan pekerjaan di daerah, sehingga akan membawa pengaruh pula terhadap upaya pemerintah untuk menciptakan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Ada beberapa indikator yang dapat dipergunakan untuk mengukur daya saing daerah, yaitu (1) perekonomian daerah, (2) keterbukaan, (3) sistem keuangan, (4) infrastruktur dan sumber daya alam, (5) ilmu pengetahuan dan teknologi, (6) Sumber Daya Manusia, (7) Kelembagaan, (8) governance dan kebijakan pemerintah dan (9) manajemen dan ekonomi mikro.

Upaya untuk meningkatkan daya saing daerah di Kabupaten Serang menjadi tantangan yang cukup besar bagi Pemerintah Kabupaten Serang sehingga perlu dikaji dan diciptakan kebijakan-kebijakan, program dan kegiatan yang dapat meningkatkan/mengembangkan daya saing daerah yang bertujuan untuk meningkatkan potensi daerah dalam rangka untuk lebih menarik investor ke Kabupaten Serang.

Salah satu kebijakan dan strategi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Serang dalam rangka untuk menggali sumber-sumber pendanaan daerah yang bertujuan untuk lebih meningkatnya kesejahteraan masyarakat adalah menumbuhkan investasi di daerah. Upaya ini juga harus diarahkan pada bagaimana cara menciptakan daya saing daerah sehingga diharapkan suatu daerah mempunyai keunggulan dalam menarik minat investor dibandingkan dengan daerah lain.

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Perekonomian makro Kabupaten Serang selama ini dapat dikatakan tumbuh dengan cukup baik. Kondisi tersebut dapat terlihat dari tren peningkatan angka total PDRB baik berdasarkan komponen lapangan usaha maupun pengeluaran, total PDRB per Kapita, Konsumsi Rumah Tangga, proporsi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), serta proporsi konsumsi

pemerintah. Faktor lain yang menjadi acuan adalah nilai inflasi dan nilai tukar mata uang rupiah terhadap dollar amerika.

Kebijakan desentralisasi fiskal merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kebijakan ini pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pemerintah daerah terus mengupayakan peningkatan pendapatan daerah melalui berbagai upaya antara lain melalui peningkatan pajak daerah dan meningkatan perolehan dana perimbangan.

2.4.2 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Konsep negara berkesejahteraan (*welfare state*) merupakan sebuah konsep pembangunan yang menempatkan salah satu indicator keberhasilannya terletak pada sampai seberapa besar perolehan pendapatan masyarakat didapat dalam kurun waktu tertentu (misalkan 1 tahun). Peran pemerintah menjadi sangat penting untuk memfasilitasi warganya dalam memperoleh tingkat ekonomi yang baik, yang mampu menutupi berbagai kebutuhan dasarnya sebagai manusia, seperti : pendidikan, kesehatan, dan membuka peluang kesempatan kerja. Nicholas Barr:1992 dalam Pembangunan Inklusif LP3ES 2012 mengatakan bahwa ke tiga unsur tersebut tidak bisa diselesaikan oleh mekanisme pasar. *Pertama*, adanya *adverse selection*, yaitu yang membuat pihak swasta agak ragu untuk menekuni bidang yang beresiko tinggi, *Kedua,* akan terjadi *Moral Hazard* yakni resiko terjadinya penyelewengan oleh berbagai pihak yang sulit diantisipasi perusahaan swasta, *Ketiga,*terjadinya *independent risks*, yakni suatu resiko mengait dengan resiko lain sehingga sulit dimitigasi melalui mekanisme pasar. Singkat kata peran pemerintah dalam upaya mengatasi berbagai isu kebijakan social masih sangat dibutuhkan, mengingat secara alamiah kekuatan pasar memiliki sejumlah keterbatasan.

Dalam struktur ekonomi di masyarakat selalu saja memberikan kepada kita semua mengenai komposisi karakteristik jumlah penduduk, salah satunya adalah menyajikan komposisi jumlah penduduk kaya dan jumlah penduduk miskin. Penduduk miskin kemudian diartikan sebagai penduduk yang memiliki pendapatan (didekati dengan pengeluaran) lebih rendah dan yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Standar kebutuhan hidup layak tersebut diterjemahkan sebagai suatu jumlah rupiah yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi makanan setara 2.100 kalori sehari, ditambah sejumlah pengeluaran untuk bukan makanan seperti perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan dan lainnya. Jumlah uang tersebut kemudian dikatakan sebagai batas garis kemiskinan.

Disparitas yang terlalu dalam antara jumlah penduduk miskin dan penduduk dalam kategori tidak miskin dalam suatu wilayah, akan sangat mencerminkan masih adanya ketidakseimbangan dalam hal pemanfaatan hasil pembangunan yang dilakukan. Banyak kalangan kemudian menyebut kondisi ini sebagai sebuah "kegagalan pembangunan" atau pembangunan yang dilakukan kurang berorientasi pada penumbuhan kualitas manusia. Manfaat pembangunan haruslah dapat juga diartikan sebagai peningkatan kemampuan daya beli masyarakat, yang diawali tentunya oleh paradigma tentang peningkatan pendapatan masyarakat.

Kemudian kemampuan meningkatnya pendapatan, menjadi Indikator keberhasilan distribusi pendapatan yang dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran, dan dapat memberikan petunjuk mengenai aspek pemerataan yang telah tercapai. Pola konsumsi rumah tangga secara umum dapat dibagi menjadi dua indikator yakni proporsi pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan.

2.4.3 Fokus Fasilitasi Wilayah/Infrastruktur

Persaingan perekonomian global diproyeksikan semakin ketat. Kabupaten Serang sebagai wilayah penyangga Ibu Kota provinsi Banten dan Penyangga Kota jakarta membutuhkan infrastruktur guna menghadapi

persaingan global agar dapat memberikan pelayanan optimal kepada seluruh warga dalam mewujudkan Kabupaten Serang yang berdaya saing global.

Secara keseluruhan, infrastruktur jalan merupakan infrastruktur perekonomian yang sangat penting. Dengan ketersediaan infrastruktur jalan yang baik yang aman, nyaman, akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pergerakan barang dan manusia, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan daya saing daerah. Selain itu, untuk mewujudkan peningkatan daya saing daerah juga diperlukan penataan aspek pertanian dan industry sebagai aspek unggulan Kabupaten Serang.

Perekonomian daerah sangat tergantung dari jasa perbankan yang digunakan untuk transaksi ekonomi antar pelaku usaha. Perkembangan jumlah kantor bank di Kabupaten Serang masih memerlukan peningkatan mengingat kebutuhan masyarakat Kabupaten Serang terhadap perbankan untuk mendukung aktifitas perekonomian di Kabupaten Serang sudah cukup tinggi.

2.4.4 Fokus Iklim Berinvestasi

Fungsi Investasi di Kabupaten Serang sangat penting dalam menggerakan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Serang. Besarnya investasi dipengaruhi faktor ekonomi dan non ekonomi. Faktor ekonomi yang berpengaruh di Kabupaten Serang antara lain ketersediaan tenaga kerja baik kualitas maupun kuantitas, tingginya suku bunga, kondisi pasar, dan kondisi ekonomi makro daerah lainnya. Sedangkan faktor non ekonomi adalah kecepatan perijinan, kondisi keamanan, ketentaraman dan ketertiban, serta kepastian hukum dalam berusaha.

Selanjutnya selain jumlah angkatan kerja, faktor penentu investasi adalah kebijakan penentuan upah minimum provinsi (UMP) untuk pekerja. UMP di Kabupaten Serang terus ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan iklim investasi agar menjadi lebih kondusif.

Selain permasalahan perizinan dalam perbaikan iklim investasi, juga dipengaruhi oleh kondisi dan ketersediaan infrastruktur serta kondisi ketentraman. Selain itu permasalahan lainnya adalah belum tercukupinya pasokan energi, dan belum mantapnya sistem ketenagakerjaan. Dalam konteks ini infrastruktur yang perlu mendapat perhatian adalah jalan, pelabuhan, bandar udara dan sistem transportasi yang masih belum mendukung secara

maksimal bagi dunia usaha. Permasalahan lainnya adalah mensinergikan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mewujudkan perbaikan iklim investasi. Dengan kondisi tersebut, pertumbuhan penanaman modal atau investasi di Kabupaten Serang menunjukkan hasil yang positif, Hal ini menandakan, Kabupaten Serang tetap menarik bagi investor domestik dan mancanegara untuk menanamkan modalnya.

Kawasan Industri utama di Kabupaten Serang berada di Kecamatan Kibin dan Kecamatan Cikande. Pergerakan industri manufaktur diperkirakan akan mengalami peningkatan sejalan dengan akan dibukanya pintu tol baru di Kecamatan Kibin. Kawasan industri yang berada di Kabupaten Serang adalah Kawasan Pancatama, Langgeng Sahabat dan Modern Cikande Estate. Kawasan industri modern real estate yang berada di Kecamatan Kibin dan Cikande adalah kawasan yang paling diminati para investor.

2.4.5 Fokus Sumber Daya Manusia

Isu pembangunan dibidang ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting dalam upaya memenuhi perekonomian rumah tangga dan kesejahteraan masyarakat. Tolok ukur keberhasilan pembangunan adalah bagaimana tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat menjadi meningkat dari waktu ke waktunya. Peningkatan pendapatan dan daya beli sangat berkorelasi positif dengan bagaimana pola dan tipikal pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakatnya. Intinya pekerjaan tetap menjadi hal yang utama dalam peningkatan daya beli dan pendapatan masyarakat ini.

Dalam konteks kondisi eksisting terutama dibidang ruang llingkup pekerjaan yang ada di masyarakat terbagi menjadi 2 bagian, yaitu sector pekerjaan formal dan sector pekerjaan non formal. Membedakan keduanya rata-rata orang melihatnya dari beberapa aspek seperti : kepemilikan modalnya; ruang lingkup jenis pekerjaannya; lokasi usahanya dan juga dari aspek legalitas badan usahnya. Dua kelompok ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama menampung para tenaga kerja, sehingga dikaitkan dengan persoalan pendapatan individu kedua kelompok ruang lingkup pekerjaan ini

tetap haruslah di perhatikan, jika mungkin malah seharusnya disinergikan antara kelompok lapangan pekerjaan formal dan kelompoklapangan kerja non formal. Sehingga keduanya tetap dapat menyerap angkatan kerja yang lebih optimal lagi kedepannya.

Memperhatikan kondisi ketenagakerjaan dalam sebuah wilayah dapat diketahui dengan cara melakukan analisis terhadap angka-angka untuk beberapa indicator dan karakteristik ketenagakerjaan di wilayah tersebut. Karakteristik tersebut berupa indikator ketenagakerjaan antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Tiga Indikator ketenagakerjaan di atas (TPAK, TPT dan TKK) merupakan gambaran kegiatan penduduk yang termasuk Penduduk Usia Kerja (PUK) dalam hal keterlibatannya pada kegiatan bekerja. Dimana Penduduk Usia Kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas hal ini sesuai dengan undang-undang Ketenagakerjaan. Berdasarkan kegiatannya dalam kaitan ketenagakerjaan, penduduk usia kerja ini dikelompokan menjadi Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja.

Kegiatan dari penduduk usia kerja yang masuk dalam kelompok angkatan kerja adalah bekerja dan mencari pekerjaan. Kelompok angkatan kerja ini merupakan kelompok penduduk yang perlu diperhatikan perkembangannya untuk melihat kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah. Sedangkan kegiatan dari kelompok bukan angkatan kerja adalah anak sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya. Kelompok ini merupakan penduduk usia kerja akan tetapi tidak terlibat dalam hal ketenagakerjaan. Hal ini dikarenakan untuk karakteristik penduduk di Indoensia, masih terdapat penduduk yang seharusnya usia sekolah akan tetapi banyak juga yang sudah harus bekerja dikarenakan alasan ekonomi, sedangkan kebijakan pemerintah pusat mengenai wajib belajar 12 tahun melalui Program Pendidikan Menengah Universal (PMU) guna menyiapkan generasi emas pada Tahun 2045 masih belum optimal dilakukan oleh pemerintah diberbagai tingkatan, khususnya di Kota/Kabupaten

akan tetapi momentum ini harus terus digenjot untuk dapat meningkatkan angka partisipasi anak-anak usia sekolah. Sehingga capaian akhirnya adalah mendapatkan angkatan kerja terdidik yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja khususnya di Kabupaten Serang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Ketersediaan Lapangan Pekerjaan masih merupakan isu pembangunan yang harus dikembangkan lagi untuk menyerap angkatan kerja yang ada, akan tetapi juga dapat dikemukakan asumsi bahwa ada sebagian masyarakat yang enggan untuk masuk dalam dunia kerja, mereka masih ingin berkutat pada keinginannya untuk melanjutkan pendidikan, atau mungkin saja sebagian dari mereka adalah melakukan wirausaha secara non formal.

Tingkat Pengangguran Terbuka

Angka lain yang dapat dianalisis dari dunia ketenagakerjaan adalah mengenai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) hasil data diperoleh terjadi peningkatan dari 10.65% pada Tahun 2019 menjadi 12,22% Tahun 2020. Angka ini masih memberikan gambaran bahwa masalah pengangguran merupakan masalah yang cukup penting untuk segera ditangani, karena pengangguran tidak hanya terkait dengan masalah ekonomi tapi juga dengan masalah sosial lainnya. Tidak ada solusi lain bagi pemerintah dalam menangani masalah pengangguran ini adalah dengan melakukan upaya seperti : *pertama*, membuka lapangan pekerjaan baru baik disektor pertanian (agribisnis). *Kedua*, membuka kesempatan bagi para investor untuk dapat menanamkan modalnya tentunya dengan memberikan kemudahan dalam implementasinya, mudahnya perizinan dan keamanan yang terjamin serta infrastruktur yang baik menjadi modal utama dalam menarik para investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Serang. *Ketiga*, Komitmen untuk mendorong terciptanya UKM sampai ke pelosok-pelosok desa, bantuan permodalan, pembimbingan dalam

berusaha dan bantuan chanelling pemasran juga merupakan langkah yang harus diambil untuk mengembangkan UKM ini.

Kontribusi Sektor dalam Penyerapan Tenaga Kerja

Jika dilakukan tinjauan terhadap pergerakan sektor-sektor ekonomi didalam suatu wilayah maka akan didapatkan sektor-sektor yang dapat memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah. Melalui perhitungan PDRB (produk domestic regional bruto). Namun, sumbangan sektor terhadap PDRB ini hanya melihat dari sisi nilai tambah yang didapat dari kegiatan ekonomi, sedangkan sumbangan suatu sektor terhadap penyerapan tenaga kerja belum bisa terlihat dari angka ini. Oleh sebab itu kedua sumbangan sektor diatas yaitu dari sisi nilai tambah dan tenaga kerja perlu disandingkan untuk keperluan analisis.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Kebijakan ekonomi daerah dirumuskan untuk menggambarkan hubungan yang jelas antara tujuan utama pembangunan daerah dengan capaian indikator makro ekonomi daerah dan bagaimana antarkomponen itu saling mempengaruhi. Kebijakan ekonomi daerah disatu sisi harus mampu menempatkan indikator makro ekonomi daerah sebagai tujuan yang harus dijaga asumsi-asumsinya dan di sisi lain memberikan panduan umum bagaimana tujuan ekonomi daerah harus dicapai sebagai salah satu capaian utama pembangunan daerah.

Perumusan arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Serang tentunya tidak terlepas dari arah kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Banten. Berikut ini diuraikan arah kebijakan ekonomi Tahun 2022 pada tingkat nasional dan Provinsi Banten.

1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2022

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2022: "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural", pembangunan nasional diarahkan pada 10 (sepuluh) fokus pembangunan yang meliputi:

1. Industri
2. Pariwisata
3. Ketahanan Pangan
4. UMKM
5. Infrastruktur
6. Transformasi Digital
7. Pembangunan Rendah Karbon
8. Reformasi Perlindungan Sosial
9. Reformasi Pendidikan dan Keterampilan
10. Reformasi Kesehatan

Secara rinci 10 (sepuluh) fokus pembangunan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. *Fokus pembangunan industri dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah sektor industri*, yang ditandai dengan pencapaian :
   a. Pertumbuhan Industri pengolahan Non Migas 5,8-6,5%
   b. Kontribusi PDB Industri Pengolahan Non Migas 17,97-17,99%
   c. Nilai realisasi PMA dan PMDN Industri Pengolahan Rp 352,5 T
2. *Fokus pembangunan pariwisata dilakukan untuk pempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata*, yang ditandai dengan pencapaian :

a. Jumlah Wisatawan Mancanegara 8,5-10,5 juta kunjungan

b. Peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index 36-39

3. *Fokus pembangunan ketahanan pangan dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat*, yang ditandai dengan pencapaian :

a. Skor Pola Pangan Harapan 92,8

b. Nilai Tukar Petani 102-104

c. Nilai Tukar Nelayan 102-105

d. Ketersediaan Beras 44 juta ton

e. Ketersediaan Protein Hewani 2,7 juta ton

f. Nilai Tambah Tenaga Kerja Pertanian Rp. 54,3 juta/org/thn

4. *Fokus pembangunan UMKM dilakukan untuk meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional*, yang ditandai dengan pencapaian :

a. Pertumbuhan Wirausaha 3%

b. Kontribusi UMKM terhadap PDB 63%

c. UMKM yang Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal 20,9%

5. *Fokus pembangunan infrastruktur dilakukan untuk meningkatkan pemerataan infrastruktur*, yang ditandai dengan pencapaian :

a) Pembangunan 4.600 unit Rumah Susun, Bantuan Perumahan Swadaya 118.650 unit, dan Penyaluran FLPP sebanyak 200.000 unit.

b) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: 10 lokasi

c) Panjang Jalan Tol Baru: 400 km

d) Penambahan Debit Air Baku 5 m3/s

e) Pembangunan Akses Air Minum Perpipaan 2.000.000 SR

f) Pembangunan Akses Sanitasi Aman (sistem terpusat dan sistem setempat) 2.000.000 SR

g) Rehabilitasi Jaringan Irigasi 250 ribu Ha

h) Konsumsi listrik per kapita 1.268 kWh

6. *Fokus transformasi digital dilakukan untuk Meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital*, yang ditandai dengan pencapaian :

a) Masyarakat pengguna internet 79,20%

b) Kecamatan yang terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik kumulatif 42,85%
c) 72.500 SDM talenta digital
d) 12,4 juta local champion literasi digital
e) Organisasi Tim Cepat Tanggap (CSIRT) yang Diregistrasi
f) 100 Lulusan Pengembangan SDM di Bidang Keamanan Siber

7. *Fokus pembangunan rendah karbon dilakukan untuk meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK*), yang ditandai dengan pencapaian :
   a) Penurunan Emisi GRK Nasional terhadap Baseline 26,87%
   b) Penurunan Intensitas Emisi GRK Nasional terhadap Baseline 21,54%
   c) Porsi Bauran EBT dalam Energi Nasional 15,7%
   d) Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT kumulatif 13,9 GW
8. *Fokus reformasi perlindungan sosial dilakukan untuk mempercepat reformasi perlindungan sosial*, yang ditandai dengan pencapaian :
   a) Tingkat Kemiskinan 8,5-9%
   b) Penduduk yang tercakup dalam Program Jaminan Sosial 87%
   c) Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Bantuan Sosial 60%
   d) Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional dari 40% penduduk berpendapatan terbawah 110.7 Juta Penduduk
9. *Fokus reformasi pendidikan dan keterampilan dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM dan Inovasi*, yang ditandai dengan pencapaian :
   a) Pekerja pada Bidang Keahlian Menengah dan Tinggi 41,55%
   b) Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMA Sederajat 70,6%
   c) Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi 35,62%
   d) 400 Produk Inovasi dari Perusahaan Pemula Berbasias Teknologi (PPBT)
   e) 900 Paten Domestik

10. *Fokus reformasi kesehatan dilakukan dalam rangka penanganan Covid-19 dengan meneruskan Vaksinasi Covid-19, serta untuk memperkuat Sistem Kesehatan Nasional*, yang ditandai dengan pencapaian :
    a) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita 18,4%
    b) Insidensi TB 231/100.000 Penduduk
    c) Persalinan di fasilitas kesehatan 91%
    d) Imunisasi dasar lengkap anak usia 12-23 bulan 71%
    e) Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 59%
    f) RSUD kab/kota dengan 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya 80%
    g) Fasilitas Kesehatan terakreditasi: FKTP 80% & RS 90%
    h) Sistem surveilans: terpadu, real-time, berbasis lab

    Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai tahun 2022, antara lain:
    1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4 – 6,0 %
    2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6.24 - 5.52 %
    3. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378
    4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,44 – 73,48
    5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26,8 – 27,1 %
    6. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 102-104 7. Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 102-105
    8. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %

2. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Banten Tahun 2022

Dalam Rancangan Awal RKPD Provinsi Banten Tahun 2022, terkait dengan arahan tentang kebijakan ekonomi diuraikan bahwa terdapat 5 (lima) misi yang terdapat pada RPJMD Provinsi Banten 2017- 2022 sebagai berikut :

1. **Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik *(Good Governance)***
2. **Membangun dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur**

3. **Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pendidikan Berkualitas**
4. **Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan Berkualitas**
5. **Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi**

Dari 5 (lima) misi diatas maka ditetapkanlah Rancangan tema RKPD 2022 Provinsi Banten yaitu **"PEMANTAPAN DAYA SAING EKONOMI DAN SUMBER DAYA MANUSIA".** Sehingga prioritas pembangunan daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pemerataan Pembangunan
4. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif.

Maka Fokus Pembangunan Provinsi Banten yang tertuang dalam Rancangan RKPD Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1) Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan

- ✓ Penguatan kelembagaan dan tatalaksana
- ✓ Peningkatan kualitas pelayanan publik
- ✓ Penataan dan peningkatan kapasitas SDM Aparatur
- ✓ Tata kelola keuangan dan aset
- ✓ Penguatan penerapan SAKIP
- ✓ Peningkatan riset dan inovasi daerah
- ✓ Peningkatan Kolaborasi antar Level Pemerintahan

2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

- ✓ Pemenuhan layanan dasar dan perlindungan sosial
- ✓ Pengendalian penduduk dan peningkatan tata kelola kependudukan
- ✓ Pengentasan kemiskinan
- ✓ Perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan pemuda
- ✓ Pembudayaan olahraga
- ✓ Peningkatan literasi, inovasi dan kreativitas masyarakat

- ✓ Pelestarian kebudayaan daerah

3) Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pemerataan Pembangunan

- ✓ Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar
- ✓ Pembangunan infrastruktur ekonomi
- ✓ Pengembangan kawasan
- ✓ Peningkatan daya dukung lingkungan dan ketahanan bencana
- ✓ Peningkatan kolaborasi antar stakeholder pembangunan

4) Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

- ✓ Pengendalian inflasi daerah
- ✓ Pengembangan sektor unggulan
- ✓ Revitalisasi Industri dan Perdagangan
- ✓ Peningkatan investasi
- ✓ Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif
- ✓ Pengembangan pariwisata
- ✓ Peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja
- ✓ Adopsi dan Inovasi IPTEK

3. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Serang Tahun 2022

Isu strategis Kabupaten Serang tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1) **Peningkatan Mutu Pendidikan Masyarakat**
   - Pandemi covid-19 membutuhkan inovasi dan penyesuaian metode pendidikan dan penyediaan sarpras pendukungnya;
   - Sarana prasarana pendidikan yang belum memadai baik dari kuantitas, kualitas maupun pemerataan ketersediaannya;
   - Sumber daya manusia pendidik yang belum memadai dari segi kuantitas, kualitas maupun pemertaan ketersebarannya;
   - Kurangnya peranserta dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan;
   - Masih rendahnya minat baca masyarakat;
   - Sarana prasarana perpustakaan daerah kurang memadai dengan layanan masih bersifat manual dan belum menggunakan teknologi informasi.

2) **Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat**
   - Pandemi covid-19 dan berbagai penyakit menular serta tidak menular yang belum optimal dalam penanganannya;
   - Sarana prasarana fasilitas kesehatan yang belum memadai baik dari kuantitas, kualitas dan pemerataan ketersediaannya;
   - Sdm kesehatan yang belum terpenuhi dari segi kuantitas, kompetensi maupun pemertaan ketersebarannya;
   - Kurangnya kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih sehat;
   - Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan upaya kesehatan berbasis masyarakat masih belum optimal;
   - Masih tingginya aki akb;
   - Tingginya prevalensi stunting;
   - Masih tingginya jumlah masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan;
   - Kualitas kesehatan lingkungan yang masih rendah;
   - Pelayanan KB yang belum optimal.

3) **Percepatan Penanggulangan Kemisikinan, Pengangguran Dan Pemulihan Perekonomian Pasca Covid -19**
   - Pandemi covid-19 yg berdampak pada penurunan daya beli masyarakat & peningkatan pengangguran karena kehilangan mata pencaharian / PHK;
   - Penanganan masalah kesejahteraan sosial yang belum optimal;
   - Belum adanya konsep pengembangan industri berbasis kawasan dan potensi unggulan daerah;
   - Lemahanya akses permodalan untuk indutri kecil dan mikro
   - Potensi sumber daya lokal belum diolah secara maksimal, padahal bahan baku yang tersedia cukup memadai;
   - Kualitas sdm yang bergerak di industri kecil belum optimal sehingga masih lemah dalam penerapan teknologi pengolahan;

- Belum optimalnya pengembangan, promosi dan pemasaran pariwisata di kabupaten serang;
- Belum optimalnya pemberdayaan koperasi dan umkm di kabupaten serang;
- Kualitas produk umkm di kabupaten serang belum memenuhi standar nasional karena rendahnya penerapan teknologi dan inovasi produk;
- Daya saing tenaga kerja yang masih rendah;
- Daya saing investasi yang masih rendah;
- Produktivitas pertanian dan perikanan yang belum optimal.

4) **Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan**

- Kualitas perencaanaan pembangunan daerah belum optimal
- Penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah belum optimal;
- Sistem pengawasan kinerja pembangunan belum akuntabel berjalan secara optimal, karena lemahnya pendampingan dan asistensi terhadap perangkat daerah;
- Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil belum optimal (ktp, kia, kartu kematian, dsb);
- Tingkat pemahaman masyarakat rendah akan pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
- Pembangunan desa belum berlangsung optimal, karenaperencanaan tidak berbasis potensi desa hanya berfokus pada serapan anggarang saja, orientasi pembangunandesa berfokus pada infrastruktur, belum optimalnya pendamping pengelola keuangan desa;
- Sumber daya aparatur sipil negara yang belum memadai dari segi kuantitas kualitas maupun pemerataan ketersebarannya;
- Belum optimalnya kapasitas aparatur daerah dalam penanggulangan bencana;
- Pengelolaan arsip daerah yang belum terpadu dan menggunakan kaidah baku kearsipan;

5) **Pengembangan Infratruktur Pelayanan Dasar**
   - Sarana prasarana air bersih yang belum memadai
   - Sarana prasarana sanitasi yang belum memadai
   - Sarana prasarana pendidikan yang belum memadai
   - Sarana prasarana fasilitas pelayaan kesehatan yang belum memadai
   - Belum terbangunya pusat pemerintahan kabupaten
   - Masih adanya jalan, irigasi, spam, pengelolaan air limbah yang bermanfaat besar bagi masyarakat dalam kondisi kurang baik
   - Belum memadainya fasos fasum di tingkat kecamatan

6) **Peningkatan Kualitas Penataan Ruang, Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Penanggulangan Bencana**
   - Penyediaan sarana prasarana dan utilitas umum masih belum memadai.
   - Kerjasama yang dilakukan dengan pihak swasta untuk perbaikan lingkungan permukiman belum berjalan dengan baik.
   - Fasilitasi penyediaan perbaikan rumah tidak layak huni masih terbatas.
   - Fasilitasi penanganan persampahan rumah tangga masih terbatas pada daerah tertentu.
   - Fasilitas persampahan daerah dalam kondisi yang full kapasitas dan membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana pendukung.
   - Kondisi ruang terbuka hijau yang dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat sebagian besar dalam kondisi tidak memadai.
   - Pengawasan pencemaran lingkungan hidup belum menyeluruh dan penegakan hukumnya cenderung berjalan lambat.

- Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam menghadapi berbagai ancaman bencana alam dan bencana sosial.

7) **Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**
   - Masih adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
   - Belum optimalnya pemahaman tentang pengarusutamaan hak anak
   - Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Rancangan Tema RKPD 2022 adalah: "**PEMANTAPAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMULIHAN PEREKONOMIAN KABUPATEN SERANG PASCA PANDEMI COVID-19 YANG DIDUKUNG OLEH PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA YANG MEMADAI".** Dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas SDM yang Sehat, Cerdas, Berakhlaq
2. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan
3. Peningkatan Kondisi Sarana Prasarana dan Pemerataan Pembanguan
4. Pemulihan Perekonomian Daerah

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020 & Perkiraan Tahun 2021

Kondisi perekonomian daerah secara umum dapat digambarkan melalui beberapa indikator makro ekonomi. Adapun indikator makro ekonomi yang dapat menggambarkan kondisi perekonomian daerah Kabupaten Serang adalah sebagai berikut :

1. Laju Perumbuhan Ekonomi (LPE)
2. Nilai PDRB ADH Berlaku
3. Nilai PDRB ADH Konstan
4. Nilai PDRB Per Kapita
5. Inflasi
6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

7. Tingkat Kemiskinan

Berikut ini diuraikan perkembangan indikator makro ekonomi Kabupaten Serang Tahun 2020-2021 dan perkiraan Tahun 2022.

Tabel 3.1
Target Indikator Makro Kabupaten Serang 2020-2021

NO.	INDIKATOR	SATUAN INDIKATOR	2020	2021	2022	KET
			REALISASI	TARGET		
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	-1,96	3.41	2.97	
2	Nilai PDRB ADHK	Rp.Triliun	53,286			
3	Nilai PDRB ADHB	Rp.Triliun	76,601			
4	Nilai PDRB ADHB per Kapita	Rp.Juta per Jiwa	47,22			
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	12,22	12,00	11,89	
6	Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Jiwa	74,80			
7	Persentase Penduduk Miskin (Persentase Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Total Jumlah Penduduk)	%	4,94	4,50	4,22	

Sumber:
- Hasil Analisis penghitungan elastisitas tahun 2020-2022
- *angka prediksi (Penyusunan PDRB 2020)

3.1.2. Tantangan dan Prospek Ekonomi Daerah Tahun 2022

Berdasarkan berbagai perkembangan ekonomi daerah dalam kurun waktu Tahun 2020-2021 serta permasalahan yang diperkirakan masih akan dihadapi pada Tahun 2022, maka tantangan dan prospek ekonomi yang dihadapi oleh Kabupaten Serang pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. **Penguatan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**
   - Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
   - Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;

- Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi;
- Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sector riil, dan industrialisasi;
- Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

2. Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

- Pengendalian pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan;
- Percepatan cakupan administrasi kependudukan, yang mencakup: perluasan jangkauan layanan pendaftaran penduduk pencatatan sipil bagi seluruh penduduk Kabupaten Serang, peningkatan kesadaran dan keaktifan masyarakat dalam mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, serta percepatan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi kelompok khusus;
- Integrasi sistem administrasi kependudukan;
- Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk dengan cara penguatan sinergitas kebijakan pengendalian penduduk dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang, penguatan kapabilitas kelembagaan kabupaten dalam bidang pengendalian penduduk; dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan serta sinergitas pendataan keluarga;
- Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial seperti penguatan pelaksanaan jaminan sosial dalam pengembangan program SJSN yang komprehensif dan terintegrasi, termasuk pengembangan jaminan pekerjaan, keberlanjutan pendanaan dan penguatan tata Kelola SJSn, peningkatan efektivitas JKN didukung pemerataan penyediaan pelayanan Kesehatan, serta penguatan kelembagaan

SJSN termasuk perbaikan tata Kelola hubungan antarlembaga dan harmonisasi peraturan perundangan yang terkait;

- Penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan social dan subsidi yang terintegrasi dan tepat sasaran;
- Perlindungan sosial adaptif dengan cara pengembangan perlindungan social yang terintegrasi dengan risiko ekonomi dan social terhadap perubahan iklim dan bencana alam, penguatan system kelembagaan perlindungan social yang responsive;
- Peningkatan kesejahteraan social dengan penguatan implementasi standar pelayanan minimal bidang social untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk, pembangunan masyarakat, lingkungan, dan sarana prasarana ramah anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas;
- Penguatan pelaksanaan pendampingan dan layanan terpadu seperti penataan manajemen pengelolaan sumber daya manusia terutama aspek kesejahteraan social, peningkatan peran dan kapasitas pendamping masyarakat, juga mengenai peningkatan pengetahuan, pemahaman mengenai Pendidikan anak, Kesehatan gizi serta pengelolaan keuangan bagi keluarga;
- Peningkatan pelayanan terpadu Kesehatan melalui peningkatan Kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan.kesehatan reporduksi, percepatan perbaikan gizi masyarakat, dan peningkatan pengendalian penyakit;
- Penguatan system Kesehatan dan pengawasan obat dan makanan melalui penguatan pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan, pemenuhan dna peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan, serta pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat Kesehatan;
- Meningkatkan pemerataan layanan pendiidkan berkualitas melalui peningkatan pemerataan akses layanan Pendidikan di selama

jenjang dan percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata, peningkatan tata Kelola pembangunan pendiidkan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran Pendidikan;

- Pengentasan kemiskinan melalui akselarasi penguatan ekonomi keluarga, serta keperantaraan usaha dan dampak social.

3. **Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar**
    - Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau;
    - Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman;
    - Infrastruktur ketahanan bencana, meliputi pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur Tangguh bencana di Kawasan prioritas rawan bencana, penilaian dan peningkatan keamanan infrastruktur vital terhadap bencana, penetapan standar bangunan Tangguh bencana, serta pengembangan infrastruktur hijau.

4. **Pembangunan Lingkungan Hidup, untuk Peningkatan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**
    - Peningkatan kualitas lingkungan hidup meliputi pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
    - Peningkatan ketahanan bencana dan iklim seperti pennaggulangan bencana (data, informasi, dan literasi bencana, system, regulasi, dan tata Kelola, peningkatan sarana prasarana mitigasi, integrasi kerja sama antar daerah terkait kebijakan dan penataan ruang

berbasis risiko bencana dan implementasi penanggulangan bencana, penguatan penanggulangan darurat bencana) dan peningkatan ketahanan iklim;

- Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

Berpijak pada tantangan dan prospek ekonomi daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 maka target indikator makro daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Target Indikator Makro Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022

TARGET INDIKATOR SASARAN MAKRO DAERAH	TAHUN 2022
Laju Pertumbuhan Ekonomi	2,97
Laju Inflasi	1,59
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,29
Persentase tingkat Kemiskinan	4,22
Tingkat Pengangguran Terbuka	11,89

Sumber : Rancangan awal RPJMD 2021-2026

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pemahaman yang baik terhadap hasil analisis kondisi ekonomi daerah, selanjutnya digunakan sebagai salah satu input utama untuk membuat analisis keuangan daerah. Penentuan kemampuan keuangan daerah sangat terkait dengan kemampuan daerah untuk memperkirakan jumlah penerimaan yang akan diterima sehingga kemampuan pendanaan pembangunan daerah pada Tahun 2022 bisa diketahui.

Proyeksi keuangan daerah diharapkan mampu melihat gambaran kapasitas keuangan daerah dalam struktur/kerangka pendanaan pembangunan daerah di tahun-tahun mendatang. Penghitungan kapasitas keuangan daerah dan kerangka pendanaan pada dasarnya dilakukan dengan menganalisis sejauh mana kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan

analisis kerangka pendanaan yang telah dibuat. Untuk itu, dalam perhitungan kapasitas keuangan daerah perlu dilakukan evaluasi hasil perhitungan kapasitas keuangan daerah RKPD Tahun 2021 terhadap proyeksi tahun 2022.

Proyeksi Pendapatan Kabupaten Serang merupakan langkah awal yang harus ditempuh dalam pengelolaan penganggaran keuangan daerah terutama berkaitan dengan perencanaan pembangunan. Adapun target Tahun 2021 serta proyeksi Tahun 2022 pendapatan daerah Kabupaten Serang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Target dan Proyeksi Pendapatan

Kode	Uraian	APBD 2021	RKPD 2022
4	**PENDAPATAN DAERAH**		
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**792,290,009,917**	**748,958,658,079**
4.1.01	Pajak Daerah	442,635,000,000	442,635,000,000
4.1.02	Retribusi Daerah	38,380,148,000	38,380,148,000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20,076,527,000	20,076,527,000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	291,198,334,917	247,866,983,079
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2,063,007,380,483**	**1,855,004,794,000**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,827,965,409,000	1,640,004,794,000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	235,041,971,483	215,000,000,000
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**45,932,791,948**	**12,694,554,000**
4.3.01	Pendapatan Hibah	45,932,791,948	12,694,554,000
	Jumlah Pendapatan	**2,901,230,182,348**	**2,616,658,006,079**
5	**BELANJA**		
5.1	**BELANJA OPERASI**	**2,176,830,414,450**	**2,288,073,725,318**
5.2	**BELANJA MODAL**	**427,003,550,611**	**0**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**5,000,000,000**	**5,000,000,000**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5,000,000,000	5,000,000,000
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**449,451,522,600**	**422,949,095,000**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	25,643,020,000	24,050,757,400
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	423,808,502,600	398,898,337,600
	Jumlah Belanja	**3,058,285,487,661**	**2,716,022,820,318**
	Total Surplus/(Defisit)	**(157,055,305,313)**	**(99,364,814,239)**
6	**PEMBIAYAAN**		
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**160,055,305,313**	**121,364,814,239**

Kode	Uraian	APBD 2021	RKPD 2022
6.1.01	SiLPA Tahun Sebelumnya	160,055,305,313	121,364,814,239
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**160,055,305,313**	**121,364,814,239**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**3,000,000,000**	**22,000,000,000**
6.2.02	**Penyertaan Modal Daerah**	**3,000,000,000**	**22,000,000,000**
	PDAM		8,000,000,000
	BJB		14,000,000,000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**3,000,000,000**	**22,000,000,000**
	Pembiayaan Netto	**157,055,305,313**	**99,364,814,239**
6.3	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan**	0	0

Sumber

- Tahun 2021 : Perda APBD Kabupaten Tahun 2021
- Tahun 2022 = Proyeksi Pendapatan Hasil Musrenbang Tahun 2022

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan efektif dan efisien maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah,dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

Kebijakan keuangan daerah merupakan suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian daerah untuk menjadi lebih baik dengan cara mengubah komposisi pemasukan dan pengeluaran pemerintah daerah. Instrumen kebijakan keuangan daerah adalah pemasukan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak daerah karena jika pemerintah daerah mengubah tarif pajak daerah yang berlaku, maka hal ini akan berpengaruh/berdampak pada perekonomian daerah. Sebagai contoh, jika tarif pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah

output, sebaliknya kenaikan tarif pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.

Kebijakan keuangan daerah lebih menekankan pada upaya pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah daerah, termasuk juga pembiayaan daerah. Kebijakan ini lebih terkait dengan kebijakan anggaran pemerintah daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan arah kebijakan ekonomi makro daerah serta memperhatikan berbagai asumsi yang mendasari perhitungan perkiraan indikator ekonomi makro dan kapasitas keuangan daerah, maka kebijakan keuangan daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 diarahkan untuk medanai belanja wajib mendasar (Gaji dan tunjangan pegawai), Belanja Prioritas pembangunan, Belanja Non Urusan disetiap Perangkat daerah, dan Belanja Kebutuhan Masyarakat (hasil Musrenbang & Reses DPRD) Kebijakan ini merupakan kebijakan yang mengakibatkan Defisit dalam Anggaran yang selanjutnya menjadi acuan dalam Penyusunan

Dalam mendukung arah kebijakan keuangan daerah Tahun 2022 sebagaimana yang telah ditentukan tersebut perlu dibuat kebijakan turunannya, yaitu arah kebijakan yang terkait pendapatan daerah Tahun 2022, arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah Tahun 2022, serta arah kebijakan yang terkait dengan pembiayaan daerah Tahun 2022.

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang merupakan unsur penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah untuk pembangunan diupayakan untuk dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan daerah.

Disamping itu, hal yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan penerimaan pendapatan daerah khususnya dari pos pajak dan retribusi daerah, yaitu efeknya terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Dimana upaya tersebut hendaknya sedapat mungkin tidak membebani masyarakat, sehingga potensi munculnya efek distorsi ekonomi yang kontra produktif dan akan sangat merugikan dapat hindari.

Peningkatan pendapatan daerah dilakukan dengan cara optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang sah dan sesuai dengan aturan perundang-undangan, selain itu juga harus digali potensi-potensi pendapatan yang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah.

Arah kebijakan pendapatan daerah merupakan arah yang mengatur tentang kebijakan dalam pendapatan yang merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih daerah serta merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sedangkan kebijakan pendapatan daerah sebagaimana telah diatur dalam Permendagri No.90 tahun 2020 meliputi kebijakan dalam penerimaan uang melalui kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah, serta dirinci menurut organisasi OPD, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan. Pendapatan daerah terdiri dari komponen/pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah merupakan arah yang mengatur kebijakan tentang kewajiban-kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Kebijakan ini digunakan dalam rangka mengatur pendanaan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Arah kebijakan belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan ke dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, lingkungan yang bersih dan nyaman, serta pengembangan sistem jaminan sosial. Arah kebijakan ini terdiri dari arah kebijakan belanja Operasi merupakan arah kebijakan belanja yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan serta dapat diukur berdasarkan indikator dan tolok ukur capaian kinerja yang telah ditetapkan, diantaranya:

- belanja Operasi yang terdiri dari Belanja pegawai (Gaji dan Tunjangan KDH & WKD, Anggota DPRD dan ASN/PPPK serta Honorarium, BPJS Ketenagakerjaan), belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan Sosial.
- belanja modal yang terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya
- Belanja Tidak terduga (BTT), dan
- Belanja Transfer yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan

Penggunaan belanja daerah diharapkan dapat lebih diarahkan dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan. Beberapa sektor tersebut diantaranya adalah sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor jasa dan juga sektor bangunan.

Disamping itu, penggunaan belanja juga harus sedapat mungkin ditujukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kebutuhan dasar masyarakat (seperti: pendidikan, kesehatan, perumahan), menanggulangi masalah-masalah sosial (seperti : kemiskinan dan pengangguran), serta meningkatkan ketersediaan dan daya dukung infrastruktur dan sarana prasarana dalam rangka mendukung pergerakan roda perekonomian daerah dan masyarakat.

Arah kebijakan belanja daerah merupakan arah yang mengatur kebijakan tentang kewajiban-kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Kebijakan ini digunakan dalam rangka mengatur pendanaan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Disamping itu, penggunaan belanja juga harus sedapat mungkin ditujukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kebutuhan dasar masyarakat (seperti: pendidikan, kesehatan, perumahan), menanggulangi masalah-masalah sosial (seperti : kemiskinan dan pengangguran), serta meningkatkan ketersediaan dan daya dukung infrastruktur dan sarana prasarana dalam rangka mendukung pergerakan roda perekonomian daerah dan masyarakat.

Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Serang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, Organisasi Perangkat Daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Adapun **Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 & 2022** adalah sebagai berikut :

Kode	Uraian	APBD 2021	PROYEKSI 2022
5	**BELANJA**		
5.1	**BELANJA OPERASI**	**2,176,830,414,450**	**2,477,100,326,318**
5.2	**BELANJA MODAL**	**427,003,550,611**	
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**5,000,000,000**	**5,000,000,000**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5,000,000,000	5,000,000,000
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**449,451,522,600**	**422,949,095,000**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	25,643,020,000	24,050,757,400
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	423,808,502,600	398,898,337,600
	Jumlah Belanja	**3,058,285,487,661**	**2,905,049,421,318**
	Total Surplus/(Defisit)	**(157,055,305,313)**	**(288,391,415,239)**

Sumber:

- Tahun 2021 = Perda APBD kabupaten Serang tahun 2021
- Tahun 2022 = Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serang, Proyeksi 2022

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan pembiayaan daerah merupakan arah tentang kebijakan yang mengatur semua penerimaan daerah yang perlu dibayar kembali dan/atau semua pengeluaran daerah yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran yang berikutnya. Selain itu, arah kebijakan ini juga mengatur transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran daerah yang disebabkan oleh lebih kecilnya pendapatan yang diperoleh dibandingkan dengan belanja daerah yang harus dipenuhi akibat kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat.

Arah kebijakan pembiayaan dalam APBD berpedoman pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Bab Keuangan Daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, diantaranya apabila APBD diperkirakan surplus maka penggunaannya dapat diarahkan untuk pengeluaran pembiayaan yang mencakup: pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo; penyertaan modal (investasi daerah); dan transfer ke rekening dana cadangan. Namun apabila APBD diperkirakan defisit, penggunaannya dapat didanai dari penerimaan pembiayaan yang terdiri dari: sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu; transfer dari dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan pinjaman daerah.

Dalam perhitungan anggaran, dimungkinkan akan terjadi surplus atau defisit anggaran. Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Sedangkan Defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah.

Adapun **Proyeksi Kerangka Pembiayaan Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2022** adalah sebagai berikut :

Kode	Uraian	APBD 2021	PROYEKSI 2022
6	**PEMBIAYAAN**		
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**160,055,305,313**	**310,391,415,239**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	160,055,305,313	310,391,415,239
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**160,055,305,313**	**121,364,814,239**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**3,000,000,000**	**22,000,000,000**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	**3,000,000,000**	**22,000,000,000**
	PD.LPK Ciomas	3,000,000,000	
	PDAM		8,000,000,000
	BJB		14,000,000,000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**3,000,000,000**	**22,000,000,000**
	Pembiayaan Netto	157,055,305,313	**288,391,415,239**
6.3	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan**	**0**	**0**

Sumber:

- Tahun 2021 = Perda APBD kabupaten Serang tahun 2021
- Tahun 2022 = Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serang, Proyeksi 2022

Pada Rancangan Akhir RKPD Tahun 2022 Kabupaten Serang mengalami **Defisit sebesar Rp (288,391,415,239). Adapun terkait Pembiayaan Daerah** terdiri dari **Penerimaan Pembiayaan Daerah** dan **Pengeluaran Pembiayaan Daerah**. **Pembiayaan netto** pada Tahun 2022 diproyeksikan sebesar **Rp. 310,391,415,239 (sumber SiLPA 2021)** untuk menutup defisit, dengan **Pengeluaran** sebesar **Rp. 22.000.000.000 (**Penyertaan Modal kepada PDAM sebesar Rp. 8,000,000,000, kepada PT.BJB sebesar Rp. 14,000,000,000,- PT.Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Ciomas berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Serang nomor 100/Pdt.P/2021/PN.Srg untuk dilakukan pengembalian kepada para Nasabah yang dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten Serang selaku pemilik saham dan penyertaan Modal pada PT.BPR Serang. Adapun besaran alokasi untuk PT.LKM Ciomas dan PT.BPR Serang akan dibahas dan dicantumkan pada proses Pembahasan Gabungan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Serang tahun 2022 dan dalam pembahasan Gabungan Rancangan APBD Tahun 2022.

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Tujuan pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional, sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan dasar dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun skala daerah.

4.2 PRIORITAS NASIONAL, KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2022

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2022 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan UndangUndang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualita dan Berkeadilan Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

   a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan

dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan

b. Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofishery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut: :

a) Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan;
2) Peningkatan pasokan bahan bakar nabati;
3) Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi;
4) Peningkatan pemenuhan energi domestik; dan
5) Pengembangan industri pendukung EBT.

b) Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif);
2) Pengelolaan hutan berkelanjutan;
3) Penyediaan air untuk pertanian;
4) Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;
5) Pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan
6) Pengembangan waduk multiguna.

c) Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;

2) Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;
3) Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar;
4) Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan
5) Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.

d) Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut;
2) Peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan;
3) Peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;
4) Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan
5) Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.

e) Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar;
2) Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
3) Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; dan
4) Peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha.

f) *Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi*, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir;
2) Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;
3) Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok;
4) Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
5) Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
6) Pengembangan industri halal.

g) *Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN),* dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa;
2) Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;
3) Pengelolaan Impor;
4) Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif;
5) Peningkatan Partisipasi dalam Jaringan Produksi Global;
6) Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi Branding, dan Produk Kreatif; dan

7) Peningkatan efektivitas Prefrential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi.

h) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan;
2) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industry 4.0;
3) Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga;
4) Peningkatan Penerapan Praktik Berkelanjutan di Industri Pengolahan dan Pariwisata; dan
5) Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui :

1. Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
2. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
3. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;

4. Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
5. Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui :

1. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
2. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
3. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
4. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
5. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
6. Pengentasan kemiskinan; dan g) Peningkatan produktivitas dan daya saing. Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut: ;

a) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, yaitu:

1) Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan;
2) Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan;
3) Pendampingan dan Layanan Terpadu; dan
4) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk.

b) *Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dengan kegiatan prioritas*, yaitu:
   1) Sistem jaminan sosial nasional;
   2) Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran; dan
   3) Kesejahteraan Sosial.

c) *Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, dengan kegiatan prioritas*, yaitu:
   1) Peningkatan kesehatan ibu, anak, Keluarga Berencana (KB), dan kesehatan reproduksi;
   2) Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat;
   3) Peningkatan Pengendalian Penyakit;
   4) Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas);
   5) Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan.

d) *Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan kegiatan prioritas*, yaitu:
   1) Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran;
   2) Pemerataan Akses dan Wajib Belajar 12 Tahun;
   3) Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
   4) Penjaminan Mutu Pendidikan; dan
   5) Peningkatan Tata Kelola Pendidikan.

e) *Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, dengan kegiatan prioritas*, yaitu:
   1) Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak;
   2) Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
   3) Kualitas Pemuda.

f) *Pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas*, yaitu:
   1) Akselerasi penguatan ekonomi keluarga;

2) Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial;
3) Reforma Agraria; dan
4) Perhutanan Sosial.

g) *Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing, dengan kegiatan prioritas,* yaitu:
1) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri;
2) Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas;
3) Peningkatan Kapabilitas Iptek dan Penciptaan Inovasi; dan
4) Prestasi Olahraga.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

a) Revolusi mental dalam sistem pendidikan;
b) Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
c) Revolusi mental dalam sistem sosial.

Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas. Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

a) *Revolusi Mental Dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa Dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, Dan Berkarakter*, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;
2) Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;
3) Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter;
4) Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental;
5) Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan berlandaskan Pancasila; dan
6) Pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotism.

b). Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter Dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;
2) Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;
3) Pelindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;

4) Pengembangan Diplomasi Budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan
5) Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.

c). Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan Dan Harmoni Sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama;
2) Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama;
3) Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya;
4) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama; dan
5) Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan.

d). Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Peningkatan Budaya Literasi;
2) Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra;
3) Pengembangan budaya Iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta; dan
4) Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.

Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

1. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
2. Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
3. Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
4. Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
5. Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur. Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

a) *Infrastruktur Pelayanan Dasar,* dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau;
2) Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman;
3) Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan;
4) Keselamatan dan Keamanan Transportasi;
5) Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur; dan
6) Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi.

b) *Infrastruktur Ekonomi,* dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Konektivitas Jalan;
2) Konektivitas Kereta Api;
3) Konektivitas Laut;
4) Konektivitas Udara; dan
5) Konektivitas Darat.

c) *Infrastruktur Perkotaan*, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Transportasi Perkotaan; dan
2) Infrastruktur dan Ekosistem TIK perkotaan.

d) *Energi Dan Ketenagalistrikan*, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan;
2) Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan; dan
3) Kecukupan Penyediaan Energi dan Tenaga Listrik.

e) *Transformasi Digital*, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Penuntasan Infrastruktur TIK;
2) Pemanfaatan Infrastruktur TIK; dan
3) Pendukung Transformasi Digital.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
c) Pembangunan Rendah Karbon.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

a) *Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup,* dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
2) Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
3) Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan

4) Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

b) Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Penanggulangan Bencana; dan
2) Peningkatan Ketahanan Iklim.

c) *Pembangunan Rendah Karbon,* dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Pembangunan Energi Berkelanjutan;
2) Pemulihan Lahan Berkelanjutan; dan
3) Pengembangan Industri Hijau.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
b. Meningkatkan Hak-Hak Politik Dan Kebebasan Sipil;
c. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
d. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
e. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

a) Konsolidasi Demokrasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi;

2) Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan; dan
3) Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik.

b) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Penguatan Integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri; dan
2) Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional.

c) Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Penguatan Implementasi Manajemen ASN;
2) Transformasi pelayanan publik;
3) Penataan kelembagaan dan proses bisnis; dan 4) Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja.

d) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Penguatan Keamanan Dalam Negeri;
2) Penguatan Keamanan Laut; dan
3) Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

4.3 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BANTEN

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah merupakan penjabaran dari (5) lima Misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, yaitu :

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur;
3. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan

berkualitas;

4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas;
5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Untuk mewujudkan Visi **BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH,** sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2017-2022, telah dijabarkan Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Target Capaian pada RKPD Tahun 2020.

4.4 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan Dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 dan Dalam kerangka keterpaduan pembangunan nasional dan provinsi, maka untuk mewujud komitmen seluruh masyarakat Kabupaten Serang dalam menyelesaikan Permasalahan – permasalahan yang dikemas dalam Isu-isu strategis Pemerintah Kabupaten Serang.

Isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- **PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MASYARAKAT**
- **PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT**
- **PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISIKINAN, PENGANGGURAN DAN PEMULIHAN PEREKONOMIAN PASCA COVID -19**
- **PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN**
- **PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR**

- **PENINGKATAN KUALITAS PENATAAN RUANG, PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA PENANGGULANGAN BENCANA**
- **PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Memperhatikan dan mencermati Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 serta upaya untuk mengatasi isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Serang Tahun 2022, maka ditetapkan Tema Pembangunan Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022, yaitu sebagai berikut :

"PEMANTAPAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMULIHAN PEREKONOMIAN KABUPATEN SERANG PASCA PANDEMI COVID-19 YANG DIDUKUNG OLEH PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA YANG MEMADAI"

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. **Peningkatan Kualitas SDM yang Sehat, Cerdas, Berakhlaq**
2. **Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan**
3. **Peningkatan Kondisi Sarana Prasarana dan Pemerataan Pembanguan**
4. **Pemulihan Perekonomian Daerah**

Adapun Prioritas dan Sasaran Operasional Pembangunan Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Prioritas dan Fokus Pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2022

NO.	PRIORITAS	FOKUS PEMBANGUNAN
1.	**Peningkatan Kualitas SDM yang Sehat, Cerdas,**	Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19
		Pemenuhan layanan dasar dan perlindungan sosial

NO.	PRIORITAS	FOKUS PEMBANGUNAN
	Berakhlaq	Pengendalian penduduk dan Pengentasan kemiskinan
		Perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan
		Peningkatan literasi, inovasi dan kreativitas masyarakat
		Pelestarian kebudayaan daerah
2.	**Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan**	Penguatan kelembagaan dan tatalaksana
		Peningkatan kualitas pelayanan publik
		Penataan dan peningkatan kapasitas SDM Aparatur
		peningkatan tata kelola kependudukan
		Tata kelola keuangan dan aset
		Penguatan penerapan SAKIP
		Peningkatan riset dan inovasi daerah
3.	**Peningkatan Kondisi Sarana Prasarana dan Pemerataan Pembanguan**	Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar
		Peningkatan daya dukung lingkungan dan ketahanan bencana
		Identifikasi, analisis pemantapan peningkatan status 400KM Jalan Desa menjadi Jalan Kabupaten
4.	**Pemulihan Perekonomian Daerah**	Pengendalian inflasi daerah
		Peningkatan investasi
		Bantuan Modal Kerja bagi UMKM melalui Fasilitasi Kredit yang dikelola oleh UPK eks PNPM
		Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif
		Pengembangan pariwisata
		Peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja

Berikut Rencana Program RKPD yang akan menjadi agenda pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2022 sesuai dengan Isu Strategis

Kabupaten Serang berdasarkan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026.

Tabel 4.2

Rencana Program Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET
1.	DISDIKBUD	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SMP	100,00%
			APM SD	100,00%
			APK PAUD	87,00%
			Cakupan pelayanan pendidikan Nonformal/ kesetaraan	100,00%
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase penerapan muatan local di sekolah	100%
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan terhadap murid	81,21%
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Prosentase izin pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat	100%
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan kelompok budaya yang dibina	56%
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Cakupan kelompok kesenian yang dibina	56%
		PROGRAM PEMBINAAN	Cakupan pembinaan sejarah di	100%

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET
		SEJARAH	dunia pendidikan, event, dan organisasi kemasyarakatan	
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	15%
2.	DINKES	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Fasilitasi Pelayanan UKM dan UKM	100%
			Cakupan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan tingkat daerah	100%
			Tingat ketersediaan sitem informasi kesehatan	30%
			Persentase Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diterbitkan	200%
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI. ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Rekomendasi Teknis Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diterbitkan	100%
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Tingkat partisipasi kesehatan masyarakat skala desa	100%
			Cakupan promosi kesehatan	100%

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET
			tingkat desa	
			Cakupan kelompok kesehatan masyarakat yang dibina	100%
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Posyandu aktif	
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase SDM yang mengikuti Diklat sesuai standar kompetensi	25%
3.	RS. dr. DRADJAT PRAWIRANEGARA	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	90%
			Tingkat sarana prasarana RS dalam kondisi baik	72%
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase SDM yang mengikuti Diklat sesuai standar kompetensi	25%
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Penerimaan Pendapatan RS	100%

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET
4.	DPUPR	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Irigasi Primer dan Sekunder (<1000Ha) kondisi baik	79%
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga mendapatkan akses air melalui SPAM	87,15%
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga mendapatkan akses pengelolaan air limbah domestik	77,96%
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase realisasi penataan bangunan gedung daerah	19%
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang teratur	19%
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Cakupan infrastruktur drainase kota	8,95%
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Cakupan Infrastruktur Pengelolaan Sampah Kabupaten	20
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Cakupan infrastruktur jalan kabupaten	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA	Persentase Badan Usaha Konstruksi	100%

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET
		KONSTRUKSI	yang memiliki IUJK Nasional (Non Kecil dan Kecil)	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Tingkat ketaatan tata ruang dengan rencana tata ruang wilayah	88
		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI		100
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		100
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		100
5.	DPKPTB	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Pengelolaan Kawasan Permukiman Kumuh	10%
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan perbaikan rumah di kawasan kumuh	18,18
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan Relokasi Program Kabupaten/ Kota	100%
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	10%

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET
		DAN UTILITAS UMUM (PSU)		
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah dan PSU Tingkat Kemampuan Kecil yang memiliki sertifikasi dan registrasi	10%
6.	DISHUB	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase layanan angkutan darat	13%
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Memiliki usaha angkutan laut	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Persentase Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang memiliki izin	20%
		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase Prasarana Perkeretaapian Umum yang memiliki izin	50%
7.	D L H	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tingkat ketersedian dokumen lingkungan hidup yang dibuat dan diproses	3 dok
		PROGRAM	Tingkat ketersediaan informasi	300

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET
		PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	untuk penghitungan IKA, IKU, dan ITV/L	Sampel
		PROGRAM PENGEND BAHAN BERBAHAYA (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Prosentase penaatan pengelolaan B3 dan limbah B3 pada kegiatan/usaha	100%
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Prosentase penaatan pengelolaan lingkungan kegiatan/usaha	100%
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Tingkat peran serta lembaga kemasyarakatan / pendidikan dalam pengelolaan lingkungan hidup	100 Lembaga Kemasyarakatan/ Pendidikan
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	tingkat kepedulian masyakarat atau kelompok/lembaga masyarakat/ lembaga pendidikan/ dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup	5 Kelompok
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN	Prosentase pengaduan lingkungan hidup kewenangan kabupaten yang tertangani	1

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET
		LINGKUNGSAN HIDUP		
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Tingkat ketersediaan informasi untuk penghitungan ITV/L	2 Ha
		PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH	Tersedianya data, informasi, dan sarana prasarana operasional persampahan, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah	75
8.	DISPERTAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang dilakukan monitoring dalam pemanfaatan sarana pertanian	60%
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase Prasarana pertanian dengan kondisi baik (JUT, embung, RPH, dll)	60%
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	15
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan pencegahan dan penanggulangan bencana pertanian	45
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Prosentase perizinan usaha pertanian	17%

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan bina kelompok tani	53
9.	DKPP	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	28,13%
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	132,42
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penurunan jumlah desa rentan rawan pangan	3,07%
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman pangan	92%
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Capaian produksi perikanan tangkap	82,4
			Cakupan bantuan sarana penangkapan ikan	7,51%
			Cakupan bina kelompok nelayan	15,81
			Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	76,92%
			Persentase tanda daftar kapal perikanan < 10 GT	6,57%

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase izin usaha perikanan budidaya	100%
			Cakupan pembinaan kelompok pembudidaya ikan kecil	7,14
			Persentase tanda daftar pembudidaya ikan kecil	9,46%
			Cakupan bantuan sarana perikanan budidaya	14,29
			Capaian produksi perikanan budidaya	80,2
			Capaian produksi garam	67,61
			Capaian produksi benih ikan	61,50
			Cakupan Survailen hama dan penyakit ikan	60,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan pengawasan usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya di perairan umum daratan	80%
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase tanda daftar usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Skala Mikro dan Kecil	16,00%
			Cakupan pembinaan kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Skala Mikro dan Kecil	20,00
			Capaian produksi pengolahan hasil usaha perikanan	94,59
			Capaian angka Konsumsi Ikan daerah	150,27
			Cakupan bantuan sarana pengolahan dan pemasaran hasil	16,00

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET
			perikanan	
10.	DISKOPERINDAG	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi yang dilayani	100%
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Tingkat pengawasanKoperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	6
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang sehat	22%
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi terlatih	100%
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Partisipasi Koperasi Aktif	78 %
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Partisipasi Usaha Mikro	4%
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang berkembang menjadi Usaha Kecil	15%
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahan yang diterbitkan	95%
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA	Persentase Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang	100%

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET
		DISTRIBUSI PERDAGANGAN	dibina	
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100%
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Produk Ekspor Unggulan	50%
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi Uji Metrologi Legal	0,90%
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Kegiatan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	-
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan industri baru	1
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA	Prosentase perizinan usaha industri	100%
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Cakupan layanan sistem informasi industri nasional	98,82
11.	DPMD	PROGRAM PENATAAN DESA	Tingkat tertib penyelenggaraa penataan desa	100%

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET
		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Kerjasama antar Desa yang terfasilitasi	100%
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Tingkat tertib administrasi pemerintahan desa	100%
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina	100%
12.	DISNAKERTRANS	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Cakupan perencanaan ketenagakerjaan	100
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	100%
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase layanan penempatan tenaga kerja lokal	20%
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Prosentasi Perusahaan yang mempunyai sarana hubungan industrial	74,56
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah calon transmigran yang diberangkatkan	15 KK

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET
13.	DPMPTSP	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Tingkat Pelayanan Izin Penanaman Modal	100%
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Cakupan promosi potensi unggulan daerah dalam 1 tahun	100%
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengelolaan Data Informasi Perizinan dan non Perizinan yang terintegrasi	100%
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu	100%
14.	DISPORAPAR	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	97,50%
			Persentase Wirausaha Muda	34,04%
			Cakupan Pembinaan Kepemudaan	32,97%
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Tingkat prestasi event olahraga	45,00%
		PROGRAM PENGEMBANGAN	Cakupan Pembinaan peserta didik Pramuka	99,83%

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET
		KAPASITAS KEPRAMUKAAN		
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Daya tarik destinasi pariwisata Kabupaten	75,76%
			Persentase Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten	20%
			Persentase Destinasi Pariwisata Kabupaten	20%
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha Pariwisata yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	16,67%
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Cakupan Pemasaran Pariwisata Kabupaten	14,44%
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Produk dan atau Karya Ekraf terdaftar HAKI	30%
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berkompetensi dasar	10%
15.	DINSOS	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Fasilitasi KAT dan Pembinaan Tenaga	80%

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET
		SOSIAL	Kesejahteraan Sosial	
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100%
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan rehabilitasi sosial	7,25%
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Anak-Anak Terlantar dan Fakir Miskin yang mendapatkan Jaminan Sosial	0,08%
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan kondisi baik	100%
16.	DKBP3A	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	meningkatnya kualitas keluarga melalui pemberdayaan ekonomi keluarga	46
			meningkatnya kualitas hidup perempuan melalui pemberdayaan politik dan pemerintahan	0
			Persentase kasus KDRT dan kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak anak	55%

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET
			terselesaikan	
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Meningkatnya prosentase kasus kekerasan dan TPPO terhadap perempuan yang tertangani sampai dengan selesai	
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	meningkatnya kecamatan dan desa layak anak yang aktif	
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	meningkatnya perlindungan khusus anak	
		PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	meningkatnya Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	100%
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	meningkatnya ketersediaan data pilah gender dan anak	
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Meningkatnya jumlah peserta KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	3.625
			meningkatnya jumlah kampung KB mandiri	16
			menurunnya prosentase kebutuhan KB yang belum terpenuhi (Unmeetneed)	11,11
			Meningkatnya pemahaman remaja dalam kesehatan reproduksi dan pendewasaan usia perkawinan (PUP)	77,91
		PROGRAM	meningkatnya ketersediaan data	

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET
		PENGENDALIAN PENDUDUK	mikro keluarga	100
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya jumlah anggota Poktan tribina , UPPKA dan PPKS aktif ber KB	80
17.	SETDA	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Tersedianya Dukungan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan penilaian LPPD pada Tupoksi Sekretariat daerah	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	tingkat dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi tugas Sekretariat daerah	100
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	tingkat dukungan penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan yang menjadi tugas Sekretariat Daerah	100
18.	SET DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Meningkatnya Kualitas kinerja layanan dan fasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Serang	100
19.	INSPEKTORAT	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Tersusunnya Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET
			Persentase temuan Inspektorat dan BPK-RI yang ditindaklanjuti di Wilayah Kerja IRBAN	73,5%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tersusunnya Program Penyelenggaraan Pengawasan	
20.	BPKAD	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.	Tersedianya dokumen Keuangan Daerah	100%
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.	Persentase laporan Pengelolaan Aset Daerah.	8%
21	BAPENDA	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah	100%
			Tingkat ketercapaian target pendapatan	100%
22.	BAPPEDA	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase kesesuaian Dokumen Perencanaan OPD dengan Dokumen Perencanaan Pemerintah daerah	100%
			Terpenuhinya penyusunan dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai jadwal perencanaan	

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase Kesesuain Pelaksanaan Kegiatan OPD sesuai dengan Perencanaan	100%
			Tercapainya keselarasan antara penyusunan dokumen perencanaan daerah dengan Pelaksanaan Kegiatan perangkat daerah	
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indek / Kategori Inovasi Daerah	Sangat inovatif
			Prosentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yang telah didiseminasikan	
			Prosentase dukungan inovasi daerah	
23.	BKPSDM	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Perentase ASN yang dikembangkan kompetensinya sesuai standar	
			Tingkat Capaian kinerja pegawai kategori sangat baik (91-100)	94,00
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Tercapainya kepuasan terhadap peleyanan kepegawaian	
24.	DISKOMINFOSANTIK	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Kategori PPID	92%
			Cakupan Diseminasi Informasi Pemerintah Daerah melalui	100%

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET
			Media Informasi	
		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah	100
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	92,00%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan data statistik sektoral yang dipublikasikan	60,00%
			Ketersediaan Statistik Sektoral di lingkup Daerah	Ada
25.	DISDUKCAPIL	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya Kualitas Pelayanaan Penerbitan Dokumen Kependudukan	100,00
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya Kualitas Pelayanaan Pencatatan Sipil	100,00
			Prosentasi kerjasama dinas kependudukan dan pencatatan sipil dengan lintas sektoral melalui aplikasi berbasis SIAK	21,74
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Meningkatnya mutu pelayanan Administrasi Kependudukan di tingkat UPT ataupun di Tingkat Dinas	100,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Terkelola dan tersaji nya data kependudukan Buku Profil Perkembangan Kab. Serang	100,00

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET
26.	DPKD	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat tertib pengelolaan arsip perangkat daerah	5%
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase kegiatan Gemar Membaca tingkat daerah yang dilaksanakan	100,00%
			Persentase pembinaan perpusatakaan yang terkelola dengan baik	30,67%
27.	SATPOL PP	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Kualitas pengendalian ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	65%
28.	BPBD	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat pelayanan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	100%
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		100%
29.	KESBANGPOL	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN	Persentase partai politik yang difasilitasi	100%

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET
		MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pembinaan organisasi kemasyarakatan	100%
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan kelompok yang dibina tentang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik sosial terselesaikan	100%
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase kelompok masyarakat yang dibina terkait narkoba, kerukunan umat beragama dan kepercayaan	100%
	SELURUH OPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat layanan pendukung urusan pemerintahan	100

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET
	29 KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN	100%
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan koordinasi pemberdayaan desa/kelurahan	100%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan	100%
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan ketentraman ketertiban di wilayah kecamatan	100%
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang dibina	100%

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Berdasarkan evaluasi pembangunan Tahun 2020, memperhatikan target-target pembangunan daerah dalam Dokumen Rancangan RPJMD Kabupaten Serang 2021-2026 khususnya target-target yang belum tercapai, serta mempertimbangkan berbagai aspirasi masyarakat yang berkembang dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan maka dirumuskan rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 yang masih bersifat indikatif. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 merupakan hasil sinkronisasi antara aspirasi masyarakat, Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) dan berpedoman pada Dokumen Kabupaten Serang 2021-2026 serta kebijakan pembangunan pada tingkat Provinsi Banten (RKPD Provinsi Banten) dan nasional (RKP) pada Tahun 2022.

Adapun kebijakan dan arahan Pemerintah pusat untuk mendukung pencapaian sasaran agenda prioritas pembangunan nasional yang perlu mendapatkan perhatian bagi daerah dalam perencanaan program dan kegiatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya peningkatan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, tersedianya perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan jaminan sosial, serta pembentukan mental/karakter bangsa, budi pekerti, nilai-nllai patriotisme dan cinta tanah air serta semangat bela negara.

2. Mendukung terwujudnya stabilitas dan kedaulatan pangan melalui reformasi agraria, untuk pengendalian pemanfaatan lahan pertanian, pendistribusian bibit dan pupuk, peningkatan biaya operasi dan pemeliharaan irigasi dalam upaya peningkatan produktifitas pertanian dan nilai tambah petani untuk hidup layak dan lebih sejahtera.
3. Terciptanya pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat, antar wilayah, antar desa dan pinggiran serta antar kawasan. Hal tersebut bertujuan agar tercapai pemerataan pembangunan antarwilayah yang seimbang yang dapat mengurangi kesenjangan pembangunan di masing-masing wilayah
4. Terpelihara dan terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan baik di bidang maritim, energi, pariwisata, maupun stabilitas dan kedaulatan pangan. Hal tersebut bertujuan agar tersedia jaringan infrastruktur perhubungan dengan berbagai moda transportasi yang mengedepankan pelayanan cepat, tepat, murah dan aman, sehingga akan mendorong efisiensi dan efektifitas kelancaran arus orang dan distribusi barang serta jasa yang dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi dan menekan angka inflasi.
5. Penguatan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah antara lain melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan dan sosialisasi regulasi dalam upaya peningkatan kinerja sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing

Secara lengkap, rencana program dan kegiatan Tahun 2022 berdasarkan pendekatan prioritas daerah dan prioritas Perangkat Daerah (PD). Prioritas daerah yang dimaksud adalah sebagaimana terurai pada bab sebelumnya (BAB IV), sedangkan prioritas satuan kerja adalah rencana program yang akan dilaksanakan tiap satuan kerja yang mendukung tercapainya target-target per urusan pemerintahan daerah, maupun hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan aspirasi masyarakat yang berkembang dalam musrenbang RKPD di Kecamatan.

Selanjutnya berkenaan dengan aspirasi masyarakat, belum tentu seluruh aspirasi yang berkembang di masyarakat mendapatkan prioritas penanganan oleh

Perangkat Daerah pada tahun 2022, kiranya perlu penelaahan yang mendalam dan kriteria-kriteria yang diperhatikan adalah sebagai berikut:

1) Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan Nasional dan Daerah
2) Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah
3) Dampak yang ditimbulkan terhadap publik
4) Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan

Pengelompokan program dan kegiatan Tahun 2022 didasarkan pada kategori sebagai berikut:

A. Program dan Kegiatan Operasional Rutin Perkantoran

Program dan kegiatan operasional rutin perkantoran merupakan program dan kegiatan yang mendukung operasional rutin perkantoran dan setiap PD (program non urusan). Adapun program dan kegiatan operasional rutin perkantoran, meliputi:

Tabel 5.1
Nomenklatur Program Non Urusan untuk seluruh OPD

No.	Program	OPD
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh OPD

Sumber : Peremndagri 90 tahun 2020

B. Program dan Kegiatan Urusan Wajib dan Pilihan serta Penunjang Urusan Pemerintahan

Program dan Kegiatan Urusan Wajib dan Pilihan serta Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan program dan kegiatan pembangunan amanat/kebijakan Nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas pendidikan 20% (dua puluh persen) dan Kesehatan 10% (sepuluh persen) yang terangkum dalam prioritas dan sasaran

pembangunan tahunan. Program harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Di samping itu juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun program dan kegiatan yang termasuk dalam Penunjang Perangkat Daerah meliputi program dan kegiatan Urusan Wajib dan Pilihan serta pendukung urusan pemerintahan daerah yang Mendukung Indikator Kinerja Utama pada masing-masing Perangkat Daerah.

Berpijak pada hasil telaahan terhadap upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah yang harus dicapai dalam Dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Serang 2021-2026 pada Tahun 2022, hasil evaluasi pencapaian kinerja sasaran misi prioritas pembangunan daerah dan pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan tahun 2020, serta upaya untuk mengatasi isu strategis dan permasalahan pembangunan pada Tahun 2022 maka **Program dan Kegiatan Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022** ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 5.2
Rencana Program dan Kegiatan serta Sub kegiatan
Dalam Dokumen RKPD Kabupaten Serang Tahun 2022

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	**DISDIKBUD**							**739,389,952,017**
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		100,00	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru	Penambahan Ruang Kelas Baru	0

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0
							Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0
							Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	0
				9 Kegiatan		Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Guru	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	0
							Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	0
							Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	0
				528 set		Terlaksananya Pengadaan Mebel SMP	Pengadaan Mebel Sekolah	0
				1 Kegiatan 1 Kegiatan		Tersalurkannya Beasiswa untuk Siswa dari rumah tangga Miskin dan Berprestasi 2000 Siswa Tersalurkannya Beasiswa untuk	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1,046,500,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						Siswa Tahfidz Al Quran 1500 Siswa		
				1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan		Bimtek Penyusunan Bahan Ajar Berbasis WEB Bimtek Penyusunan LKPD/Modul Belajar Terlaksananya Kegiatan Penyusunan KISI KISI PAS Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Soal US dan PAT ke Aplikasi Daring Terlaksananya Kegiatan Tim Penyusun dan Editor Naskah Soal US dan PAT	Penyelenga raan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	450,000,000
				1 kegiatan 4 Kegiatan 1 kegiatan		Terlaksananya Kegiatan LTUB Terlaksananya Kegiatan OSN, O2SN, FLS2N dan LKBB Siswa SMP Terlaksananya Kegiatan Pelatihan	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	240,000,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				1 kegiatan		Kepemimpinan Terlaksananya Kegiatan Pramuka		
				1 kegiatan 1 kegiatan		Terlaksananya Kegiatan akreditasi SMP Terlaksananya Kegiatan Sekolah Penggerak	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	125,000,000
				2 Kegiatan		Terlaksananya Kegiatan Pengawasan BOS SMP	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	100,000,000
				20 ruang	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru SD	Penambahan Ruang Kelas Baru	0
							Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0
				29 ruang		Terlaksananya Pembangunan Sanitasi Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	500,000,000
							Rehabilitasi Sedang/Beat Ruang Kelas	0
				1360 set		Terlaksananya Pengadaan Mebel SD	Pengadaan Mebel Sekolah	0

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				20 unit		Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkaan Sekolah	0
				1 Kegiatan		Terlaksananya Pemberian Beasiswa untuk Peserta didik dari rumah tangga miskin danBerprestasi 1.400 Siswa	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1,430,000,000
				1 Kegiatan		Terlaksananya Pengadaan Alat Praktik Siswa SD	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	0
				1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan		Terlaksananya Bimtek Penyusunan Naskah Penilaian tingkat SD Terlaksananya Kegiatan Manajemen berbasis Sekolah SD Terlaksananya Penyusunan Naskah Penilaian Akhir Semester Terlaksananya Penyusunan Naskah Penilaian Akhir Tahun Terlaksananya	Penyelenga raan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	636,756,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				1 Kegiatan		Penyusunan Naskah Ujian Sekolah SD Terlaksananya Sosialisasi Assesment Nasional		
				1 Kegiatan		Terlaksananya Kegiatan Minat Bakat dan kreativitas Siswa	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	135,000,000
				1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan		Terlaksananya Kegiatan Akreditasi SD Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Dewan Pendidikan Terlaksanya Kegiatan Marger SD	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	50,000,000
							Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	98,244,000
				1 kegiatan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya Kegiatan Seleksi Calon Kepala Sekolah (CAKEP) SD 133 orang	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	50,000,000
				1		Terlaksananya	Pengemban	150,000,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				kegiatan 1 kegiatan		Kegiatan Diklat Calon Kepala Sekolah (CAKEP) SD 109 orang Terlaksananya Kegiatan Diklat Calon Pengawas Sekolah (CAWAS) SD 25 orang	gan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
				1 kegiatan 1 kegiatan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Kegiatan Seleksi Calon Kepala Sekolah (CAKEP) SMP 23 orang Terlaksananya Kegiatan Seleksi Calon Pengawas Sekolah (CAWAS) SMP 23 orang	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	50,000,000
				1 kegiatan 1 kegiatan		Terlaksananya Kegiatan Diklat Calon Kepala Sekolah (CAKEP) SMP 17 orang Terlaksananya Kegiatan Diklat Calon Pengawas Sekolah	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	150,000,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						(CAWAS) SMP 17 orang		
					Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	0
				1 Kegiatan 1 Kegiatan		Terlaksananya Kegiatan PAUD HI workshop pengembangan PAUD Holistik Integratif (PAUD HI)	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	50,000,000
				1 Kegiatan			Pembinaan Kelembagaan dan Manajeman PAUD	50,000,000
				1 Kegiatan 1 Kegiatan		Bimbingan Teknis Verifikasi dan Validasi Data Satuan PAUD dan Dikmas melalui Dapodik Kegiatan Sosialisasi Pelaporan BOP PAUD	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	50,000,000
				100 orang	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Tinggi untuk Masyarakat Kab. Serang	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	1,502,000,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						yang kurang mampu		
				3 Kegiatan 9301 orang 6190 orang 550 orang	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Naskah Paket A, B dan C Terlaksananya Pemberian bantuan Insentif Guru (12 bulan) Terlaksananya Pemberian bantuan Insentif Guru MDA (12 bulan) Terlaksananya Pemberian bantuan Insentif Guru TPQ (12 bulan)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	26,918,522,000
				2 Kegiatan		Terlaksananya Kegiatan Bimtek dan Pengawasan BOP Kesetaraan	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	100,000,000
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		550 orang 300 orang	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan	Terlaksananya Pembayaran Beasiswa Guru PAUD Terlaksananya Pembayaran Beasiswa Guru	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar,	2,105,000,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				150 orang	Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	SD Terlaksananya Pembayaran Beasiswa Guru SMP	PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	
				2694 orang 203 orang 3676 orang 8 orang 1 orang 744 orang 142		Pemberian insentif guru honorer murni SD Negeri dan SMP Negeri Pemberian insentif guru honorer murni SD Negeri dan SMP Negeri daerah khusus Terlaksananya Pembayaran Insentif Guru PAUD Terlaksananya Pembayaran Insentif Guru TK Pembina Tersalurkan Insentif bagi GBS Tersalurkan Insentif bagi K2 Guru	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	27,115,200,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				orang 1 orang 1701 orang		Tersalurkan Insentif bagi K2 Tenaga Administrasi Tersalurkan Insentif bagi TKK Tersalurkannya Insentif bagi Operator Sekolah/UPT dan Tenaga Administrasi lainnya		
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		100,00	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	0
				1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Jawa - Serang [-] Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Sunda Pelatihan Penyusunan Kurikulum	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	0

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						Muatan Lokal - BTQ		
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		36 Kegiatan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan Pentas rutin Tasikardi, Fasilitasi Kesenian Tradisional Daerah, Fasilitasi Kesenian Daerah di Taman mini Fasilitasi Kesenian Serang barat dan utara	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	106,250,000
				1 kegiatan		Terlaksananya modifikasi dan kolaborasi seni Kabupaten Serang	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	0
				3 Kegiatan	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan festival Bedol Pamarayan, festival semarak takbir dan ulang tahun daerah	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	160,265,000
				1 Kegiatan		Terlaksananya pelatihan dan sosialisasi pemainan tradisional	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	0
				1 Kegiatan		Terlaksananya Anyar Culture	Pemberian Penghargaa	205,142,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						Karakatau Festival (AKCF)	n kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusin yang dalam Pemajuan Kebudayaan	
				1 Kegiatan	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Ritual Pusaka Golok Ciomas	Pelindungan, Pengembangan,Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	0
				1 Kegiatan		Terlaksananya Sosialisasi Sanggar/Paguron Seni Budaya	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	0
				1 Kegiatan		Terlaksananya Bantuan Sarana dan Prasarana Kesenian kepada sanggar/paguron seni	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	0
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		1 Kegiatan	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/K	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kesenian (Workshop Seni Budaya)	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian	243,608,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					ota		Tradisional	
				1 Kegiatan		Terlaksanany pengusulan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Kabupaten Serang	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	0
				1 Kegiatan		Terlaksananya Bimbingan Teknis tata Kelola sanggar/paguron seni Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisiona	0
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		1 Kegiatan	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	80,735,000
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		1 Kegiatan	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penelitian Cagar Budaya sebagai Warisan Budaya Benda	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	0
				1 Kegiatan		Terlaksananya Penetapan	Penetapan Cagar	0

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						Cagar Budaya	Budaya	
				1 Kegiatan 1 Kegiatan	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pemasangan Plang Papan Nama Cagar Budaya di Kab. Serang Terlaksananya Pemberian Insentif Juru Pelihara Cagar Budaya (JUPEL)	Pelindungan Cagar Budaya	204,000,000
				10 Cagar Budaya		Terlaksananya Pengembangan	Pengembangan Cagar Budaya	0
				1 Kegiatan		Terlaksananya Kegiatan even yang berlokasi di Cagar Budaya	Pemanfaatan Cagar Budaya	0
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		1 Kegiatan	Perencanan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Forum OPD Tahun 2022	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65,000,000
						Terlaksananya Penyusunan RKA/DPA Disdikbud Kab. Serang dan Pelatihan PPTK	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKP	162,885,000
				1 Kegiatan			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15,000,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				1 Kegiatan		Terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat Terkait Layanan Bidang Pendidikan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25,000,000
				12 bulan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersalurkannya Gaji dan Tunjangn ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Serang	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	670,287,730,017
							Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	107,570,000
				1 Kegiatan		Terlaksananya penyusunan laporan keuangan perangkat daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25,000,000
				1 Kegiatan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi Aset dan Evaluasi SD dan SMP	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	22,170,000
				1 Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Sidang Penetapan Angka Kredit (PAK)	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	29,860,000
				1 Kegiatan	Administrasi Umum	Terlaksananya Kegiatan	Penyediaan Komponen	58,275,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				1 Kegiatan	Perangkat Daerah	Instalasi listrik Kantor Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Alat Penerangan	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				1 Kegiatan		Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	250,000,000
				1 Kegiatan		Terlaksananya Pengadaan alat tulis Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	199,000,000
				1 Kegiatan		Terlaksananya Kegiatan Penggandaan Dokumen dan Cetak Dokumen Kantor	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	55,000,000
				12 bulan		Terlaksananya Penyediaan Surat Kabar Lokal dan Nasional	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20,000,000
				12 bulan		Terlaksananya Pengadaan Makanan dan Minuman Kantor	Fasilitasi Kunjungan Tamu	45,000,000
				12 bulan 12 bulan		Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah terlaksananya	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	501,325,200

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Luar Daerah		
				12 bulan 1 Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Listrik, Telepon,Internet Terlaksananya Publikasi Program Pembangunanprioritas Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	610,606,800
				28 orang 1 Kegiatan 1 Kegiatan		Terlaksananya Kegiatan Jasa Parmubakti,Pengemudi, Pengamanan Kantor dan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	758,306,000
				1 Kegiatan 1 Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Terlaksananya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	1,300,000,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4	Kendaraan Dinas Jabatan	
					1 Kegiatan	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150,000,000
					50 Sekolah	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Legalitas Dokumen Tanah Sekolah Negeri	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	300,000,000
				1 Kegiatan		Terlaksananya Pemeliharaan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Serang	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	300,002,000
2	**DINKES**							**226,718,179,685**
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYAKESEHATAN MASYARAKAT		1 unit	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Pembangunhan Rumah Sakit Type D	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	15,000,000,000
				12 Bulan 1000 m		Terselenggaranya Pematangan Lahan Puskesmas Mancak Terselenggaran	Pembangun a n Puskesmas	1,400,000,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						ya Pengadaan LahanPuskesmas Pabuaran		
				100 %		Terselenggaranya Rehabilitasi Puskesmas Baros	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	250,000,000
				12 Bulan		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0
				31 Puskesmas		Terselenggaranya Kalibrasi Alat di Puskesmas	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	25,588,750
				8 % 76 % 100 % 100 % 65 %		Kerusakan obat, vaksin dan BMHP Ketepatan Pendistribusian Obat dan BMHP Ketersediaan imunisasi dasar lengkap Ketersediaan imunisasi dasar lengkap di Puskesmas Ketersediaan obat essensial di Puskesmas	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas KesehatanLainnya	74,999,790
				76 %	Penyediaan	Terlaksananya	Pengelolaan	20,243,268,094

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Masyarakat miskin dan segmen khusus sebagai peserta JKN KIS, terlayaninya Masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dan belum mempunyai Jaminan	Jaminan Kesehatan Masyarakat	
				20 Puskesmas 31 Puskesmas 31 Puskesmas		Sarana dan Prasarana Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas Terstandar Terlaksanany a Pemeliharaa n Puskesmas Terpenuhiny a Kebutuhan Tenaga Kesehatan (THL)	11,984,481,824
				36 Parameter 80 %		Jumlah Pengujian Ruang lingkup terakreditasi Kepuasan Pelanggan Keselamatan dan Kesehatan kerja	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	99,999,900

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				75 % 2 siklus 100 % 3500 Sampel 2 lembaga		Pelaksanaan PME lab Pelaksanaan PMI lab Penanganan komplain pelanggan Pengujian sampel lab dan MCU Reakrediasi Laboratorium		
				100 % 90 % 60 %		Prosentase Pelayanan GawatDarurat Pra Faskes Prosentase Pelayanan Non Gawat Darurat Pra Faskes Prosentase Succesfull Call Ratio	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	340,008,300
				31 Puskesmas 31 Puskesmas	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksanannya Kegiatan Seksi Farmalkes Terlaksananya Pengadaan Alkes/Alat Penunjang Medik Fasilitas	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	260,500,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						Pelayanan Kesehatan		
				31 Puskesmas		Terlaksananya Pengadaan Obat dan Vaksin	Pengadaan Obat, Vaksin	205,165,000
				31 Puskesmas		Terlaksananya Pengadaan Habis Pakai	Pengadaan Bahan Habis Pakai	76,500,000
				100 % 100%	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Terpenuhinya Jumlah Kebutuhan dan Formasi jabatan SDM Kesehatan Terselenggaranya Kegiatan Sistem Informasi Sumber Daya Kesehatan Manusia	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	25,000,000
				100 %	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Bimtek Posbindu PTM	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	6,930,000
				100 %		Bimtek PANDU PTM	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertens	21,676,000
				100 %		Pencegahan dan pengendalian obesitas pada remaja	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes	600,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				100 %		Workshop Diabetes Melitus	Melitus	
				100 % 100 % 100 %		Desa Siaga Sehat Jiwa Peer Review Kesehatan Jiwa Masyarakat Rujukan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat dan Pasung	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	28,700,000
				100 %		Prosentase Pelayanan kesehatan orang terduga TB sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	10,080,000
				100 %		Prosentase Pelayanan kesehatan orang beresiko terinfeksi HIV sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	12,442,000
				100 %		Pelacakan dan Penaggulangan KLB kurang dari 24 jam	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada KondisiKejadian Luar Biasa (KLB)	36,000,000
				12 Bulan		Setiap Puskesmas melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	49,514,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						Jemaah Haji Tahap Dasar dan Tahap Lanjutan dengan syarat wajib haji Istitha''ah , Terkoordinirnya pembagian tugas, Pendampingan Pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji (Embarkasi), Kondisi jemaah haji dalam keadaan prima, Kemenag dan KBIH Kabupaten Serang		
				2 Puskesmas 2 Pesantren/sekolah		Sosialisasi Mental antenatal pada Ibu Hamil Menjadi Ibu Tanggguh dan Optimis Sosialisasi pencegahan danpengendalian program kesehatan jiwa pada anak dan remaja	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	23,836,000
				100 %		Sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan	7,188,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							NAPZA	
				100 % 100 % 100 %		Bimtek Deteksi Dini kesehatan indra bagi petugas kesehatan Peningkatan kapasitas dokter,bidan Puskesmas dalam deteksi dini kanker servik, kanker payudara dengan metode IVA dan CBE Upaya berhenti merokok	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	0
				12 Bulan		Monitoring daerah Terdampakbencana, pelaporan data yang terdampak bencana, simulasi bencana	Pengelolaan Upaya PengurangannRisiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	64,386,250
				100 % 100 %		Prosentase Penanggulangan Penyakit Bersumber Binatang Prosentase Penanggulangan Penyakit Menular Langsung	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
				100 %		Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan	Sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba	38,714,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						Sekolah	pada remaja	
				100 %		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Setiap Kasus KLB dilaksanakan dan di tanggulangi, dan di lakukan pengambilan spesimen, Setiap Spesimen dilakukan Pemeriksaan secara Laboratorium dan dikirimkan ke lab rujukan nasional	10,600,000
				100 %		Cakupan BIAS Campak Sesuai Target Cakupan, Cakupan BIAS DT dan Td Sesuai Target Cakupan , Pencatatan dan Cakupan Vaksinasi sesuai antara Puskesmas dan di Lapangan , Cakupan Minitoring dan Evaluasi Covid19 sesuai target, KIPI dapat di tanggulangi, Validitas Data	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	39,514,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						Cakupan Imunisasi, dan RCA Vaksinasi Covid		
				100 %	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	49,206,728
				100 %		Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	38,644,000
				100 %		Terselenggaranya Pe;ayanan Kesehatan Bayi Baru Lahi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	40,707,600
				100 %		Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	46,490,000
				100 persen		Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	61,240,000
				100 persen		Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	33,750,000
				100 persen		Terlaksananya kegiatan penanggulangan anemia dan KEK pada ibu	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	500,000,200

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						hamil		
				100 persen		Terlaksananya pemberian suplementasi gizi mikro padamasyarakat		
				100 persen		Terselenggaranya kegiatan pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita		
				100 persen		Terselenggaranya kegiatan Peningkatan Perbaikan Gizi Masyarakat		
				100 persen		Terselenggaranya kegiatan peningkatan surveilens dan intervensi giz		
				60 Desa		Peningkatan jumlah desa SBS		
				1 Kali		Terlaksananya pelatihan higiene sanitasi depot air minum	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	121,999,730
						Terlaksananya Pelatihan		

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				1 Kali 2 Puskesmas 100 unit 1 paket		Higiene Sanitasi Penjamah Makanan Terlaksananya Pembangunan IPAL Puskesmas Terlaksananya pembuatan percontohan jamban sederhana Terlaksananya Pengadaan Kesling Kit		
				100 % 31 Puskesmas		Terlaksananya kampanye hidup sehat Terlaksananya pengawalan kegiatan masyarakat hidup sehat	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	66,000,000
				100 %		Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Penyelenggar aan Kabupaten/Kota Sehat	0
				31 puskesmas	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP RujukanTingkat Daerah	Terselenggaranya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis	540,000,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					Kabupaten/Kota	Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	
				20 %		Prosentase Puskesmas melaksanakan yankestrad	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	7,250,000
				8 Faskes 2 PKM		Jumlah Faskes yang menyelenggarakan pelayanan Telemedicine Jumlah Puskesmas yang menyediakan perangkat Telemedicine	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	9,672,000
				10 % 50 % 60 %		Prosentase Klinik danDokter Praktek mandiri terakreditasi Prosentase Puskesmas Terakreditasi Utama dan Paripurna Prosentase	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	35,650,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						Rumah Sakit terakreditasi		
				100 % 100 % 100 %	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Penerbitan Izin RS Prosentase Rumah Sakit PONEK Prosentase Rumah Sakit yang dibina dan diawasi	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	0
				100 % 100 % 100 %		Posentase Puskesmas yang dibina dan diawasi Prosentase Dokter dan Dokter Gigi Praktek Mandiri yang dibina dan diawasi Prosentase Fasilitas Kesehatan yang melaksanakan Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Prosentase Fasilitas	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	49,350,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				100 % 100 % 100 % 100 % 10 %		Pelayanan Kesehatan yang melakukan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) Prosentase Klinik yang dibina dan diawasi Prosentase Laboratoriumdan faskes lainnya yang dibina dan diawasi Prosentase Praktek Mandiri Bidan dan nakes lainnya yang terstandar Prosentase Puskesmas PONED Terstandar		
				100 % 100 %		Prosentase Faskes dengan pelayanan rujukan terstandar Prosentase Faskes menggunakan SISRUTE	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	60,328,000
		PROGRAM PENINGKAT		100 %	Perencanaan Kebutuhan	Terpenuhinya Anggaran Biaya	Pemenuhan Kebutuhan	1,120,350,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		AN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 0			dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKPdan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Untuk Jasa dan Asuransi Pendukung Pelayanan Kesehatan	Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	
				100 %	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kompetensi Petugas Kesehatan dalam pelayanan meningkat	Pengembang an Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	32,085,000
				100 %	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di WilayahKabupaten/K ota	Prosentase Praktek Mandiri Tenaga Kesehatan Berizin	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	58,999,999
				100 %		Prosentase praktek Tenaga Kesehatan yang dibina dan diawasi	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	0

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		100 %	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0
				100 %	Penerbitan Sertifikat Produksi Panganndustri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri RumahTangga	0
				100 %	Penerbitan	Pengendalian	Pengendalia	0

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	n dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		31 Puskesmas 100 % 100 %	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan LintasSektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaraya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (DESA SIAGA) Terselenggaraya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (PROMOTIF & PREVENTIF COVID 19) Terselenggaraya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdaya a n Masyarakat	6,916,500,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				29 Kecamatan		Pemberdayaan Masyarakat (Reward Kader Posyandu) Terselenggaranya Peningkatan Upaya PromosI Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (SAKA BAKTI HUSADA)		
				29 Kecamatan 100 %	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Penyelenggar aan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	75,000,000
				31 Puskesmas	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan BersumberDaya Masyarakat (UKBM) Tingkat	Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat melalui UKBM	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembang an dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	0

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					Daerah Kabupaten/Kota		Masyarakat (UKBM)	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		90 % 80 % 1000 sampel 80 % 2 Lembaga 31 Puskesmas	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kalibrasi Peralatan Pelatihan Personil Pemeriksaan Sampel Laboratorium Penambahan Sarana dan Prasarana pengujian Survey Akreditasi Terselenggaranya peningkatan pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	64,166,201,482
				100 %	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Peningkatan pembinaan SDM kesehatan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15,000,000
				100 %	Perencanaan ,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dinkes	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52,375,000
				100 %		Tersusunnya dokumen	Koordinasi dan	25,000,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						evaluasi kinerja dinkes	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				100 %		Tersedianya dokumen hasil survey kepuasan masyarakat atas layanan kesehatan di Kab Serang	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	82,175,000
				12 Bulan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjanga	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	97,521,956,756
				12 Bulan		Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausaha a n dan Pengujian/V e rifikasi Keuangan SKPD	00
				12 Bulan		Terlaksananya Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0
				12 Bulan		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0
				100 %		Terlaksananya pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan	0

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						pemeriksaan	Pemeriksaan	
				100 %		Terlaksananya kegiatan penyusunan laporan keuangan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	95,520,100
				12 Bulan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan barang milik daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0
				12 Bulan		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0
				100 %		Terlaksananya Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0
				12 Bulan		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0
				12 Bulan		Terlaksananya kegiatan pengelolaan aset	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	56,800,000
				12 Bulan		Terlaksananya Penatausahaan	Penatausaha a n Barang	0

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						Barang Milik daerah pada SKPD	Milik Daerah pada SKPD	
				12 Bulan		Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0
				12 Bulan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener a ngan Bangunan Kantor	58,797,700
				12 Bulan		Terpenuhinya Sarana dan Prasarana penunjang Peralatan dan Perlengkapan Kanto	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapa n Kantor	504,250,334
				12 Bulan		Tersedianya Alat tulis Kantor Dinkes	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	314,978,500
				12 Bulan		tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa n	80,925,063
				12 Bulan		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangu ndangan-undangan Dinkes	9,750,000
				12 Bulan		Tersedianya Makan Minum Dinkes Terselenggaran	Penyelengga r aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	875,200,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				12 Bulan		ya Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	SKPD	
				100 %	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terbayarkannya Pemakaian Telepon, Listrik, Air dan Internet, Terbayarkannya Publikasi Program Pembangunan Prioritas	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,103,818,000
				12 Bulan		Terbayarkannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	886,352,000
				12 Bulan	Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	193,772,605
					12 Bulan	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	296,660,000
					12 Bulan	Terpenuhinya Sarana dan prasarana penunjang peralatan dan perlengkapan	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	117,753,980

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						kanto	Lainny	
3	**RS. dr. DRADJAT PRAWIRANEGARA**							**224,252,182,228**
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		100%	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya obat obatan RS	Pengadaan Obat, Vaksin	4,962,830,324
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terukurnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan RS	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37,170,600
				100%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjhangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	67,181,399,707
					Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya biaya operasional BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	172,070,781,597
4	**DPUPR**							**324,053,203,756**

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		12 bulan	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dana Untuk Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	penyu sunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya	350,000,000
						Tersedianya Dana Untuk Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi pengendali banjir, lahar, drainase utama perkotaan dan pengeman pantai	650,000,000
						Tersedianya Dana Untuk Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	Penyusunan pola dan rencana pengelolaan SDA WS kewenangan Kabupaten/kota	550,000,000
						Tersedianya Dana Untuk Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan	Pembangunan embung dan penampung air lainnya	1,400,000,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						Kabupaten/Kota		
						Tersedianya Dana Untuk Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembangun an bangunan perkuatan tebing	4,300,000,000
						Tersedianya Dana Untuk Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainn	Normalisasi /restorasi sungai	300,000,000
						Tersedianya Dana Untuk Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Opersi dan pemeliharaa n bendungan	50,000.000
						Tersedianya Dana Untuk Normalisasi/Res torasi Sungai	Operasi dan pemeliharaa n embung dan penampung air lainnya	600,000,000
						Tersedianya Dana Untuk Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Pengelolaan hidrologi dan kualitas air WS kewenangan Kabupaten/k ota	300,000,000
						Tersedianya Dana Untuk Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan	Pembinaan dan pemberdaya an kelembagaa n pengelolaan SDA	3,952,217,100

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						Kabupaten/Kota	kewenangan Kabuapten/Kota	
				12 bulan	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dana Untuk Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Penyusunan Rencana Teknis dan Dok lingkungan hidup utk konstruksi Irigasi dan rawa	2,000,000,000
						Tersedianya Dana Untuk Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	7,000,000,000
						Tersedianya Dana Untuk Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2,700,000,000
						Tersedianya Dana Untuk Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Operasi unit pengelola irigasi	2,400,000,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						Tersedianya Dana Untuk Operasional Unit Pengelola Irigasi	Pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi	1,400,000,000
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		12 bulan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kab/Kota	Tersedianya Dana Untuk Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Penyusun rencana kebijakan strategi dan teknis sistem drainase perkotaan	483,450,000
						Tersedianya Dana Untuk Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	Pengembangan sistem drainase perkotaan	544,009,500
						Tersedianya Dana Untuk Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan	Peningkatan saluran drainase perkotaan	522,309,500
				12 bulan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah	Tersedianya Dana Untuk Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Penyediaan Sarfana sistem drainase perkotaan	1,500,000,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					Kab/Kota			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		12 bulan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Dana Untuk Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Penyusunan rencana kebijakan dan strategi pengamgangan jaringan jalan serta prc teknis penyelenggaraan jl dan jbt	2,777,296,000
						Tersedianya Dana Untuk Pengelolaan Leger Jalan	Pengelolaan leger jalan	546,177,500
						Tersedianya Dana Untuk Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Survey kondisi jalan/jbt	1,220,755,000
						Tersedianya Dana Untuk Rekonstruksi Jalan	Rekonstruksi jalan	227,1891,397,522
						Tersedianya Dana Untuk Pemeliharaan Rutin Jalan	Pemeliharaan Rutin Jalan	7,134,211,428
						Tersedianya Dana Untuk Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan	3,385,007,500
						Tersedianya Dana Untuk Pelebaran Jembatan	Pelebaran Jembatan	1,126,480,000
						Tersedianya Dana Untuk Pemeliharaan Rutin Jembatan	Pemel rutin jembatan	558,753,762

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		12 bulan	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tersedianya Dana Untuk Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Fasilitasi sertifikasi tenaga terampil konstruksi	619,528,620
				12 bulan 12 bulan	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kab/Kota	Tersedianya Dana Untuk Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Pengelolaan operasional layanan informasi /jasa konstruksi	218,209,999
						Tersedianya Dana Untuk Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Penyusunan data dan informasi tenaga kerja dan badan usaha	51,120,000
						Tersedianya Dana Untuk Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Penyusunan data dan infromasi profil pekerjaan konstruksi	25,560,000
				12 bulan	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Tersedianya Dana Untuk Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Pembinaan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi	132,282,900
						Tersedianya Dana Untuk Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah	Pemantauan dan evaluasi IUJK Nasional yang telah diterbitkan	0

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						Diterbitkan		
				12 bulan	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Tersedianya Dana Untuk Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Bimbingan teknis tentang tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	68,500,000
						Tersedianya Dana Untuk Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan evaluasi tertib usaha , tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	624,157,500
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		12 bulan	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Tersedianya Dana Untuk Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Penetapan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang	1,800,000,000
				200 Peserta		tersedianya Dana Untuk Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	170,000,000
				4 Berita	Koordinasi	Tersedianya	Koordinasi	600,000,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				Acara	dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dana Untuk Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten?kota	
				240 Peserta		Tersedianya Dana Untuk Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang	300,000,000
				12 bulan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kab/Kota	Tersedianya Dana Untuk Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah	450,000,000
				1 Aplikasi		Updating Sistem Informasi Penataan Ruang Berbasis Android	Sistem Informasi Penataan Ruang	170,000,000
						Tersedianya Dana Untuk Sistem Informasi Penataan Ruang	Sistem informasi penataan ruang	170,000,000
				12 bulan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	Tersedianya Dana Untuk Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruan	Koordinasi dan sinkronisasi pemberian insentif dan disinsentif bidang penataan	170,000,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					Kab/Kota		ruang	
						Tersedianya Dana Untuk Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	sinkronisasi penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang	250,000,000
				7 Dokumen		Tersedianya Dana Untuk Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Koordinasi pelaksanaan penataan ruang	250,000,000
				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen		Penyusunan Dokumen Data Pokok Keruangan di Kabupaten Serang Penyusunan Dokumen KLHS untuk RDTR BWP Cikeusal dan Petir Penyusunan Dokumen Naskah Akademis untuk RDTR BWP Cikeusal dan Petir	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	1,800,000,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen		Penyusunan DokumenRDTR BWP Cikeusal dan Petir Updating 1 RDTR (Jawilan dan Kopo) Updating Peta Dasar Kawasan Perkotaan di Kabupaten Serang		
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH KOSONG		12 bulan	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dana Untuk Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan inventarisasi tanah kosong	8,406,886,478
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		12 bulan	Administrasi keuangan perangkat daerah	Tersedianya Dana Untuk Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	25,053,392,262
						Tersedianya Dana Untuk Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi	204,659,750
				12 bulan	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Tersedianya Dana Untuk Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengaman barang milik daerah	182,229,750
				12 bulan	Administrasi	Tersedianya	Penyediaan	18,079,750

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					umum perangkat daerah	Dana Untuk Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	
						Tersedianya Dana Untuk Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1,278,657,865
						Tersedianya Dana Untuk Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik kantor	260,346,000
						Tersedianya Dana Untuk Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	322,930,666
						Tersedianya Dana Untuk Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	79,920,000
						Tersedianya Dana Untuk Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi kunjungan tamu	105,000,000
						Tersedianya Dana Untuk Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	828,680,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				12 bulan	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Tersedianya Dana Untuk Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	102,720,000
						Tersedianya Dana Untuk Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	888,690,204
						Tersedianya Dana Untuk Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa pelayanan umum	663,180,000
				12 bulan	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Tersedianya Dana Untuk Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	1,711,053,600
						Tersedianya Dana Untuk Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	271,020,000
						Tersedianya Dana Untuk Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	730,409,100

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				12 bulan	Perencanaa, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedianya Dana Untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daera	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	185,454,000
						Tersedianya Dana Untuk Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	116,880,000
5	**DPKPTB**							**118,343,375,762**
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		3 RKB 2 Dok	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar.	Jumlah ruang kelas baru SD yang dibangun. Jumlah dokumen Perencanaan Teknis Penambahan Ruang Kelas Baru yang disusun.	Penambahan Ruang Kelas Baru.	1.554.137.500
				9 RK		Jumlah ruang kelas SD yang direhabilitasi.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas.	3.003.948.500
				10 RK	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.	Jumlah ruang kelas SMP yang direhabilitasi.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.324.379.500
				20 UNIT	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.	Jumlah unit pondok pesantren yang dibangun.	Pembangunan Gedung/Ruang	4.117.534.500

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan.	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		3 Dok	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota.	Jumlah dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM yang disusun.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM.	412.825.600
						Jumlah desa yang dibangun SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan.	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan.	2.587.174.400
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		4 dok	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten /Kota.	Jumlah dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan SPALD yang disusun.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota.	540.549.000
				7 Desa		Jumlah desa yang dibangun Sub Sistem Pengolahan Setempat	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat.	1.610.154.900
				9 Unit		Jumlah unit SPALD yang dipelihara.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan	928.522.37

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Air Limbah Domestik.	
				1.200 SR		Jumlah Sambungan Rumah (SR) Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman yang dibangun (BOP DAK).	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	920.772.750
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		1 Dok	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.	Jumlah dokumen laporan Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan.	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG.	500.000.000
				8 Dok 2 Unit		Jumlah dokumen perencanaan teknis pembangunan gedung daerah yang disusun. Jumlah unit gedung daerah	Perencanaan ,Pembangunan,Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota	53.000.000.000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				5 Unit		yang dibangun (Puspemkab). Jumlah unit gedung daerah yang dibangun (Gedung Kecamatan).		
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		4 Dok 2 Unit	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota.	Jumlah dokumen perencanaan teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang disusun. Jumlah unit Fasum kecamatan yang dibangun	Penataan Bangunan dan Lingkungan.	7.000.000.000
		ROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		5 Dok	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.	Jumlah dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang disusun.	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.	330.000.000
				6 Unit	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10	Jumlah unit sarana prasarana yang dibangun.	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh.	1.411.410.000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					(sepuluh) Ha.			
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		750 unit 30 org 1 Dok	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota.	Jumlah penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (Penanganan RTLH). Jumlah penerima Bantuan Pembangunan Rumah Pasca Bencana. Jumlah dokumen perencanaan.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembang nya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.	22.422.803.306
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		11 Unit	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan.	Jumlah unit Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan yang dipelihara/ direhabilitasi.	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian.	2.235.786.694
				12 bln		Tingkat pemenuhan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	350.000.000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Perumahan.	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		1 Dok	Perencanaan ,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	165.801.000
				3 Dok		Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	56.682.000
				1 Dok		Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	464.612.000
				12 bln	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.093.377.333
				12 bln		Tingkat pemenuhan administrasi perjalanan dinas	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	469.785.000
				1 dok		Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	43.120.000
				12 bln	Administrasi Barang Milik Daerah pada	Tingkat pemenuhan jasa keamanan	Pengamanan Barang Milik Daerah	140.400.000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					Perangkat Daerah	kantor DPKPTB Kab.Serang	SKPD	
				12 bln	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan suku cadang alat listrik dan elektronik	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32.554.400
				12 bln		Tingkat pemenuhan alat tulis kantor. Tingkat pemenuhan penyediaan makanan dan minuman.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	131.715.543
				12 bln		Tingkat pemenuhan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.	35.730.850
				12 bln		Tingkat pemenuhan penyediaan surat kabar dan majalah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000
				12 bln		Tingkat pemenuhan kebutuhan makan minum rapat	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.890.000
				12 bln	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	185.353.336
				12 bln	Penyediaan Jasa	Tingkat pemenuhan	Penyediaan Jasa	729.200.000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kebutuhan jasa media, komunikasi, air, listrik dan internet	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				12 bln		Tingkat pemenuhan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	562.865.000
				12 bln	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	517.442.700
				12 bln		Tingkat pemenuhan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	246.013.000
				12 bln		Tingkat pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99.834.580
6.	**DISHUB**							**40,404,256,767**

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Penyediaan Perlengkapan Jalan di JalanKabupaten/Kota	999,559, 733
							Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	14,723,7 99,000
					Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal dan	0
							Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan pendukung)	757,840, 000
					Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Fasilitasi Pemenuhan persyaratan Perolehan IzinPenyelenggaraan danPembangunanFasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalamSistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara	68,729,9 20

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Elektronik	
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	227,400, 000
					Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	153,360, 000
							Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	427,800, 000
							Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	254,030, 000
				1 Kegiatan	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan	Penurunan Tingkat Kemacetan dalam Rangka Peningkatan Kinerja LLAJ di Kabupaten	Penataan Manajeme n dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan	499,650, 000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					Jalan Kabupaten/Kota	Serang	Jalan Kabupaten/ Kota	
				1 Kegiatan	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Meningkatnya kemampuan ASN Dishub sebagai Auditor dan Inspektor LLAJ	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	0
				1 Kegiatan		Meningkatnya Fasilitas Perlengkapan Jalan Sebagai Sarana dan Prasarana Keselamatan LLAJ	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	260,280, 000
				1 Kegiatan		Meningkatnya Fasilitas Perlengkapan Jalan Sebagai Sarana dan Prasarana Keselamatan LLAJ	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	0
				1 Kegiatan		Meningkatnya Kesadaran dan Budaya Berlalu Lintas yang Tertib, Aman dan Selamat bagi Masyarakat	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	90,840,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				1 Kegiatan	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penyediaan Angkutan Umum Orang dan Barang yang Berkualitas dan Baik di Kabupaten Serang	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	61,172,000
				1 Kegiatan		Meningkatnya Kesadaran, Kedisiplinan Berlalu Lintas di Kabupaten Serang	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	851,354,000
				1 Kegiatan	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Meningkatnya Kualitas Jaringan Trayek Pedesaan di Kabupaten Serang	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum JaringanTrayek Pedesaan Kewenangan Kab/Kota	0
				1 Kegiatan	Penerbitan Izin Penyelengga	Meningkatnya Ketertiban Perizinan	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan	51,120,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					raan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Angkutan Orang dalam Trayek	Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
				1 dokumen	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen Kinerja Jaringan Jalan Kabupaten Serang	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	50,499,900
					Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan kab/Kota		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	0
				10 unit		jumlah prasarana jalan terpelihara	Rehabilitasi dan Pemeliharan Prasarana Jalan	0
					Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin	0

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					Parkir		Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kab/Kota		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	0
							Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas	2,517,169,715
				12 Laporan	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kab/Kota	Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	49,500,000
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasi		Penyediaan Data dan Informasi Jaringan	146,790,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					an untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
					Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal		Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	317,793,000
					Penetapan Rencana Induk dan DLKR/ DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau		pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk	471,915,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Pelabuhan Sungai dan Danau	
					Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		Pengoperasian dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	0
							Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	410,280,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	265,868,035
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	200,000,000
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65,000,000
					Administrasi Keuangan		Penyediaan Gaji dan	11,004,256,767

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					Perangkat Daerah		Tunjangan ASN	
							Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	235,390,000
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	50,000,000
				1 Tahun	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	tersedianya asuransi BMD dan tenaga keamanan	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	309,445,600
				500 stell	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	tersedianya pakaian dinas dan lapangan beserta atribut perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0
				12 bulan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya alat listrik dan penerangan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30,000,000
				10 unit		Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan penunjang aktivitas kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	140,779,100
							Penyediaan Bahan	150,000,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Logistik Kantor	
				12 bulan		Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	483,922,000
				12 bulan		Terbayarnya tagihan bulanan surat kabar/ koran	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangu ndangan	19,500,000
				12 bulan		Tersedianya mamin tamu dan air galon	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19,994,000
				1 tahun		Terfasilitasinya perjalanan dinas Tersedianya mamin rapa	Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	699,979,000
				1 unit	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Crane PJU	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0
				6 unit		Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0
				6 paket		Tersedianya sarpras pendukung gedung kantor	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99,472,560
				12 bulan	Penyediaan Jasa	Tersedianya jasa surat	Penyediaan Jasa Surat	153,360,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	menyurat	Menyurat	
				12 bulan 1 tahun		Terbayarnya tagihan listrik, telepon, internet bulanan dan CCTV kantor Terfasilitasinya jasa publikasi (advetorial)	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	809,018,000
				12 bulan		Terbayarnya jasa tenaga pelayanan umum (Operator komputer)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	127,800,000
				1 tahun 12 bulan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terbayarnya pajak kendaraan dinas/ operasional jabatan Tersedianya BBM dan perawatan/ pemeliharaan rutin kendaraan dinas / operasional jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	399,832,006
				1 tahun		Terbayarnya pajak kendaraan dinas operasional lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan - Kendaraan	1,199,889,227

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				1 tahun		Tersedianya BBM dan perawatan/ pemeliharaan kendaraan dinas operasional lapangan	Dinas Operasional atau Lapangan	
				12 bulan		Tersedianya BBM dan perawatan/ pemeliharaan kendaraan dinas operasional lapangan	Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	149,988,500
				1 tahun		Terpeliharanya gedung kantor	Pemeliharaa n/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	399,879,704
7.	**D L H**							**69,831,349,427**
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup		2 Dokume n	Rencana Perlindunga n dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/K ota		Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/K ota	99,998,000
				1 kegiatan		Penyusunan Dokumen Inventarisasi Lingkungan Hidup (DIKPLHD)	Pengendalia n Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/K ota	149,999,900
				3 Dokume n	Penyelengga raan Kajian Lingkungan Hidup	Penyusunan KLHS terkait RDTR, terkait prosespenilaian	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHSRencan	349,999,900

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					Strategis (KLHS) Kab/Kota	dokumen lingkungan	a Tata Ruang	
				1 kegiatan		Penyusunan KLHS terkait penyusunan RPJMD	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	149,997,250
				1 kegiatan		Penyusunan KLHS terkait dengan bencana alam	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resi ko Lingkungan Hidup	249,999,800
		Program Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan Lingkungan Hidup		3 Kegiatan	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	302,315,360
				1 kegiatan 1 kegiatan		Kelompok masyarakat yang terbangun Pembinaan kampung Iklim	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan	149,999,632

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Adaptasi Perubahan Iklim	
				500 sample		Data pengujian kualitas air sungaii, limbah cair dan udaraambient	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	550,077,000
				3 Kegiatan	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Sistem Informasi Peringatan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	106,260,000
				1 kegiatan		Melokalisir sumber pencernaan/identifikasi sumber pencemaran(Dokumen)	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	53,010,000
							Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	51,710,000
					Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota		Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	0
							Koordinasi	50,195,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	
				1 kegiatan		Pembersihan lahan tercemar	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	0
				1 kegiatan		Penanaman	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	150,000,000
				1 kegiatan		Pendampingan kegiatan restorasi di DAS	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	150,000,000
		Program Pengendbahan Berbahaya (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)		1 kegiatan 1 kegiatan	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Pembinaan tata cara pengisian OSS Pembuatan Sertifikat penanggung Jawab di Kegiatan usaha	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	20,000,000
				1 kegiatan		Rekomendasi teknis perijinan penyimpanan sementara	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi	100,000,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	
				1 kegiatan	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan singkronisasi pengelolaan limbah B3 antar pemerintah daerah Kabupaten, Propinsi dan pusat	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkut a n, Pemanfaatan , Pengolahan, dan/atau Penimbunan	0
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		50 kgt	PembinaandanPengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan pemahaman , persyaratan dan mekaniusme proper	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	100,000,000
				5 orang		Terlaksanya pelatihan kapasistas pejabat	Pengembang an Kapasitas Pejabat	65,100,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						pengawas Lingkungan hidup	Pengawas Lingkungan Hidup	
				200 kegiatan		Berita cara hasil pengawasan	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	201,460,000
					2 kegiatan	Terlaksanya Forum Group Discusi hasil Pengawasan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	0
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)		1 kegiatan	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kot	Penyusunan design vegetasi kelembagaan pengelolaan kehati	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	99,970,000
				2 lokasi		Pengadaan Bibit spesies tanaman lokal, penanaman, pemeliharaan dan moniring pengelolaan taman Kehat	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	149,991,000
				1 Tahun		pemangkasan	Pengelolaan	200,000,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				4 lokas		pohon di sepanjang jalan wil Kabupaten serang Pemeliharaan taman ciruas, taman kramatwatu, taman petir, taman pemdopo, dan BOP pemeliharaan taman	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
				1 kegiatan		sisialisasi , penanaman dan monev (taman kehati yang di miliki mitra DLH / kelompk tani hutan)	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	100,000,000
				2 lokasi		Pelatihan dan pembentukan taman kehati	Pengembang an Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0
				1 kegiatan		Pembinaan pembentukan tamankehati	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	0
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN			Penyelenggaraan Pendidikan,Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya	98,199,600

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakat an	
							Pendamping a n Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	149,999,900
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUKMASYARAK AT			Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Penilaian Kinerja Masyarakat/ L embaga Masyarakat/ D unia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	106,045,000
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		50 perusahaan	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Penanaganan terhadap pengaduan masyarakat	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	250,765,000
				1 kegiatan		Koordinasi dan sinkronisasi penerapan	Koordinasi dan Sinkronisasi	152,100,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						sanksiadminstrasi	Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	
		Program Pengelolaan Sampah		1 kegiatan	Pengelolaan Sampah	Kordinasi kerjsama pengelolaan sampah	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	108,360,000
				3 lokas		Pembinaan, pengelolaan TPS3R	Pengurangan Sampah dengan melakukanPembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	25,000,000
				12 bulan 12 bulan 154 orang		BBM, service suku cadang kendaraan persampahan Pembayaran typing fee pembayaran upah PTT	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan , Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	3,195,904,900

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
				10 kelompok		Pendampingan dan stimulan bank sampah	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	193,435,000
				1 kegiatan		koordinasi dan konsultasi terkaitpenyediaan sarana parasana persampahan	Koordinasi dan Sinkronisasi PenyediaanSarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	5,144,950,000
				1 kegiatan		koordinasi kerjasama pengelolaan sampah	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	16,450,000
				1 dokumen	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Penyusunana aturan teknis pengelolaan persampahan	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	30,000,000
				12 bulan		Datantimbulan sampah	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan	44,375,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Sampah	
				2 zona	Pengelolaan Sampah	Pengadaan sarana pengelolaan persampahan (pengadaan alat dan pembangunan SPA)	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	32,531,470,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		2 dokumen		Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	56.736.000
				1 dokumen		Tersusunnya Dokumen survey kepuasan masyarakat	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.348.000
				1 kegiatan 12 bulan 1 kegiatan		Terlaksanya Hari ulang tahun Kab. Serang Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Terlaksananya kegiatan MTQ di kab. Serang	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	150.000.000
				1 dokumen		Tersusunnya laporan realisasi kinerja DLH	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	39.455.000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				4 triwulan		Tersusunnya laporan prognosis dan laporan triwulanan	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	14.067.200
				12 bulan		Terlaksannya Pembayaran gaji Pramubakti, Sopir,Tkk	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.240.000
				1 tahun 12 bulan		Terlaksannya Publikasi program DLH, Terbayarkan nya Listrik, telpon dan internet	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	390.580.000
				12 bulan		Terlaksannya Perbaikan laptop, printer, pengisian tinta printer, pebaikan Ac. lemari besi, filing kabinet, meja, kursi	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapa n Kantor	25.230.000
				12 bulan		TerlaksananyaP embayaran petugas Cleaning service dan belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	384.990.940
				4 triwulan		Terpenuhinya ATK masing-masing bidang	Penyediaan Bahan Logistik	90.000.000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						dan UPT	Kantor	
				4 triwulan		Terpenuhi nya Barang cetakan, penggandaan dan spanduk	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa n	89.997.800
				4 triwulan		Terpenuhinya komponen alat listrik dan elektronik	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor	10.000.000
				1 tahun		tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapa n Kantor	182.483.477
				12 bulan		Tersedianya informasi tentang berita lokal dan Nasional	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	14.400.000
				11 bulan		Terlaksananya kegiatana koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Penyelengar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	199.996.000
				1 tahun		Pemeliharaan gedung kantor, sarana prasarana ruang rapat	Pemeliharaa n/Rehabilitas i Gedung kantor dan Bangunan lainnya	40.520.000
				12 bulan		Pengisiaan BBM Kendaraan Dinas/Operasio nal, jasa service, STNK, KIR, Suku Cadang	Penyediaan jasa Pemeliharaa n, Biaya, Pemeliharaa n dan pajak Kendaraan	479.467.100

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	
				1 tahun		tersedianya gaji dan tunjangan ASN DLH	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.472.700.668
8.	**DISPERTAN**							**26,287,700,710**
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	625,750,000
							Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	242,449,900
					Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	330,369,250
							Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	215,145,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer		Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	0
					Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	0
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		6 unit 1000 bungkus	Pengembangan Prasarana Pertanian	tersedianya cultivator tersedianya insektisida	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B,Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan /KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LCP2B	171,676,000
							Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana	

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Pendukung Pertanian lainnya	
					Pembangunan Prasarana Pertanian		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	508,349,000
							Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	0
							Pembangunan, Rehabilitasidan Pemeliharaan DAM Parit	0
							Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	0
							Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	0
							Pembangunan, Rehabilitasi dan	0

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Pemeliharaa n Prasarana Pertanian Lainnya	
					Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Gal ur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Gal ur Ternak	450,110,000
		PROGRAM PENGENDAL IAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAK AT VETERINER			Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Pengendalia n dan Penanggulan gan Penyakit Hewan danZoonosis	129,901,233
					Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratoriu m dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veterine	100,000,000
					Penerapan dan Pengawasan		Pendamping a n Unit Usaha	100,000,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Hewan dan Produk Hewan	
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	160,085,500
							Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	0
							Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	160,041,600
							Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan,	258,931,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	100,843,500
							Pengembang an Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1,144,140,000
							Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana PenyuluhanPertanian	123,790,340
							Pembentukan dan Penyelenggar aan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	0
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN		1 dokumen 1 dokumen 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Dokumen DPA Dokumen DPAP	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	51,874,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		/KOTA		dokumen 1 dokumen	Daerah	Dokumen RKA Dokumen RKAP		
				1 dokumen 1 dokumen 1 kegiatan		Dokumen renja Dokumen renstra Terlaksananya penyelenggaraa n forum PD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	120,660,000
				14 Bulan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN Dinas Pertanian	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17,755,704,054
							Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	133,950,000
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan /Semesteran SKPD	11,638,400
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	102,240,000
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener a ngan	18,500,350

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Bangunan Kantor	
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	83,644,970
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa n	29,136,250
							Fasilitasi Kunjungan Tamu	255,440,000
							Penyelengga r aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	337,012,000
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10,500,000
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	472,068,080
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kanto	962,605,109
					Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Penyediaan Jasa Pemeliharaa n , Biaya Pemeliharaa	761,067,174

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					Pemerintahan Daerah		n , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35,805,000
							Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	124,273,000
9.	**DKPP**							**14,463,721,760**
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan GenanganAir Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	10,950,000
							Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidaya an Ikan di	15,200,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Keci		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	8,760,000
					Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan PemasaranSkala Mikro dan Kecil		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	52,436,000
					Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha	13,560,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
							Pemberian Fasilitas bagi Pelaku UsahaPerikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		1 Dokumen 25 %	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen data dan informasi Sumber daya Ikan Pengelolaan Perikanan Tangkap di Perairan Umum Darat Meningkatnya Data dan Informasi SDI	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	70,218,000
						150 Orang	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	0
				25 %		Jumlah Nelayan yang dikembangkan	Pengembang an Kapasitas	41,062,500

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						Kapasitas Nelayan Meningkatnya Kapasitas Nelayan	Nelayan Kecil	
				20 Kelompok 25 %		Jumlah lembaga nelayan yang dikembangkan Meningkatnya pembentukan dan pengembangan kekembagaan nelayan kecil	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan danPengembang an Kelembagaan Nelayan Kecil	25,023,000
				10 Kelompok 10 %		Jumlah KUB yang difasilitasi meningkatnya fasilitasi bantuan pembinaan, pembiayaan dan kemitraan usaha	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	27,370,000
					Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Pelayanan Penyelenggar aan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	499,500,000
				7 % 100 Kapal	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di WilayahSung	Meningkatnya Kapal yang Terdaftar Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	52,783,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					ai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		1 kali	Penyediaan Infrastruktur dan SeluruhPendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	bimtek pengelolaan lumbung pangan	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	403,138,500
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		1 Dokumen	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan danHarga Pangan	Terlaksananya Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	92,550,000
				1 Desa		Terlaksananya	Penyediaan	0

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						pembangunan Desa Siaga Pangan berbasis kearifan lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
				1 Dokumen		Terlaksananya Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	0
				2 Lembaga		Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Pengembang an Kelembagaa n Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	0
				30 Ton GKG	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	terlaksananya pengadaan cadangan pangan	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	0
				1 tahun		pengelolaan cadangan pangan pemerintah	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100,033,920
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		1 Dokumen	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Terlaksananya Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	54,985,000
				5 lokasi	Penanganan Kerawanan	Familiy Farming pada daerah	Koordinasi dan	0

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	rentan rawan pangan	Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		29 kecamatan	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Penguatan kapasitas Kelembagaan dan teknologi Usaha Perikanan Budidaya	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembang an Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	0
							Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	5,100,000
							Pemberian Pendamping a n, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggar aan Pendidikan dan Pelatihan	100,054,000
					Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi		Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi	21,175,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Pengelolaan Pembudidaya an Ikan		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidaya a an Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	73,670,000
				1 tahun		penyediaan prasarana, sarana dan operasional pembenihanika n pada UPT PBATAP	Penyediaan Prasarana Pembudidaya a an Ikan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	170,000,000
				3 lokasi 5 lokasi		Integrasi Pegaraman Pembangunan Sentra perikanan budidaya	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidaya a an Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1,000,000,000
							Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1	99,964,650

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							(satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		6 Kelompok	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan pekarangan pangan lestari	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	170,005,500
				5 produk	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota		Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Loka	0
							Jumlah produk pangan lokal yang dikembangkan	0
				1 Dokumen	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per	70,010,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					dengan Angka Kecukupan Giz		Tahun	
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		20 Kecamatan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		5 PSAT	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Terfasilitasinya Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	60,000,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,963,721,841
				3 dokumen	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	198,721,300

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					Daerah			
				5 dokumen		terlaksananya evaluasi perangkat daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	135,380,000
				1 Tahun 1 dokumen	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	27,866,000
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10,190,000
				1 tahun	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	terlaksanya pengelolaan penatausahaan barang milik daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	31,641,000
							Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	78,577,400
				1 Tahun	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28,054,500
				1 Tahun		tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	102,180,000
				1 Tahun		Tersedianya	Penyediaan	108,061,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						bahan logistik kantor/ATK	Bahan Logistik Kantor	
				1 Tahun		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa n	48,685,000
				1 Tahun			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangu ndangan	18,000,000
				1 Tahun			Fasilitasi Kunjungan Tamu	69,630,000
				1 Tahun			Penyelengga r aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	380,000,000
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	462,743,000
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	236,105,000
				1 Tahun		tersedianya jasa pramubakti/keb ersihan /sopir	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	979,470,349
				1 Tahun	Pemeliharaa n Barang	Terfasilitasinya Pajak	Penyediaan Jasa	152,247,300

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				1 Tahun	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kendaraan dinas operasional Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				1 Tahun		terfasilitasinya peralatan danmesin lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan MesinLainnya	124,000,000
				1 Tahun		Terpeliharanya sarana/prasarana gedung kantor	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	70,899,000
10.	**DISKOPERINDAG**							**16,776,721,946**
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		30 koperasi	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang di fasilitasi Badan Hukum Koperasi	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi	40.000.000,-

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten /Kota	
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		50 Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang dilakukan pengawasan	Pengawasan kekuatan, Kesehatan , Kemandirian, Ketangguhan, Serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	37.930.000,-
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		50 koperasi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang dinilai Kesehatannya	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan Kabupaten/Kota	40.000.000,-
		PROGRAM PENDIDIKAN		30 koperasi	Pendidikan dan Latihan	Jumlah Koperasi yang	Peningkatan Pemahaman	67.525.000,-

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	diberikan Pelatihan Pelaporan Keuangan Koperasi Berbasis Digitalisasi	dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		50 koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang difasilitasi Pembiayaan Bagi Koperasi	Pemberdayaan Peningaktan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	67.475.000,-
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		29 Kec	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan,Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaa	Jumlah Pendataan Potensi Usaha Mikro	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	35.120.000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					n dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			
				143		Jumlah UM yang memiliki legal usaha dan legal produk (IUMK, PIRT,LAIK SEHAT,HALAL, MEREK,SNI,DLL)	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	131.274.000
				326		Jumlah pelatihan dan pembinaan wirausaha pemula	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	199.958.200
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		29	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah pelaku usaha Mikro yang meningkat statusnya menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	100.000.000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				200		Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan bantuan permodalan dan alat produksi		2.568.823.050
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		10 perusahaan	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kab/ Kota	Jumlah pemantau bahan berbahaya	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	10.050.000,-
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		3 pasar	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi perdagangan	Pemeliharaan Pasar 3 Pasar (Bojonegara, Kragilan, Dan Carenang)	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	139.497.059,-
				72 tenag salar dan kebersihan pasar	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Honor Tenaga Salar dan Kebersihan Pasar	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	940.000.000,-
		PROGRAM		13 Pasar	Pengendalia	Monitoring	Pemantauan	35.000.000,-

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			n Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar kab/Kota	harga	Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat	
				10 distributor, 12 pasar tradisional		jumlah distributor pupuk,dan bahan kebutuhan pokok yang stok terawasi.	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	19.945.500,-
				10 Kecamatan	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah kecamatan untuk digelar operasi pasar (bazar Ramadhan)	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	99.509.500,-
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		1 pameran	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu)	Pelaku Usaha Ekspor, Produk Unggulan, UMKM, IKM Kabupaten Serang,	Pameran Dagang International / Nasional	79.948.000,-

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					Daerah Kabupaten/Kota			
				100 Pelaku		Pelaku Usaha Ekspor	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	49.990.000,-
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		13 pasar	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah	Pengawasan dan Penyuluhan Metrologi Legal	50.000.000,-
				13 pasar/19 item		Jumlah pelayanan BDKT	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa tera / tera ulang	150.001.000,-
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		30 IKM	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Pelatihan peningkatan mutu IKM Gerabah	Koordinasi. Sinkronisasi. dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	594.020.000,-
				30 IKM		Pelatihan peningkatan mutu IKM Kerajinan Bambu		
				30 IKM		Pelatihan peningkatan mutu IKM		

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						Tas/sepatu		
				1 Pameran		Pameran APKASI		
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN / KOTA		23 industri	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah industri yang di verifikasi lapangan	Koordinasi , singkronisasi pengawasan perizinan di bidang Industri dalam lingkup IUI. IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan Kab.	20.125.000,-
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		347 Industri	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Update data industri	Fasilitasi Pengumpulan. Pengolahan dan Analisis Data Industri. Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	19.974.800,-

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		8 dokumen	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Renja, PK, Renstra, pelaksanana Forum OPD, dll	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	89.996.800,-
				7 dokumen		Jumlah Dokumen Lakip, Lakip Triwulan, LPPD, LKPJ, Buku data, Renja, PK, Renstra, dll	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.000.000,-
				1 dokumen		Jumlah Dokumen SKM	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74.991.500,-
				12 bulan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Belanja Pegawai	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.277.252.337,-
				12 bulan	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	38.080.000,-
				12 bulan	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.000.000,-
				12 bulan		Jumlah Fasilitasi Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Bahan Logistik	70.000.050,-

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						Dan Mamin Harian	Kantor	
				12 bulan		Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	70.000.000,-
				12 bulan		Jumlah Fasilitasi Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.200.000,-
				12		Jumlah Fasilitasi Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.994.000,-
				12 bulan		Jumlah Fasilitasi Perjalanan Dinas Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah, Jumlah penyediaan Makmin Rapat	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	355.000.000,-
				12 bulan	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Fasilitasi Jasa Publikasi Program Pembangunan Daerah Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Online,	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.000.000,-
						Jumlah Fasilitasi Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		186.002.400,-
				1 kegiatan		Jumlah Fasilitasi Dukungan Penyelenggaraa	Penyediaan Jasa Pelayanan	50.000.000,-

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						n MTQ & kegiatan agama lainnya	Umum Kantor	
				12 bulan		Jumlah Fasilitasi Penyediaan Jasa kebersihan Kantor		10.000.000,-
				12 bulan		Jumlah Honor TKK, Pramubakti		325.800.000,-
				12 bulan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Fasilitasi Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	347.870.000,-
				12 bulan		Jumlah Fasilitasi Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.360.000,-
				12 bulan		Jumlah Fasilitasi Rehabilitasi Gedung Kantor	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.008.750,-
11	**DPMD**							**434,633,169,735**
		PROGRAM PENATAAN DESA		100%	Penyelenggaraan Penataan Desa	Terselenggaranya penataan desa	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	13.051.464.000
		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA		100%	Fasilitasi kerjasama antar desa	Terfasilitasinya kerjasama antar desa	Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	50.000.000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		DESA						
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		100%	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Perencaaan Pembangunan Desa	5.050.000.000
							Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	405.299.095.000
							Pembinaan Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	86.910.000
							Pembinaan dan Pemberdayaan BUMdesa dan Lembaga Kerjasama antar desa	33.410.000
							Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	24.780.000
							Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	150.000.000
							Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	26.100.000
							Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa	22.300.000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							serta lomba desa dan kelurahan	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		100%	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, POSYANDU, LPM dan Karang Taruna), Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	12.877.000
							Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga	52.123.000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	
							Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi masyarakat dan Pemerintahan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	16.576.000
							Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfataan Tekhnologi Tepat guna	28.550.000
					Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong	2.000.000.000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			
							Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa	44.999.800
							Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	749.999.500
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		100%	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		Pengamanan barang milik darah SKPD	56.160.000
					Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah		Pengadaan pakaian dinas beserta	36.680.000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							atribut kelengkapannya	
					Administrasi keuangan perangkat daerah		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	3.999.500
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.484.075.300
					Administrasi umum perangkat daerah		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	88.922.954
							Penyediaan bahan logistic kantor	112.028.420
							Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	29.220.800
							Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	18.000.000
							Fasilitasi kunjungan tamu	55.164.000
							Penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	530.642.000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	19.294.850
							Penyediaan peralatan rumah tangga	19.740.000
					Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	25.500.000
							Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	264.693.361
							Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	191.578.200
					Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	390.200.000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	395.210.000
							Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	66.680.000
							Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	290.517.600
					Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	68.158.000
							Evaluasi kinerja perangkat daerah	37.520.000
12	**DISNAKERTRANS**							**14,302,498,855**
		PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI			Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi		Identifikasi Potensi KawasanTransmigrasi	54,321,000
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		1 kegiatan	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	tersusunnya document perencanaan teenage kerja makro di	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	165,413,959

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						Kabupaten Serang		
		ROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana danPrasarana Lembaga Pelatihan Kerja	167,612,000
					Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan PelatihanKeterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetens	2,542,061,200
							Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	80,000,000
					Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	282,405,000
					Perizinan dan Pendaftaran Lembaga		Penyediaan Sumber Daya Perizinan	15,375,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					Pelatihan Kerja		Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	
					Konsultansi Produktivita s pada PerusahaanK ecil		Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	99,900,000
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	102,580,000
							Penyelengga r aan Pendataan dan Informasi SaranaHubu ngan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	332,376,000
					Pencegahan dan Penyelesaian		Pencegahan Perselisihan Hubungan	142,960,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota		Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Ber dampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
							Penyelenggar aan Verifikasi danRekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	78,750,000
							Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	205,400,000
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/ Kota		Pelayanan antar Kerja	38,370,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Perluasan Kesempatan Kerja	140,000,000
					Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	140,000,000
							Job Fair/Bursa Kerja	150,000,000
					Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	92,425,000
							Pemberdaya a n Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	100,000,000
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI			Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	111,624,800
							Penyuluhan Transmigrasi	218,958,000
							Pelatihan Transmigrasi	83,956,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,281,392,814
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50,905,000
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	18,620,000
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	105,050,000
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	46,724,000
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6,588,000
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener a ngan Bangunan Kantor	20,001,140
							Penyediaan	285,926,290

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Bahan Logistik Kantor	
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa n	116,550,000
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangu ndangan	48,300,000
							Penyelengga r aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	387,200,000
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	184,130,252
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	344,325,300
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantorr	423,480,000
					Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Penyediaan Jasa Pemeliharaa n , Biaya Pemeliharaa	462,290,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					Pemerintahan Daerah		n , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	92,443,600
							Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	84,084,500
13.	**DPMPTSP**							**12,665,378,659**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA			Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	57,648,000
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15,405,000
				2 Dokumen			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15,000,000
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan	19,670,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65,356,500
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,665,378,723
							Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20,000,000
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	24,300,000
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	40,000,000
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener a ngan Bangunan Kantor	20,001,000
							Penyediaan Peralatan dan	82,799,982

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Perlengkapa n Kantor	
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	106,378,700
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa n	125,690,000
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangu ndangan	54,000,000
							Fasilitasi Kunjungan Tamu	126,559,999
							Penyelengga r aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	409,854,000
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	53,500,000
						Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	256,182,920
						Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	828,720,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	297,285,000
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29,640,000
							Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	36,738,300
							Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19,883,570
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadiKewenangan Daerah		Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insen tif dan Kemudahan Penanaman	10,000,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					Kabupaten/Kota		Modal	
							Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insen tif dan Kemudahan Penanaman Modal	10,000,000
					Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	10,000,000
							Penyediaan Peta Potensi dan PeluangUsaha Kabupaten/Ko	10,000,000
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Buku	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersusunnya Dokumen Strategi Investasi	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	10,000,00
							Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	133,930,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		100 Pelaku Usaha	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	60,000,000
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Moda	56,457,000
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	145,000,000
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan BerbasisSistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	649,999,965
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMA			Pelayanan Perizinan dan Non		Penyediaan Layanan Konsultasi	60,000,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		N MODAL			Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	
					Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizina n berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	120,000,000
							Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	10,000,000
				10 pelaku usaha	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu	Terkoordinasika nnya pemberian fasilitas/insentid aerah	Koordinasi dan SinkronisasiP enetapan pemberian Fasilitas/Inse n tif Daerah	10,000,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			
14	**DISPORAPAR**							**13,894,530,780**
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		97,50%	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan organisasi pemuda yang aktif	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	375.000.000
				34,04%	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelatihan dan pembinaan wirausaha muda pemula	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	78.340.000
				32,97%		Terlaksananya pembinaan kepemudaan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelengga	24.620.000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							raan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	
							Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	1.036.035.000
							Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	92.100.000
							Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam	89.070.000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		14,30%	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya pembinaan atlet pelajar untuk mendapatkan prestasi	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	937.528.500
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Terlaksananya fasilitasi event olahraga rekreasi	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	23.185.000
					Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Terlaksananya pembinaan cabang-cabang olahraga prestasi	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	3.350.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		99,83%	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Terlaksananya pembinaan peserta didik pramuka	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	375.000.000
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK		16,67%	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pelaku usaha	Pembinaan dan Pengawasan Usaha	50.000.000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		DESTINASI PARIWISATA			Daerah Kabupaten/Kota	pariwisata	Pariwisata	
				75,76%	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya penetapan daya tarik wisata kabupaten/kota	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	50.000.000
				20%	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya penetapan dan pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	50.000.000
							Pengadaan/ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	100.000.000
							Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	50.000.000
				20%	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya penetapankawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	50.000.000
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		14,44%	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya pemasaran pariwisata kabupaten/kota	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata	500.003.000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	
							Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	30.000.000
							Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	18.053.000
				2.003.000 Orang		Terlaksananya pendataan dan evaluasi statistik kunjungan wisatawan kabupaten	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	72.007.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK		30%	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Terlaksananya pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	80.000.000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		KEKAYAAN INTELEKTUAL						
							Pengembangan Riset	90.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		10%	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Terlaksananya pengembangan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	95.054.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		70,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya pengamanan barang milik daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	206.880.000
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.294.530.891
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.979.000
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Fasilitasi Kunjungan Tamu	34.195.000
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	361.760.000
							Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9.152.000
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.231.000
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.437.000
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.486.726
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88.958.820
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.107.800
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	17.259.435

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					Pemerintahan Daerah			
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	232.990.000
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27.980.272
							Pemeliharaan Mebel	3.000.000
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.982.000
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	115.962.000
					Pengadaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik	Pengadaan Sarana dan Prasarana	23.650.000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	daerah	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	339.983.336
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	297.785.000
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.997.500
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.115.000
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.997.500
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.050.000
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	4.065.000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
15	**DINSOS**							**12,088,152,011**
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	17,500,000
					Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	12,114,000
							Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	382,800,000
							Peningkatan Kemampuan Potensi	51,835,5 00

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	
							Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	65,717,700
							Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	19,600,000
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di		Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik	10,000,0 00

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Pemberian Layanan Data dan Pengaduandan NAPZA	245,428,400
							Pemberian Layanan Kedaruratan	4,957,200
							Penyediaan Permakanan	4,860,000
							Penyediaan Sandang	4,150,000
							Penyediaan Alat Bantu	60,000,000
							Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	12,241,250
							Pemberian Layanan Rujukan	52,963,000
							Pemberian Bimbingan Sosial	1,850,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraa n Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	
							Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	1,850,000
							Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	1,700,000
					Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandanga n Pengemis di Luar Panti Sosial		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	11,050,000
							Pemberian Layanan Kedaruratan	4,750,000
							Penyediaan Permakana n	113,685,000
							Penyediaan	150,801,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Sandang	
				117 orang			Penyediaan Alat Bantu	143,250,000
							Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	4,950,000
							Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	83,105,000
							Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Dan Masyarakat	78,139,000
							Pemberian Layanan Rujukan	4,950,000
							Pemberian Pelayanan Penelusura n Keluarga	4,650,000
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/K		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	0

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					ota			
							Pengelolaa n Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	199,999, 000
							Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahtera an Keluarga	150,000, 000
							Fasilitasi Bantuan Pengemba ngan Ekonomi Masyarakat	625,000, 000
		PROGRAM PENANGAN AN BENCANA			Perlindunga n Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/K ota		Penyediaan Makanan	1,138,92 4,000
							Penyediaan Sandang	100,070, 000
							Penyediaan Tempat Penampun gan Pengungsi	54,000,0 00
							Pelayanan Dukungan Psikososial	16,682,0 00
					Penyelengga raan Pemberdaya an Masyarakat terhadap		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaa n Kampung Siaga	24,196,0 00

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					Kesiapsiagaa n Bencana Kabupaten/K ota		Bencana	
							Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaa n Taruna Siaga Bencana	16,128,0 00
		PROGRAM PENGELOLA AN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		1 Kegiatan	Pemeliharaa n Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota	Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaa n Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/K ota	26.432.520
				2 Kegiatan		Jumlah Penajaga Taman Makam Pahlwan Nasional Kabupaten/Kota	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/K ota	24.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA			Perencanaan , Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Penyusuna n Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	29,371,0 00
							Koordinasi dan Penyusuna n Dokumen RKA-SKPD	4,305,000
							Koordinasi dan Penyusuna n Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3,845,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Koordinasi dan Penyusuna n DPASKPD	3,845,000
							Koordinasi dan Penyusuna n Perubahan DPA-SKPD	3,845,000
							Koordinasi dan Penyusuna n Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,467,000
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9,010,000
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,263,152,062
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor	15,003,500
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor	156,904,954
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	74,999,097

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	65,000,000
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangu ndangan	7,200,000
							Fasilitasi Kunjungan Tamu	25,312,500
							Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	268,111,750
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah		Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	318,400,810
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	317,210,768
					Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah		Penyediaan Jasa Pemelihara an, Biaya Pemelihara an, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasiona l atau	426,540,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Lapangan	
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	169,300,000
16	**DKBP3A**							**15,224,802,141**
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		12 Bulan	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	terlaksananya fasilitasi operasional UPT PPA dan Pengelolaan Data Kekerasan selama 12 bulan	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	500,000,000
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		12 Bulan	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	terlaksananya operasional UPT KB	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	47,850,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				5 paket	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	jumlah sarana PKB/PLKB kit yang tersedia	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	0
					Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	0
					Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	0
				100 orang	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan	Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana kepada Mitra dan Stakeholder	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	0

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					Budaya Lokal			
				80 Orang	Pendayagunaan Tenaga PenyuluhKB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	jumlah TPD yang dibina dan pembinaan kader IMP	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1,920,000,000
				326 Desa		terlaksananya pembinaan Program KKBPK oleh PPKBD dan Sub PPKBD	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1,704,070,000
				1 Kegiatan 10 Paket 20 Paket	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota	Monitoring dan Evaluasi Tersedianya pengadaan alat dan obat pelayananMOP Tersedianya pengadaan alat dan obat pelayanan MOW	Pengendalian Pendistribusia n Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana PenunjangPelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	44,000,000
				180 Akseptor 10 Akseptor		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) IUD dan Implan 180 Akseptor Peningkatan Kesertaan	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	70,001,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				20 Akseptor		Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) MOP 10 Akseptor Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) MOW 20 Akseptor		
				50 Orang 1 Tahun		Terlaksanannya Kunjungan Kasus Kegagalan dan Komplikasi pasca pelayanan KB Tersedia Perlindungan terhadap komplikasi pasca pelayanan KB	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	33,000,000
				1500 Akseptor		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) IUD dan Implan 1500 Akseptor	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	55,000,000
				1 Kegiatan	Pemberdaya an dan Peningkatan Peran serta	Terlaksananya Momentun TNI Manunggal KB Kesehatan	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyaraka	20,000,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan danPembinaan Kesertaan Ber-KB		t an dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
				27 OPD		terlaksananya rapat koordinasi Pokja Kampung KB tingkat Kabupaten	Integrasi Pembangun a n Lintas Sektor di Kampung KB	2,920,000
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		1 dokumen	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	terlaksananya penyusunan RAD pengarustamaan gender dan penilaian APE	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	0
				58 OPD/Kecamatan		terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPRG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	25,051,000
				58 OPD/Kecamatan		terlaksananya sosialisasi PUG dan PPRG OPD dan kecamatan	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	13,509,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				6 Unit Pelaksana GSI	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	terlaksananya pembinaan dan penilaian GSI	Advokasi Kebijakan dan Pendamping a n kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdaya a n Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	16,605,000
				29 Kecamatan 29 Kecamatan 12 Bulan 12 Bulan 29 Kecamatan		terlaksananya bintek ekonomi perempuan terlaksananya bintek kepemimpinan perempuan terlaksananya fasilitasi pembinaan organisasi Dharma Wanita terlaksananya fasilitasi pembinaan organisasi GOW 12 bulan terlaksananya pembinaan pemberdayaan ekonomi	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdaya a n Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	349,999,950

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						perempuan		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		29 Kecamatan	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksana orientasi/workshop teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan UPPPKS)	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdaya a n Ekonomi Keluarga/UP P KS)	22,000,000
						Terlaksananya sosialisasi program KKBPK melalui Harganas	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,PIK-R dan Pemberdaya a n Ekonomi Keluarga/UP P KS)	0
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		200 K	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas KeluargaTing	43,395,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		kat Daerah Kabupaten/K ota	
		PROGRAM PENGENDAL IAN PENDUDUK		1 dokumen	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalia n Kuantitas Penduduk	tersedianya grand design data kependudukan Tingkat Kabupaten	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangun a n Kependuduk a n (GDPK) Tingkat Kabupaten/K ota	150,000,000
				1 rumah data	Pemetaan Perkiraan Pengendalia n Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	terbentuknya rumah data kependudukan di kampung KB	Membentuk Rumah Data Kependuduk a n di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	7,966,800
				80 Orang		terlaksananya pelatihan bagi petugas pengolahan dan pelaporan	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalia	0

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						data pengendalianlapangan dan pelayanan KB dan pembayaran petugas entry data Dallap Pelkon	n Lapangan dan Pelayanan KB	
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		27 OPD	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	tersedianya data gender dan anak	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	1,440,000
		PROGRAM PERLINDUNGANPEREMPUAN			Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	terlaksananya evaluasi isbat nikah terlaksananya sosiaslisasi pencegahan Ktpa /TPPO dan evaluasi isbat nikah	Advokasi Kebijakan dan Pendamping a n Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	66,240,000
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		36 Desa 6 Kecamatan	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/	terlaksananya pembinaan 36 desa layak anak terlaksananya pembinaan 6 kecamatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/K	58,660,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					Kota		ota	
				290 Orang 3 Kecamatan 58 Orang	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pembinaan forum anak pada 29 kecamatan terlaksananya pembentukan pembinaan PUSPAGA terlaksananya peringatan hari anak nasional	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	8,065,000
				29 Kecamatan		terlaksananya pemilihan duta anak	Penguatan Jejaring antar LembagaPenyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		6 Desa 33 Kecamatan	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/	terlaskananya pembentukan dan pembinaan PATBM terlaskananya pembentukan dan pembinaan PATBM	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	67,000,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					Kota			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		2 dokumen	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	penyusunan dokumen renstra dan renja	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27,919,000
				1 dokumen		Penyusunan Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49,984,500
				12 Bulan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pembayaran gaji dan tunjangan ASN di Lingkungan DKBPPPA Kabupaten Serang	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,524,749,391
				12 Bulan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Alat Listrik Untuk Penerangan kantor DKBPPPA , UPTD dan Balai Penyuluh KB	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener a ngan Bangunan Kantor	5,999,000
				100 %		Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapa n Kantor	40,448,265
				100 %		tersedianya Alat Tulis Kantor DKBPPPA, UPT dan Balai Penyuluh KB	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70,000,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				100 %		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa n	39,972,778
				12 Bulan		tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangu ndangan	12,000,000
				12 Bulan		tersedianya makan minum tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9,631,000
				12 Bulan		Tersedianya makan dan minum DKBPPPA , terselengaranya Kegiatan Perjalanan dinas luar daerah dandalam daerah	Penyelengga r aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	498,010,000
				1 dokumen	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan gedung balai penyuluh KB kecamatan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75,268,000
				12 Bulan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	terbayarkanya pemakaian telepon, listrik, air dan internet Terbayarkanya Publikasi Program Pembangunan Priorita	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	324,800,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				100 %		Terbayarkannya jasa Kebersihan, Keamanan, Pramubakti, Supir Kantor DKBPPPA	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	597,308,600
				100 %	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpenuhinya jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan , pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	624,905,300
				100 %		Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang peralatan kantor yang baik dan terpelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42,162,500
				100 %		Terpenuhinya pemeliharaangedung kantor DKBPPPA dan UPT P2TP2A	Pemeliharaan /RehabilitasiGedungKantor dan Bangunan Lainnya	35,001,057
				100 %		Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang perlengkapan kantor yang baik dan terpelihara	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	19,870,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Lainnya	
17	**SETDA**							**117,055,545,184**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		12 Bulan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	289,200,000
					Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Penyelenggaraan Kegiatan Fasilitasi KDH WKDH	Fasilitasi Keprotokolan	399,997,950
				12 Bulan		Terfasilitasinya Kebutuhan Pimpinan atas Kegiatan Kedinasan	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	2,203,106,000
				12 Bulan			Pendokumentasian Tugas Pimpinan	407,690,000
				100 Persen	Penataan Organisasi	Tertatanya Kelembagaan dan tersedianya analisis jabatan pada perangkat daerah di Kabupaten Serang yang sesuai dengan ketentuan	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	699,955,900
				100 Persen		Tertatanya pelayanan publik dan Tatalaksana yang baik di	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	599,995,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						Kabupaten Serang		
				100 Persen 1 Dok		Meningkatnya kinerja ASN tersedianya Dokumen RB	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	599,968,000
				1 tahun	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	200,000,000
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	299,995,000
				2799 buah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	349,998,000
				18 item		Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor yang disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,999,994,728
				12 bulan		Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200,000,000
				12 bulan		Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	199,994, 500
				1 kgt		Terpenuhinya bahan bacaan	Penyediaan Bahan	150,000,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	
				12 bulan		Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1,200,000,000
				12 bulan		Terpenuhinya Makanan dan Minuman Rapat	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,200,000,000
				79 unit	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jumlah Jenis Pengadaan Mebeleur	Pengadaan Mebel	199,929,000
				1 tahun		Tersedianya Lahan Puspemkab	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24,850,000,000
				12 bulan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,797,320,000
				12 bulan		Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	1,999,999,880
				12 bulan		Terpeliharanya Kebersihan di Lingkungan	Penyediaan Jasa Pelayanan	2,199,999,200

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						Setda	Umum Kantor	
				1 tahun	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda 2 dan 4 Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	700,000,000
				1 tahun		Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 dan 4 serta Pajak Kendaraan Dinas Operasional Setda Kab. Serang	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2,000,000,433
				1 tahun		Terpenuhinya Kebutuhan Mebeleur	Pemeliharaan Mebel	100,000,000
				12 bulan		Perawatan Barang Mesin Milik Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	250,000,000
				1 tahun		Perbaikan gedung dan bangunan secara rutin	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	999,999,584
				1 tahun		Terpeliharaya alat kantor untuk kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana	199,998,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						kantor lainnya	dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				1 tahun		Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	300,000,000
				1 tahun	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan Kepala Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	150,000,000
				1 tahun		Terpenuhinya kebutuhan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	100,000,000
				1 tahun		Terpenuhinya kebutuhan Sekretaris Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	50,000,000
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	39,501,090,758
					Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan	2,500,000,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Wakil Kepala Daerah	
					Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	709,707,000
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2,464,900,000
							Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	500,999,860
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	508,220,136
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	180,033,025
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN		1 Dok	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomia	Tersedianya Dokumen Renbis BUMD	Koordinasi, Sinkronisasi , Monitoring	868,560,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		PEMBANGUNAN		1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok	n	Tersedianya Dokumen Renstra BLUD untuk lima tahunan Tersedianya Dokumen RKAP BUMD Tersedianya Hasil Monev Tersedianya RBA BLUD untuk tahunan	dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	
				1 Kgt 2 Dokumen		Rakor Tim TPID Tersedianya Dokumen Pengendalian Inflasi Daerah Tahunan dan Triwulanan	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	500,000,000
				1 Kgt 1 Kgt		Melaksanakan Koordinasi dengan Instansi Terkait dan Pengusaha Kecil Melakukan Pengawasan Hasil Produk Mikro Kecil	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	499,999,100

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				1 Kgt		Mengevaluasi Capaian Produk Ekonomi Mikro Kecil		
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		1 Kegiatan	Administrasi Tata Pemerintahan	Terselenggara Rapat	Penataan Administrasi Pemerintahan	1,525,000,000
				1 Dok 1 Kegiatan 1 Unit 1 Kegiatan 1 Kegiatan		Adanya Buku Nama-Nama Rupa Bumi Kabupaten Serang Terlaksananya pembinaan kecamatan di Kabupaten Serang Tersedianya Tugu/ Tanda Batas Wilayah Terselenggaranya Bimbingan Tekhnis Penyusunan 29 Profil Kecamatan Terselenggaranya Bimtek pengelolaan PATEN di Kecamatan	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	500,000,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				1 Kegiatan 1 Kegiatan		Terselenggaranya penilaian PATEN di Kabupaten Serang Terselenggaranya rapat koordinasi pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat		
				1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Kegiatan		Dokumen Kerjasama Daerah (MoU/PKS) Dokumen LPPD Tahunan Dokumen SPM Tahunan Terselenggaranya Kerjasama Daerah	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	636,963,800
					Fasilitasi Kerjasama Daerah		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	213,035,930
				12 Bln	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Terevaluasi/Klarifikasinya Peraturan di Desa	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	999,994,400

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				25 Dok 15 Dok		Tersusunnya Perbup Tersusunnya Raperda		
				44 Kegiatan 7 Kegiatan 12 Bln		Terlaksananya Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Terlaksananya Penanganan Perkara Terlaksananya Penyuluhan Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum	1,700,000,000
				12 Bln 12 Bln		Indikator Anggaran Kegiatan Terlaksananya Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Khusus SKPD	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	550,000,000
				10 Dok	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Penyelenggraan bantuan hibah keagamaan, Pembinaan Spiritual Penghargaan tokoh masyarakat dan Peringatan Hari Besar Islam	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4,904,000,050

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				4 Dokumen		Penyelenggaraan Pembinaan sosial dalam pengajian, Bina mental ASN dan Kunjungan sosial	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	598,846,700
				3 Dok		Fasilitasi Bantuan Hibah Kemasyarakatan dan Pembinaan masyarakat dalam Aspirasi Pembangunan daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	7,097,053,250
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		2 Dok 1 Sistem	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen SSH dan ASB Jumlah Sistem SSH dan SSH	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	550,000,000
				100 Persen		Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	550,000,000
				1 Dok 1 Dok		Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan OPD Jumlah Dokumen Laporan TEPRA	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	500,000, 000
				1 Dok	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Adanya informasi data data kebutuhan dan penyedia	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	498,876,900

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						barang/jasa		
				1 Dok		Adanya informasi data perencanaan pemiilihan Rapat persiapan tender		
				1 Dok		Tersusun data Pelaporan hasil monitoring Pengadaan Barang/jasa		
				1 Aplikasi		Adanya Sistem Informasi Kontrak yang dapat dengan mudah diakses oleh stakeholder sesuai kebutuhan	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	500,000, 000
				1 Aplikasi		Adanya Sistem Informasi Manajemen Barang/Jasa Hasil		
				100 Persen		Pengadaan Jumlah penyedia yang terverifikasi di SPSE Jumlah user pengguna sistem yang terlayani		

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen		Terlaksananya Koordinasi Sinergi Stockholde terkait konstribusi Capaian Target Kerja UKPBJ Terlaksananya Pelatihan/Kompetensi untuk peningkatan SDM Jabatan Fungsional Pengadaan Terlaksananya Pembelanjaan Rutin Operasional UKPBJ Terlaksananya Pembinaa Terhadap Pelaku Pengadaan	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	601,123, 100
18	**SET DPRD**							**113,612,734,154**
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		1 Dokumen	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Dokumen Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda)	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1,725,503,000
				12 Raperda		Dokumen Raperda	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	7,226,856,000
				8		Tersosialisasika	Penyelengga	679,410,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				Raperda		nnya Raperda Prakarsa DPRD	r aan Kajian Perundang - undangan	
				8 Dokume n		Dokumen Naskah Akademik	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/K terangan dan/atau Naskah Akademik	307,880,000
				1 Dokume n		Dokumen Tata Tertib DPRD	Penyusunan Tata Tertib DPRD	670,442,000
				1 Dokume n	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Dokumen KUA & PPAS	Pembahasan KUA dan PPAS	1,188,019,000
				1 Dokume n		Dokumen KUA & PPAS Perubahan	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1,188,019,000
				1 Dokume n		Dokumen APBD	Pembahasan APBD	1,184,880,000
				1 Dokume n		Dokumen APBD Perubahan	Pembahasan APBD Perubahan	1,188,019,000
				1 Dokume n		Dokumen Laporan Semesteran	Pembahasan Laporan Semester	428,720,000
				1 Dokume n		Dokumen PP APBD	Pembahasan Pertanggung j awaban APBD	795,233,000
				72 Kegiatan Pengawa san 24 Kegiatan	Pengawasan Penyelengga raan Pemerintaha n	Terlaksananya Pengawasan DPRD Terlaksanaya Kunjungan Kerja Komisi I	Pengawasan Urusan Pemerintaha n bidang Pemerintaha n dan Hukum	385,490,000
					24 Kegiatan	Terlaksananya	Pengawasan	4,379,490,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					72 Kegiatan Pengawasan	Kunjungan Kerja Komisi IV Terlaksananya Pengawasan	Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	
				24 Kegiatan 24 Kegiatan Pengawasan		Terlaksananya Kunjungan Kerja Komisi II Terlaksananya Pengawasan	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4,373,490,000
				24 Kegiatan 72 Kegiatan Pengawasan		Terlaksananya Kunjungan Kerja Komisi III Terlaksananya Pengawasan	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	5,394,990,000
				1 Kegiatan Pengawasan		Terbahasanya Tindak Lanjut LHP BPK RI (LKPD)	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	225,640,000
				1 Kegiatan Pengawasan		Telaksananya Evaluasi Kinerja OPD	Pengawasan Penggunaan Anggaran	3,910,000
				1 Dokumen		Dokumen LKPJ Bupati Serang Akhir Tahun Anggaran 2021	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung j awaban Kepala Daerah	697,520,000
				6	Peningkatan	Terlaksananya	Bimbingan	3,081,490,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				Kegiatan	Kapasitas DPRD	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Teknis DPRD	
				12 Bulan		Terpublikasi dan terdokumentasi nya kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Publikasi dan Dokumentas i Dewan	905,520,000
				12 Bulan		Terpenuhinya Fasilitasi Tim Ahli	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	434,860,000
				12 Bulan		Jumlah pembayaran Tenaga Ahlli Fraksi	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	380,860,000
				12 Bulan		Fasilitasi Komunikasi atara DPRD, Pemeritah Daerah dan Tokoh Agama/Masyar akat	Penyelengga raan Hubungan Masyarakat	385,425,000
				1 Dokume n		Dokumen Program Kerja DPRD	Penyusunan Program Kerja DPRD	649,770,000
				1 Dokume n	Penyerapan dan Penghimpun an Aspirasi Masyarakat	Dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	905,024,000
				3 Kegiatan		Terlaksananya Kegiatan Reses DPRD	Pelaksanaan Reses	7,178,157,000
				3 Kegiatan	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Kunjungan Kerja Badan Kehormatan DPRD	Pengawasan Kode Etik DPRD	564,370,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				3 Kegiatan Pengawasan		Pengawasan Kode Etik oleh Badan Kehormatan DPRD		
				1 Kegiatan	Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi Antara Pimpinan DPRD Dengan Pimpinan AKD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	234,210,000
							Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1,904,603,000
				12 Bulan 12 Bulan		Kunjungan Kerja Pimpinan DPRD Terfasilitasinya Tugas Pimipinan DPRD	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1,332,200,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		1 Dokumen	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Renja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14,179,000
				1 Dokumen		Dokumen RKA	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	25,647,000
				1 Dokumen		Dokumen RKA Perubahan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan	24,633,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							RKA-SKPD	
				1 Dokumen		Dokumen DPA`	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	16,241,000
				1 Dokumen		Dokumen DPA Perubahan	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	16,241,000
				1 Dokumen		Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9,865,000
				1 Dokumen		Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17,780,000
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	48,612,734,154
				1 Kegiatan 1 Kegiatan		Kegiatan HUT Hari Jadi Kabupaten Serang Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten Serang	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	105,650,000
				1 Dokumen		Dokumen Laporan Keuangan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	22,740,000
				16		Dokumen	Koordinasi	12,557,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				Dokumen		Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran	dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	
				1 Dokumen		Dokumen Pelaporan dan Analisisi Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10,449,600
				1 Tahun	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Asuransi Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD dan Kendaraan Dinas Sekretariat DPRD Sewa Gudang Untuk Pengamanan Aset Sekretariat DPRD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	259,686,000
				1 Tahun	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Suku Cadang Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener a ngan Bangunan Kantor	94,640,380
				1 Kegiatan		Tersedianya Peralatan & Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapa n Kantor	242,756,430
				1 Tahun		Terpenuhinya Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	829,732,490

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				1 Tahun		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa n	210,145,000
				1 Tahun		Tersediaanya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangu ndangan	188,600,000
				1 Tahun		Penyediaan anggaran untuk Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelengga r aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	129,000,000
				1 Tahun	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Tersedianya Jasa Tenaga Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,116,720,000
				1 Tahun		Penyediaan Dana Untuk Pembayaran TagihanTelpon, Listrik dan Internet	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik	385,580,800
				1 Tahun		Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapa n Kantor	202,324,000
				1 Tahun		Penyediaan Honor Untuk Petugas Kebersihan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	230,040,000
				1 Tahun	Pemeliharaa n Barang	Terpeliharanya Kendaraan	Penyediaan Jasa	1,030,407,750

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas	Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
							Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor danBangunan Lainnya	89,980,000
				1 Tahun		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	336,364,550
				250 Stell	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	415,240,000
				50 Orang		Terhimpunnya Data Riwayat Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	251,210,000
				1 Tahun	Layanan Administrasi DPRD	Kelancaran Pekerjaan Fraksi-Fraksi DPRD	Fasilitasi Fraksi DPRD	43,800,000
				1 Tahun		Penyediaan Fasilitasi Rapat-	Fasilitasi Rapat	4,667,790,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				1 Tahun		rapat Paripurna DPRD Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Koordinasi dan Konsultasi DPRD	
19.	**INSPEKTORAT**							**22,709,892,000**
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		45 keg	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya audit kinerja	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	514.875.000
				35 keg		Terlaksananya audit keuangan	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	894.600.000
				4 lap		Terlaksananya kegiatan review DPR, LAKIP, RKPD, dan KUA PPAS	Reviu Laporan Kinerja	30.150.000
				5 lap		Terlaksananya review RKA, RKA-P, RUP, penyerapan anggaran & PBJ	Reviu Laporan Keuangan	86.875.000
				12 bln		Terlaksananya koordinasi pusat dan daerah	Kerjasama Pengawasan Internal	324.420.000
				2 keg		Terlaksananya kegiatan gelarwas, pendampingan BPK RI,	Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan	535.554.000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						tindaklanjut BPK RI, tindaklanjut Inspektorat	BPK RI dan Tindaklanjut Pemeriksaan APIP	
				5 bln	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya penanganan kasus kerugian daerah	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	76.255.000
				10 kasus		Terlaksananya audit investigatis, kegiatan monev dengan tujuan tertentu, pemeriksaan kasus indisipliner PNS, pemeriksaan kasus PBJ, pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	199.600.000
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		1 keg	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Terlaksananya rapat penyusunan program atau jadwal kerja pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	215.560.000
				2 keg		Terlaksananya kegiatan kapabilitas APIP	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	35.080.000
				12 bln	Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya pembinaan SAKIP dan SPIP	Pendampingan dan Asistensi Urusan	359.394.600

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Pemerintahan Daerah	
				12 bln		Terlaksananya penilaian PMPRB	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	251.533.600
				12 bln		Terlaksananya kegiatan korsupgah, penyuluhan anti korupsi, saber pungli dan UPPG	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	534.160.000
				2 keg		Terlaksananya kegiatan surveillance ISO dan survey penilaian integritas	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	287.878.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		2 lap	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya renja dan renstra perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.233.800
				1 lap		Tersusunnya RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.768.000
				1 lap		Tersusunnya RKA Perubahan-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.768.000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				1 lap		Tersusunnya DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	13.060.000
				1 lap		Tersusunnya DPA Perubahan-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	13.060.000
				2 lap		Tersusunnya laporan capaian kinerja	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.060.000
				1 keg		Terlakananya kegiatan survey kepuasan masyarakat	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.150.000
				12 bln	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya gaji dan tunjangan pegawai	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.709.891.967
				1 lap		Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.640.450
				1 lap		Tersusunnya laporan keuangan bulanan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester	7.637.750
				1 lap		Tersusunnya laporan realisasi	Penyusunan Pelaporan	8.291.100

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						anggaran	dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				12 bulan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya jasa jaminan barang milik daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	59.977.400
				83 org	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terkirimnya aparatur pengawas mengikuti diklat	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	394.400.000
				2 keg		Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	642.100.000
				12 bln	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya peralatan listrik/penerangan gedung kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.990.600
				29 unit		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	131.297.900
				5 unit		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	37.769.875
				12 bln		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	154.922.000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				12 bln		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	77.129.100
				12 bln		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	23.000.000
				12 bln		Terlaksananya konsultasi dan koordinasi antar pusat dan daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	153.000.000
				24 unit	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya mebelair	Pengadaan Mebel	77.326.488
				8 unit		Tersedianya alat penyimpanan perlengkapan kantor	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.500.000
				12 bln	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa surat menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000
				12 bln		Terpenuhinya sarana komunikasi dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	152.673.840

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				12 bln		Tersedianya alat tulis kantor, Tersedianya kebutuhan bahan dan alat kebersihan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	817.200.330
				12 bln	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	241.613.700
				12 bln		Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	227.052.500
				12 bln		Terpeliharanya Gedung kantor	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	196.344.000
				12 bln		Terselenggaranya pemeliharaan peralatan gedung kantor	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	44.098.000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Lainnya	
20	**BPKAD**							**21,881,811,088**
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.		7 dok	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersedianya dokumen penyusunan rencana anggaran daerah	koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	482,675,917
							koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS	432,596,000
							koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD	317,920,000
							koordinasi, penyusunan dan verfikasi perubahan RKA-SKPD	302,520,000
							koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	575,946,000
							koordinasi dan penyusunan	470,346,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	
				1 keg, 59 opd	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	terciptanya penatausahaan pembiayaan daerah yang baik, Tersedianya Anggaran Alokasi dana Desa tahun 2021, Tersedianya anggaran BHPRD untuk 326,Tersedianya Anggaran Dana Desa tahun 2021, Tersosialisasi dana transfer daerah ke opd, Terkelolanya Lembar SP2D yang baik	penatausahaan pembiayaan daerah	224,495,000
							koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi,	208,690,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dan perimbangan dan dana transfer lainnya	
							rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	175,275,000
				84 paket/dok	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersusunnya dokumen pelaksanaan akuntasi dan pelaporan keuangan daerah	koordinasi penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran	316,929,500
							koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggugjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan	472,834,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							rancangan peraturan kepala daerah tentsng penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota	
							koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	283,900,000
							penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah	120,496,000
				1 tahun	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Bantuan Tidak terduga	pengelolaan dana darurat dan mendesak	5,000,000,000
				1 keg	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah	Terlaksananya pembinaan urusan keuangan daerah di kabupaten	pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang	529,900,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					Daerah Lingkup Keuangan Daerah	serang	keungan daerah pemerintah kabupaten/kota	
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.		1 dok, 10 dok tanah 10 sertifikat 21 sk 25 bidang tanah 1 keg	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersusun dan terkelolanya barang milik daerah	penataausahaan barang milik daerah	116,480,000
							pengemanan barang milik daerah	1,500,000,000
							optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan pemusnahaan barang milik daerah	280,770,000
							rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	158,176,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		1 tahun	perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	166,140,000
							koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	6,735,000
							koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	6,700,000
							evaluasi kinerja perangkat daerah	28,755,500
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,500,000
					administrasi keuangan perangkat daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,381,811,117
					administrasi umum perangkat daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22,679,500

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99,106,000
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	215,843,500
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	217,000,000
							Fasilitasi Kunjungan Tamu	187,874,000
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	620,500,000
					pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianta barang milik daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	300
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	300
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Tersedianya jasa kebutuhan kantor	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	96,792,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					Pemerintahan Daerah		Daya Air dan Listrik	
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	413,714,620
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah urusan penunjang	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47,199,680
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	340,486,154
							Pemeliharaan Mebel	1,250,000
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17,384,000
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,360,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27,280,000
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11,750,000
21	**BAPENDA**							**43,635,308,366**
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		100 %	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Tingkat Penyelenggaraan Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	Perencanaaan Pengelolaan Pajak Daerah	399.980.000
						Tingkat Penyelenggaraan Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	504.050.000
						Tingkat Pengelolaan Data dan Informasi Pajak Deerah dan Retribusi Daerah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	501.335.000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						Tingkat Pelaksanaan Pendataan dan Pendaftaran PBB P2	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	571.256.200
						Tingkat Pelaksanaan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah Lainnya	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	727.420.000
						Tingkat Ketercapaian Surat Ketetapan Pajak Daerah yang Ditetapkan	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	261.311.200
						Persentase Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah	Penetapan Wajib Pajak Daerah	721.164.800
						Tingkat Penyelenggaran Pemeriksaan Pajak Daerah	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	447.308.600
						Tingkat Penyelenggaraan Penelitian dan Verifikasi Pajak Daerah	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	125.500.000
							Penagihan	380.634.800

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Pajak Daerah	
							Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	57.080.000
							Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	222.987.800
							Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	59.549.600
							Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah	107.955.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		100 %	Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase dokumen perencanaan dan pelaporan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45.470.000
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	62.952.000
							Evaluasi	183.630.000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Kinerja Perangkat Daerah	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase dokumen pelaporan keuangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34.635.308.366
							Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.000.000
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	3.770.000
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase kebutuhan administrasi perkantoran tepat waktu	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	46.107.100
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	183.877.240
							Penyediaan Bahan Logistik	196.285.740
							Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	116.628.000
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	18.000.000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Perundang-undangan	
							Fasilitasi Kunjungan Tamu	
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	688.824.000
					Pengadaan Barang Miik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan mebeleur	Pengadaan Mebel	43.480.000
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Administrasi Kebutuhan kantor tepat waktu	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000
						Presentase partipasipasi Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Keagamaan, Daerah dan Nasional	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	954.182.456
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	660.667.583
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha	Presentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	415.696.881

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					n Daerah		Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
							Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	94.260.000
							Pemeliharaa n/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	93.296.000
							Pemeliharaa n/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	95.340.000
22	**BAPPEDA**							**17,100,000,000**
		PROGRAM PERENCANA AN, PENGENDAL IAN DAN EVALUASI PEMBANGU NAN DAERAH		100	Pengendalia n, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembanguna n Daerah		Koordinasi Pengendalia n Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangun an Daerah Di Kabupaten/K ota	170,110,000
							Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan	177,220,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Berkala Pelaksanaan Pembangun an Daerah	
					Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangun an Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	377,990,000
				1 keg			Pelaksanaan Konsultasi Publik	9,460,000
							Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	163,448,000
							Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/K ota	146,546,667
							Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	50,300,000
							Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangun an Daerah Kabupaten/K ota	296,000,000
					Analisis Data dan		Analisis Data dan	185,599,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
							Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	76,529,700
							Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	201,264,000
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		12 bulan 7 kali/kegiatan	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pelaksanaan perjalanan dinas Pelaksanaan rapat koordinasi	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	164,000,000
				7 kali/kegiatan		Pelaksanaan rapat asistensi	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	70,000,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				4 kali/kegiatan 12 bulan 4 kali/kegiatan		Pelaksanaan monitoring Pelaksanaan perjalanan dinas Pelaksanaan rapat evaluasi	Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	114,000,000
				3 kali/kegiatan 12 bulan		Fasilitasi program prioritas nasional / provinsi bidang pemerintahan (rapat, sosialisasi, FGD) Pelaksanaan perjalanan dinas	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	20,000,000
				12 bulan 12 kali/kegiatan		Pelaksanaan perjalanan dinas Pelaksanaan rapat koordinas	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	166,203,000
				7 kali/kegiatan		Pelaksanaan rapat asistens	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	138,838,800

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
				4 kali/kegiatan 12 bulan 4 kali/kegiatan		Pelaksanaan monitoring Pelaksanaan perjalanan dinas Pelaksanaan rapat evaluasi	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	120,400,000
				28 kali/kegiatan 12 bulan		Pelaksanaan fasilitasi program prioritas nasional/ provinsi bidang pembangunan manusia (rapat, sosialisasi, FGD) Pelaksanaan perjalanan dinas	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	170,000,000
				12 bulan 17 kali/kegiatan	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Pelaksanaan perjalanan dinas Pelaksanaan rapat koordinasi	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan	196,188,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							RKPD)	
				12 kali/kegiatan		Pelaksanaan rapat asistensi	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	99,700,000
				6 OPD 12 bulan 8 kali/kegiatan		Pelaksanaan monitoring Pelaksanaan perjalanan dinas Pelaksanaan rapat asistensi	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	96,340,000
				20 kali/kegiatan 12 bulan		Pelaksanaan fasilitasi program prioritas nasional/ provinsi bidang perekonomian (rapat, sosialisasi, FGD) Pelaksanaan perjalanan dinas	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	134,175,000
				12 bulan		Pelaksanaan perjalanan dinas	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	109,580,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				17 kali/kegiatan		Pelaksanaan rapat koordinasi	Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				12 kali/kegiatan		Pelaksanaan rapat asistens	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	42,280,000
				2 OPD 12 bulan 8 kali/kegiatan		Pelaksanaan monitoring Pelaksanaan perjalannan dinas Pelaksanaan rapat evaluasi	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	81,175,000
				30 kali/kegiatan 12 bulan		Pelaksanaan fasilitasi program prioritas nasional/provinsi bidang SDA (rapat, sosialisasi, FGD) Pelaksanaan perjalanan dinas	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	97,950,000
				6 Kegiatan	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyusunan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	150,000,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					dan Kewilayahan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD) Bidang Infrastruktur	Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				4 Kegiatan		Terlaksananya Rapat Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (Renja OPD) Bidang Infrastruktur	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	50,000,000
				4 Kegiatan		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (Renja OPD) Bidang Infrastruktur	Pelaksanaan Monitoring danEvaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	75,000,000
				7 Kegiatan		Terlaksananya Program Kegiatan Prioritas Nasional dan Provinsi Bidang Infrastruktur	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	384,474,000
				6 Kegiatan		Terlaksananya Rapat Koordinasi	Koordinasi Penyusunan Dokumen	150,000,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD) Bidang Kewilayahan	Perencanaan Pembangun an Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD,RPJM D dan RKPD)	
				4 Kegiatan		Terlaksananya Rapat Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (Renja OPD) Bidang Kewilayahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangun an Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	50,000,000
				4 Kegiatan		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencananaan Pembangunan Perangkat Daerah (Renja OPD) Bidang Kewilayahan	Pelaksanaan Monitoring danEvaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangun an Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	75,000,000
				4 Kegiatan		Terlaksananya Program Kegiatan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Bidang Kewilayahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangun an Daerah Bidang Kewilayahan	331,035,500
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBA		Sangat inovatif	Penelitian dan Pengemban gan Bidang		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian	93,070,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		NGAN DAERAH			Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	
							Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	111,623,000
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	140,130,000
							Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	138,829,900
							Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	142,000,000
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan		Penelitian dan pengembangan Perindustrian dan	137,340,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					Pembangunan		Perdagangan	
							Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	188,400,000
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	289,756,000
							Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif	180,775,000
							Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	194,370,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		1 dok	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dok. Renja PD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	64,358,000
				1 dok		Tersusunnya LKIP PD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	77,118,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				1 dok		Tersusunnya LPPD PD	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,501,559,119
				1 laporan		Tersusunnya laporan keuangan PD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	62,691,000
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0
				12 bulan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan peralatan listrik dan penerangan kanto	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9,760,000
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0
					12 bulan	Tesedianya kebutuhan ATK	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65,553,200
					12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan penggandaan, fotokopi dan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa	55,475,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						barang cetak	n	
				12 bulan		Terbayarnya tagihan koran bulanan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	90,000,000
				12 bulan		Tersedianya kebutuhan mamin tamu dan air galon	Fasilitasi Kunjungan Tamu	51,694,800
				12 bulan 1 tahun		Terlaksananya perjalanan dinas Tersedianya mamin rapat	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	434,952,000
				1 tahun 12 bulan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terbayarnya jasa publikasi Terbayarnya tagihan telepon dan internet kantor	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	379,511,200
				12 bulan 2 kegiatan		Terbayarnya jasa pramubakti dan pengemudi Terlaksananya dukungan kegiatan PHBI dan PHBN	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	248,690,000
				12 bulan 1 tahun	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terbayarnya BBM bulanan bagi pemegang kendaraan dinas/ operasional jabatan Terbayarnya pajak kendaraan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	274,822,500

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				1 tahun		dinas/ operasional jabatan Terpenuhinya servis rutin kendaraan dinas/ operasional jabatan	Jabatan	
				12 bulan		Telaksananya perawatan dan pemeliharaan peralatan kantor	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59,627,500
				12 bulan 12 bulan		Terbayarnya jasa petugas kebersihan kantor Tersedianya kebutuhan bahan dan peralatan kebersihan kantor	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	167,087,114
23	**BKPSDM**							**25,745,090,023**
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		6,90 persen	Pengembangan Kompetensi Teknis	Terselenggarnya pengembangan Diklat / Klinik Kompetensi (500 Orang)	Penyelenggaraan Pengembangan kompetensi teknis umum. Int., dan pilihan bagi Jabatan Administrasi penyelenggara unsur pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah	20.000.000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Penunjang Urusan Pemerintahan Umum	
					Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terselenggaranya Diklat Teknis Pejabat fungsional pola pengiriman(34 Orang) Terselenggaranya Pelatihan Prajabatan (262 Orang)	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimbinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	2.185.212.000
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Analisa kebutuhan pengembangan kompetensi ASN (1 Dokumen)	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, dan Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengmbangan Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengmbang	52.384.000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							an Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Piminan Tinggi, Kepemimpin an, dan Prajabatan	
		PROGRAM KEPEGAWAI AN DAERAH		95,5 persen	Mutasi dan Promosi ASN	Tercapainya kualitas ASN yang mutasi masuk ke Kabupaten Serang (20 Orang)	Pengelolaan Mutasi ASN	28.385.000
				94 persen		Terlaksananya Kenaikan Pangkat ASN 1 tingkat lebih tinggi (2.100 Orang)	Pelayanan kenaikan pangkat ASN	393.555.000
				1.000 Orang		Terlaksananya seleksi dan mutasi JPT, promosi dan mutasi jabatan dalam jabatan fungsional, Infasing JF, perpindahan Jabatan, dalam JF, pemberhentian JF, pengangkatan Kembali JF	Pengelolaan Promosi ASN	705.123.200
				9.311 Pegawai	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terpenuhi target kinerja Aparatur	Penilaian dan Evaluasi Kenerja Aparatur	99.800.000
				300		PNS yang telah	Pengelolaan	140.925.000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				Pegawai		mengabdi 10, 20 s.d 30 tahun	Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	
				60 OPD		Melaksankan Bimbinaan dan pembekalan Pegawai tentang aturan disiplin ASN	Pembinaa Disiplin ASN	60.000.000
				99,9 Persen		Terlaksananya penyelesaian ASN yang melakukan pelanggaran disiplin	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin PNS	59.560.000
				40 Pegawai		Terbitnya keputusan ijin perceraian ASN	Pelayanan Proses Izin Perceraian	9.900.000
				60 OPD		Terlaksanya pemantauan disiplin ASN (	Evaluasi Disiplin ASN	14.900.000
				1 Dokumen	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Diperolehnya dokumen usul kebutuhan ASN yang akurat	Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksaan pengadaan ASN	26.126.000
				8.500 Pelamar		Diperolehnya ASN hasil seleksi yang berkualitas dan berintegritas	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PKKK	1.461.634.600
				475 Orang		Terbitnya SK Pensiun BUP, Meninggal Dunia Uzur dan APz	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemebrhentian	113.585.000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				1 Aplikasi		Terlaksanya Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan aplikasi pelayanan dan Informasi kepegawaian	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	18.000.000
				1.704 Orang		Terlaksananya Kegiatan Entry data dan Update perubahan mutasi kepegawaian	Pengelolaan data kepegawaian	83.730.000
				(100 Orang 320 Orang		Terlaksananya kegiatan Bimtek pengelolaan dan pelatihan aplikasi pelayanan kepegawaian Terlaksanya proses usul Karis, Karsu Karpeg dan cetak Id Card PNS	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informsi Kepegawaian	195.000.000
				100 Orang	Pengembangan Kompetensi ASN	Pemberian ijin belajar dan penyesuain golongan sesuai dengan ijazah bagi ASN	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	32.540.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		4 Dokumen	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja OPD	Terlaksananya Penyusunan Renja Perangkat Daerah (RKA, DPA, RKAP dan	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	41.610.000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						DPPA)		
				3 Dokumen		Tersusunnya LKIP, CaLK, LPPD	Kordinasi dan penyususnan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja OPD	9.204.400
				1 Dokumen		Tersedia Dokumen Survey Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.665.000
				14 Bulan (6 Bulan)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pembayan gaji dan tunjangan ASN BKPSDM 45 orang Terlaksananya Pembayan gaji dan tunjangan CPNS 210 Org, PPPK Non Guru 38 orang	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.450.000.000 8.295.090.245
					(12 Bulan)	Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	35.860.000
				12 Bulan 1	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkan Daerah	Tersedianya Jasa Keamanan Kantor (honor penjaga malam 2 orang) Terselenggaran	Pengamanan Barang Milik Daerah	56.160.000 200.000.000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				Kegiatan		g Mobilisasi peralatan dan perlengkapan kantor ke tempat baru (Pusat Pemerintahan Kab. Serang di Kec. Ciruas)		
				12 Bulan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Komponen Instalasi listrik/penerang an bangunan kantor	Peyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor	13.119.600
				24 Unit		Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan perlengkapa n Gedung kantor	215.166.000
				12 Bulan		Penyediaan Makanan Minuman dan Alat Tulis Kantor	Penyediaan bahan logistik kantor	162.222.500
				12 Bulan		Terpenuhinya Kebutuhan barang cetakan dan penggadaan	Penyediaan Barang Cet8 kan dan Penggandaa n	127.740.700
				12 Media/b ulan		Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.000.000
				10 Bulan		Terpenuhinya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Penyelengga raan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi	180.000.000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							SKPD	
				12 Bulan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Jasa Pramubakti Perangkat Daerah (2 orang)	Penyediaan Jasa surat menyurat	54.360.000
				12 Bulan 12 Bulan		Terpenuhinya jasa penyediaan telepon, internet dan listrik Terpenuhinya Penyediaan Publikasi Prioritas Pembangunan Daerah melalui media Cetak, Elektronika dan Online	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	425.724.400
				12 Bulan		Terlaksananya Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Pengadaan Jasa Peralatan dan Perlengkapa n Kantor	80.143.200
				12 Bulan 1 Kegiatan 1 Kegiatan		Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya penyelenggaraa n Anyer Krakatau Culture Festival Terlaksananya penyelenggaraa	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	272.957.293

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						n kegiatan MTQ Tingkat Kabuapaten		
				1 Kegiatan		Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan HUT Kabupaten Serang		
				1 Kegiatan		Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan Keagamaan Maulid Nabi		
				10 Bulan		Terselenggaranya Kegiatan Rapat-Rapat, kordinasi dan konsultasi Dalam Daerah		
				12 Bulan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan pembayaran pajak Kendaraan Dinas/Oprasional	Penyedia jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional Lapangan	367.226.655
				1 Paket		Terlaksannya kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.840.230

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
24	**DISKOMINFO SANTIK**							**15,799,107,033**
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		1. 92% 2.100%	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	127.800.000
							Pengelolaan Media Komunikasi Publik	885.167.800
							Pelayanan Informasi Publik	228.312.000
							Layanan Hubungan Media	1.958.510.000
							Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	320.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		100%	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	56.840.000
							Penatalaksan	

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							aan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.225.000
							Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	167.665.000
					Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah	3.600.000.000
							Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	342.000.000
							Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	463.270.000
		PROGRAM PENYELENG		Ada	Penyelenggaraan Statistik	Terlaksananya Kegiatan	Koordinasi dan	151.100.000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		GARAAN STATISTIK SEKTORAL			Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	
							Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	78.900.000
							Pengembangan Infrastruktur	115.000.000
							Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	200.000.000
							Membangun Metadata Statistik Sektoral	105.000.000
							Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	110.000.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK		100%	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar	Terlaksananya Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah	105.000.000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		PENGAMANAN INFORMASI			Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Daerah Kabupaten/Kota	
					Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	120.000.000
							Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	105.000.000
							Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	110.000.000
							Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi	150.000.000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.850.000
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.728.800
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.599.107.033
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	28.080.000
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	9.000.000
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.388.282
							Penyediaan	

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Peralatan dan Perlengkapan Kantor	271.580.000
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.193.230
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	87.587.000
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.082.088
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	14.400.000
							Penyediaan Bahan/Material	66.352.600
							Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.500.000
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	331.500.000
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Pengadaan Mebel	144.180.000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						Pemerintah Daerah		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	153.360.000
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	157.640.000
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	246.030.000
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.150.000
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.608.200
25.	**DISDUKCAPIL**							**18,730,771,326**
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Inovasi Pelayanan (Aplikasi Pendaftaran melalu mendia	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	190,680,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				99% 88% 40%		online berbasis android dan Mesin Adm Kependudukan dan Pencatatan Sipil)		
						Cakupan pelayanan penduduk rentan administrasi kependudukan Cakupan pelayanan penduduk Non permanen administrasi kependudukan Jadwal Operasi Yustisi	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	25,920,000
						Jumlah Pelayanan prima Jemput Bola dokumen kependudukan ke Desa dan Kecamatan.	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	12,500,000
						Terlaksananya Pemukhtahiran Kartu Keluaraga	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	53,971,000
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL		95,75%	Pelayanan Pencatatan Sipi	Jumlah Pelayanan prima Jemput Bola dokumen kependudukan ke Desa dan	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	12,500,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						Kecamatan		
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		100 % 25%	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Tersedia nya dan terpeliharanya sarana dan prasaran infrastruktur jaringan komunikasi data dan perangkat luna dalam pelayanan administrasi kependudukan	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	249,225,000
						Tertatanya dan terlindungi dokumen Data Pribadi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dokumen pendukung	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	62,180,000
						Persense OPD/Lintas sektoral yang memanfaatkan data kependudukan (PKS)	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	29,450,000
						Pengembangan /pelatihan sumber daya manusia dalam penggunaan teknologi informasi kependudukan	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependuduk	316,560,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							an	
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		200 Buku	Penyusunan Profil Kependudukan	Terkelolanya dan tersajinya data Kependudukan dan pencatatan Sipil	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	50,680,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		100 %	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunya Lap. Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.500.000
				100 %		RKA, DPA,Renja dan Forum OPD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	82.180.000
				100 %	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarkannya Gaji Pegawai	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.330.771.326
				100 %		Tersedianya Kebutuhan operational UPTD	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.973.006.480
				100 %	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Dana Pembayaran Iuran Perizinan Kendaraan Dinas/Operational	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	304.195.300

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				100 %		Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor yang baik dan terpelihara	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	155.330.000
				100 %		Terbayarnya Asuransi Mobil Operational dan Mobil Pelayanan	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	38.500.000
				100 %	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya alat-alat penerangan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.224.050
				100 %		Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	207.146.400
				100 %		Tersedianya Alat Tulis Kantor dukcapil	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	314.834.770
				100 %		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan penunjang kegiatan kantor	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	74.498.700
				100 %		Tersedianya	Fasilitasi	38.800.000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu	Kunjungan Tamu	
				100 %		Terselengaranya Kegiatan Perjalanan dinas luar daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	284.430.000
				100 %		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dukcapil	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	23.200.000
				100 %	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa komunikasi, listrik, telp, sms gateway (pelayanan) dan jaringan internet	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	339.881.600
				100 %		Terpeliharanya peralatan gedung kantor (Komputer, laptop, printer, dan isi tabung pemadam kebakaran)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.418.700
				100 %		Terbayarkanya jasa kebersihan,keamanan, pramubakti, supir kantor dukcapil	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	454.188.000
26	**DPKD**							**6,955,732,155**
		PROGRAM		1000	Pengelolaan		Pemeliharaa	26.190.000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		PENGELOLAAN ARSIP		BOOKS	Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota		n dan penyusutan arsip dinamis	
				30 Desa			Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis	40.000.000
				2 Depo Arsip	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/ Kota		Akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	38.810.000
				29 Kecamatan	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota		Pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota	25.000.000
				10 OPD			Penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN	20.000.000
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		2 arsip bersejarah di kabupaten serang	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/ Kota	Terautentikasinya arsip statis dan arsip hasil alih media kabupaten/kota	Penilaian dan penetapan autentisitas arsip statis sesuai persyaratan penjaminan	50.000.000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							keabsahan arsip	
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		1000 pengunjung	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terkelolanya perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota	Pengembangan perpustakaan di tingkat daerah kabupaten/kota	450.000.000
				30 peserta			Pembinaan perpustakaan khusus tingkat kabupaten/kota	43.000.000
				21 peserta lomba perpustakaan/ 40 peserta pelatihan tenaga perpustakaan/30 orang peserta seminar perpustakaan			Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota	71.000.000
				2 ruang perpustakaan/ 946 buku rstorasi / 20.000 lembar E-book			Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka	395.792.900
				1 kegiatan			Penyusunan data dan informasi perpustakaan, tenaga	8.400

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota	
				40 orang	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/Kota	Terciptanya budaya gemar membaca tingakt daerah kab/kota	Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat	29.112.000
				30 sd/mi smp/Mts			Pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca	56.888.000
				1 kegiatan			Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial	8.400
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80,000,000
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,234,913,830
							Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	130,000,000
					Administrasi		Penyediaan	10,000,500

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					Umum Perangkat Daerah		Komponen Instalasi Listrik/Pener a ngan Bangunan Kantor	
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapa n Kanto	107,885,000
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50,003,500
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa n	19,096,400
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangu ndangan	19,500,000
							Penyelengga r aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	225,500,000
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	330,000,000
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan	260,010,200

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Listrik	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	203,088,500
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19,930,000
							Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	19,994,525
27	**SATPOL PP**							**17,373,381,781**
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		80 orang	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan PeraturanBupati/Wali Kota	176,000,200
				24 giat			Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kot	60,000,000
				35 giat			Penanganan atas Pelanggaran	174,961,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
				51 orang	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota		Pengembang an Kapasitas dan Karier PPNS	252,461,500
				12 giat	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	406,410,000
							Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan	1,064,960,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
							Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	27,513,000
							Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	72,360,000
					Penanganan Gangguan Ketenterama n dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Koordinasi Penyelengga r aan Ketentraman danKetertiba n Umum serta Perlindunga n Masyarakat Tingkat Kabupaten/K ota	74,982,000
				6 giat			Pemberdaya	1,419,896,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				44 giat 669 orang			a n Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	
				44 orang 75 orang			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	348,133,000
				1 paket			Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	43,389,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		2 dokumen	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	168,720,800
				1			Koordinasi	23,978,500

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				dokumen			dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				1 dokumen			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25,000,000
				3 giat	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,350,382,079
				100 %			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	149,962,000
				12 bulan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	929,760,000
				12 bulan	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	11,113,000
				12 bulan			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	71,481,200
				15 item			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	48,498,600

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				12 bulan			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	24,000,000
				12 bulan			Fasilitasi Kunjungan Tamu	168,635,000
				12 bulan			Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	680,197,000
				11 iteam	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Dinas Kesehatan Kab. Serang	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	295,751,780
				12 bulan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terbayarkannya pemakaian telepon, listrik, air dan internet Terbayarkannya Publikasi Program Pembangunan Prioritas	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	349,334,142
				12 bulan		Terbayarkanya jasa kebersihan,keamanan, pramubakti, supir kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	350,172,000
				12 bulan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaa	200,089,980

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					Pemerintahan Daerah		n dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				12 bulan			Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan	223,310,000
				12 bulan			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65,790,000
				12 bulan			Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	116,140,000
28	**BPBD**							**16,917,810,504**
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMA		100 %	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	297.658.000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		TAN NON KEBAKARAN			Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		
							Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.279.111.000
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	563.238.056
					Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Terlaksananya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	240.875.000
					Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Terlaksana Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	77.627.450
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		100 %	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana	-	-

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota		
					Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	56.638.000
							Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	507.891.950
							Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	297.277.500
					Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1.833.748.000
							Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	360.916.500
					Penataan Sistem Dasar Penanggulan	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi	Kerjasama antar Lembaga	375.324.000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					gan Bencana	Korban Bencana Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		100 %	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan forum perangkat daerah dan tersusun nya dokumen2 perencanaan OPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	65.910.000
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	155.940.000
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.917.810.496
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	64.800.000
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.613.800
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88.603.016

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	106.117.800
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	52.738.950
							Fasilitasi Kunjungan Tamu	85.975.000
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	327.035.000
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.313.250
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	162.360.000
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	52.300.000
							Penyediaan Jasa	368.691.100

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	697.269.800
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	489.180.000
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	247.826.836
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	115.020.000
29	**KESBANGPOL**							**12,480,315,780**
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI	Persentase partai politik yang	100%	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan		Penyusunan Program Kerja di Bidang	0

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	difasilitasi		Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
							Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,	312,049,800

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	
							Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	2,947,617,500
							Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya	260,700,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
							Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum	394,904,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pembinaan organisasi kemasyarakatan	100%	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	0
							Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	0
							Pelaksanaan Kebijakan dibidang	148,340,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
							Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	131,956,000
							Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing	29,300,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							di Daerah	
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan kelompok yang dibina tentang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	234,470, 000
							Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	46,163,000
							Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran	100,305,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
							Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaa	41,140,000
							Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL	Persentase konflik sosial terselesaikan	100%	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaa		Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini,	0

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			n Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
							Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaa	149,640,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							n, serta Penanganan Konflik di Daerah	
							Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaa n Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaa n Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaa n Bidang Kewaspadaa n, serta Penanganan Konflik di Daerah	121,237,700
							Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaa n Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaa	252,160,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							n Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaa n Bidang Kewaspadaa n, serta Penanganan Konflik di Daerah	
							Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaa n Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaa n Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaa n Bidang Kewaspadaa n, serta Penanganan Konflik di Daerah	27,000,000
							Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	67,020,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase kelompok masyarakat yang dibina terkait narkoba, kerukunan umat beragama dan kepercayaan	100%	Perumusan Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, social dan budaya		Pelaporan di bidang Ketahanan,Ekonomi,social,budaya dan fasilitas pencegaahan penyalagunaan Narkotika,Fasilitasi Kerukunan Umat Bergama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0
							Pelaksanaan kordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi,Sosial,Budaya da fasilitsi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah	164,328,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Pelaksanaan Kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi,Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah	108,975,000
							Penyusunan bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, social, budaya dn faslitasi pencegahan Penyalagunaan narkotika,fasilitasi kerukunan Umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	272,275,000
							Penyusunan program	

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							kerja di bidang ketahaan ekonomi,social,budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika,fasilitasi Kerukunan Umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		6 Kegiatan	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	Pelaksanaan Pembentukan dan Penyusunan Program Kerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Di Kabupaten Serang	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	234,470,000
				3 Kegiatan		Pembentukan Kader Bela Negara (KBN) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) serta Bimtek Penguatan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter	46,163,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						Komitmen Kebangsaan Melalui Peningkatan Kesadaraan Bela Negara	Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
				4 Kegiata		Pelaksanaan Sosialisasi nilai-nilai ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan bagi ASN, Ormas dan Pelajar di Kabupaten Serang	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100,305,000
				4 Kegiatan		Fasilitasi Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) Tingkat Kabupaten Serang	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	41,140,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		3 Dok	**Perencanaan, Penganggaran, dan**	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan SKPD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50,490,300

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		DAERAH KABUPATEN /KOTA			**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			
				1 Tahun		Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Profesionalisme Pelayanan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67,059,000
				1 Tahun	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,594,530,780
				30 Stell	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terpenuhinya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	151,500,000
				1 Tahun		Terpenuhinya Peningkatan SDM Pegawai pada Badan Kesbangpol	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60,000,000
				1 Tahun	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	6,464,000
				1 Tahun		Tersedianya Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59,856,250
				1 Tahun		Tersedianya	Penyediaan	34,061,150

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga	
				12 Bulan		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kanto	16,168,400
				12 Bulan		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa n	16,784,800
				12 Bulan		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangunda ngan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangu ndangan	3,600,000
				1 Tahun		Terfasilitasinya Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	35,352,000
				1 Tahun		Terlaksananya Penyelenggaraa n Rakor dan Konsultasi SKPD	Penyelengga r aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	212,580,000
				1 Tahun		Terpenuhinya Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintaha n Berbasis Elektronik pada SKPD	69,100,000
				1 Unit	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	Tersedianya Kendaraan Dinas Jabatan Esselon II	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	462,063,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					Pemerintah Daerah		Jabatan	
				6 Unit		Terpenuhinya Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 dan Roda 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0
				1 Tahun		Tersedianya Kebutuhan Mebeulair	Pengadaan Mebel	59,030,500
				1 Tahun		Terpenuhinya Sewa Bangunan Gedung Kantor	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100,000,000
				1 Tahun		Tersedianya Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	68,461,200
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah a n Daerah	Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8,736,000
						Tersedianya Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33,768,000
						Peningkatan Profesionalisme Pelayanan SKPD	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	273,744,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
			1 Tahun		**Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah a n Daerah**		Penyediaan Jasa Pemeliharaa n , Biaya Pemeliharaa n dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabata	56,410,000
			1 Tahun				Penyediaan Jasa Pemeliharaa n , Biaya Pemeliharaa n , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	230,975,400
	KECAMATAN							
1.	**KECAMATAN ANYER**							**4,999,625,680**
		PROGRAM PENYELENG GARAAN PEMERINTA HAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100 %	Koordinasi Penyelengga raan Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya intensifikasi dan ektensifikasi PBB	Koordinasi/S inergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintaha n dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	32,220,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Terkait	
				100 % 100 % 100 % 100 %	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya dukungan penyelenggaraan kegiatan AKCF Terlaksananya kegiatan isbath nikah Terlaksananya kegiatan pengelolaan persampahan di Kecamatan Terlaksananya penyelenggaraan pekan olah raga kabupaten	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1,391,000,000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100 %	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Musrenbang di Kecamatan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	24,370,000
				100 % 100 %		Terlaksananya dukungan Penyelenggaraan Kabupaten Serang Sehat Terlaksananya kegiatan Sosialisasi dan Penguiatan kelembagaan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	81,716,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				100 %		P2TP2A Terlaksananya pembinaan PKK Kecamatan		
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100 % 100 %	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya pembinaan trantibum diwilayah kecamatan Terlaksananya rapat koordinasiv muspika Kecamatan Anyar	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	28,890,000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, PelestarianBhinneka Tunggal Ika	69,100,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							serta Pemertahan a n dan Pemeliharaa n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
				100 % 100 % 100 %		Terlaksananya kegiatan keagamaan Terlaksananya Kegiatan MTQ Terlaksananya Kegiatan Tarawih Keliling	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	84,650,000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100 %	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Bimtek, Pembinaan, monitoring dan Evaluasi Dana Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100,000,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN		100 %	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Anyar	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,699,625,680

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		/KOTA						
				100 %	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerang an bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener a ngan Bangunan Kantor	11,344,00
				100 %		Terpenuhinya Kebutuhan PeralatanRuma h Tangga Kantor	Penyediaan Peralatan RumahTang ga	11,484,000
				100 %		Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21,957,800
				100 %		Terpenuhinya Kebutuhan barang cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa n	10,021,000
				100 %		Terpenuhinya bahan bacaan dan tagihan langganan koran kantor kecamatan anyar	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangu ndangan	3,600,000
				100 %		Terpenuhinya Penyediaan makanan dan minuman kunjungan tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20,000,000
				100 % 100 % 100 %		Terlaksananya kegiatan rapat rapat ,koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Terlaksananya Kegiatan rapat	Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64,020,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						rapat,koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhunya Makanan dan minuman rapat rapat di kecamatan		
				100 %	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Mebeler Kantor	Pengadaan Mebel	10,565,000
				100 %		Tersedianya infocus,laptop	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52,839,900
				100 %	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhininya kebutuhan tagihan listrikdan internet kantor	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik	28,926,000
				100 %		Terpenuhinya honorarium Pramubakti di Kecmatan Anyar	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	102,000,000
				100 % 100 %	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-Terpenuhinya Pemeliharaan kendaraan dinas perorangan/jabatan -Tersedianya biaya pajak kendaraan dinas perorangan/jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	89,936,300
							Pemeliharaa	11,160,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							n Peralatan dan Mesin Lainnya	
				100 %		Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya di lingkungan	Pemeliharaa n /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50,200,000
2.	**Kecamatan Bandung**							**3,412,625,680**
		PROGRAM PENYELENG GARAAN PEMERINTA HAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Koordinasi Penyelengga raan Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan		Koordinasi/S inergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintaha n dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	27,608,400
					Pelaksanaan Urusan Pemerintaha n yang Dilimpahkan kepada Camat		Pelaksanaan Urusan Pemerintaha n yang terkaitdenga n Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	86,681,000
		PROGRAM PEMBERDAY AAN MASYARAK AT DESA DAN KELURAHAN			Koordinasi Kegiatan Pemberdaya an Desa		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangun	20,775,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							an di Desa	
							Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	74,015,000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahan a n dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	46,200,000
							Pembinaan Kerukunan Antarsuku	98,986,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100,000,000
							Fasilitasi Penyelenggar aan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15,550,500
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,397,559,091
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15,085,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa n	6,600,000
							Fasilitasi Kunjungan Tamu	43,054,000
							Penyelengga r aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	126,200,000
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	110,982,335
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21,357,600
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	145,800,000
					Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah		Penyediaan Jasa Pemeliharaa n , Biaya Pemeliharaa n dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	62,406,510

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Jabatan	
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainny	4,800,000
							Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8,965,244
3.	**KECAMATAN BAROS**							**5,145,405,754**
		PROGRAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100 %	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tercapainya pembayaran pajak PBB	Koordinasi/Si nergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	18,948,000
				70 Buku 14 Desa 14 desa 2 Kegiatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terbitnya buku nikah peserta istbat Terlaksananya kegiatan gotong royong Terlaksananya kegiatan persampahan Tersedianya anggaran sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraa	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1,251,940,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						n HUT Kabupaten dan AKCF		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1 Kegiatan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tersusunnya usulan rencana pembangunan di wilayah Kecamatan Baros	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangun a n di Desa	43,600,000
				11 Bulan 1 Kegiatan 11 Bulan		Terbinanya kader PKK Kecamatan dan Desa Terfasilitasinya kegiatan P2TP2A Terfasilitasinya kegiatan serang sehat tingkat kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	87,039,000
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		1 Kegiatan	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya kegiatan pembinaan trantibum (linmas) tingkat kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	9,986,000
				1 Kegiatan		Terlaksananya kegiatan penyuluhan	Harmonisasi Hubungan Dengan	9,986,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						tentang	Tokoh Agama dan Tokoh	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		1 Kegiatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya kegiatan HUT R	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	58,387,500
				1 Tahun 1 Kegiatan		Terlaksananya kegiatan keagamaan di Kecamatan Tersedianya anggaran sebagai bentuk	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan	135,689,500

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						dukungan terhadap penyelenggaraan MTQ	Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasiona	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		1 Tahun	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya administrasi tata pemerintahan desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100,000,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,020,405,754
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0
				2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 1 Unit	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Alat Pendingin (AC) Laptop Lemari Arsip PC All in One Printer Scanner	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43,720,372

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				1 Tahun		Tersedianya alat tulis kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kanto	18,153,877
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa n	4,415,000
				1 Tahun		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangunda ngan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangu ndangan	3,600,000
				1 Tahun		Tersedianya makanan dan minuman tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2,416,000
				1 Tahun 1 Tahun		Tersedianya makanan dan minuman rapa Terselenggaran ya rapat koordinasi dan konsultasi	Penyelengga r aan Rapat Koordinasida n Konsultasi SKPD	35,184,000
				1 Tahun	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya mebeleu	Pengadaan Mebel	8,155,000
				12 Bulan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Terbayarkannya tagihan listrik, PDAM dan internet	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22,087,248
				12 Bulan		Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan	177,120,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						(Tenaga pramubakti, tenaga kebersihan, tenagakeamanan)	Umum Kantor	
				9 Unit 9 Bulan 9 Unit	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terbayarkannya pajak kendaraan dinas jabatan Tersedianya anggaran jasa service dan suku cadang Tersedianya BBM dan Pelumas	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90,917,888
				1 Tahun		Terpeliharanya peralatan kantor	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,300,000
				1 Tahun		Terpeliharanya gedung kantor	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2,354,615
4.	**KECAMATAN BINUANG**							**3,354,405,680**
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100 %	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tercapainya target penerimaan pajak pedesaan	Koordinasi/Si nergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	16,783,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Perangkat Daerah dan Instansi VertikalTerkait	
				100 % 100 % 100 % 100 %	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Meningkatkan kesehatan jasmani bagi kehidupan masyarakat Meningkatkan Pengetahuan Budaya Kabupaten Serang Meningkatkan wawasan masyarakat dibidang kebudayaan kabupaten serang Tercapainya peningkatan buku nikah bagi masyarakat kecamatan binuang	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	153,236,000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESADAN KELURAHAN		100 %	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terpenuhinya pembangunan infrastruktur masyrakat desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangun a n di Desa	28,690,400

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				100 %		Meningkatkan kesehatan bagi kehidupan masyarakat	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdaya a n Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	14,880,000
				100 % 100 %	Tercapainya Kegiatankegiatan PKK Kecamatan Terciptanya pelayanan pengaduan kekerasan perempuan dan anak		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdaya a n Masyarakat di Wilayah Kecamatan	92,004,200
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100 %	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat kecamatan binuang	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	9,757,000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100 %	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Menumbuhkembangkan daya ingat masyarakat terhadap jasa para pahlawan	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka	20,055,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Memantapk a n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUnd ang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahan a n dan Pemeliharaa n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
				100 % 100 % 100 %		Memperkokoh keimanan dan ke taqwaan terhadap kitab suci al qur''an Meningkatkan ilmu pengetahuandi bidang ke agama an. Meningkatkan ke taqwaan terhada Allah SWT	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan GolonganLai nnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	80,829,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100 %	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatkan Kemajuan Perangkat Desa dibidang tata pemerintahan dan pembangunan	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100,000,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		100 %	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatkan Kinerja Pegawai PNS	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,354,405,680
				100 %	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatkan kinerja Tenaga Kerja Honorer/TKS	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	36,000,000
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener a ngan Bangunan Kantor	3,894,400
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33,337,485
				100 %		Meningkatkan Pelayanan terhadap Masyarakat	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20,438,900
				100 %		Memfasilitasi kegiatankegiata	Penyediaan Barang	5,085,100

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						n yang akan dilaksanakan	Cetakan dan Penggandaa n	
				100 %		Terciptanya informasi melalui minat baca media	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangu ndangan	7,200,000
							Penyelengga r aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				100 % 100 %		Memberikan semangat dan motifasi terhadap pegawai Terciptanya informasi dan konsultasi pemerintah kabupaten serang yang memadai	Penyelengga r aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	128,880,000
				100 %	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan peralatan mesin bagi pegawai	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15,650,000
				100 %	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Terpenuhinya kebutuhan pemakaian Internet dan Elektronik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22,139,000
				100 %		Meningkatkan	Penyediaan	115,303,744

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						kinerja Tenaga Kerja Honorer	Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				100 %	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan keolancaran transportasi mobil pejabat	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42,424,000
				100 %		Meningkatkan kelancaran transportasi pegawa	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28,982,771
				100 %		Terlaksananya peralatan dan mesin yang siap pakaj	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14,310,000
				100 %		Memberiakan Rasa Nyaman bagi pegawai	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10,120,000
5.	**KECAMATAN BOJONEGAR**							**3,819,605,818**

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
	A							
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 kegiatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	terlaksananya pendistribusian PBB	Koordinasi/Si nergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangun a n di Desa	3,900,000
				1 tahun		terlaksananya pemberdayaan masyarakat bagi perempuan dan anak	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdaya a n Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60,453,000
					Pemberdayaan Lembaga		Fasilitasi Pengemban	24,697,500

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		g an Usaha Ekonomi Masyarakat	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		1 tahun	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	terlaksananya hubungan yg harmonis	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		1 kegiatan		tercapainya pelaksanaan HUT RI	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapk a n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahan a n dan Pemeliharaa n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	0
							Pembinaan	23,400,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Kerukunan Antarsukuda n Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
							Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	26,520,000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWAS AN PEMERINTA HAN DESA		1 tahun	Fasilitasi, Rekomendas i dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintaha n Desa	terlaksananya pembinaan pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintaha n Desa	27,900,000
					Fasilitasi Penyelengga r aan Ketenterama n dan Ketertiban Umum			0
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN		1 tahun	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,980,268,518

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		DAERAH KABUPATEN /KOTA						
				1 tahun	Administrasi Umum Perangkat Daerah	tersedianya komponen listrik	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener a ngan Bangunan Kantor	0
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapa n Kantor	3,333,600
				1 tahun		tersedianya Alat Tulis Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44,783,200
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa n	0
				1 tahun		tersedianya akomodasi perjalanan dinas Pegawai	Penyelengga r aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	528,000,000
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	tersedianya kebutuhan kantor	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	63,200,000
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33,150,000
				1 tahun		tersedianya jasa	Penyediaan	0

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						kebersihan kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				1 tahun	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpeliharanya kendaraan dinas	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0
				1 tahun		terpeliharanya peralatan gedung kantor	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0
				1 tahun		terpeliharanya fasilitas gedung dan kantor	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0
6.	**KECAMATAN CARENANG**							**3,796,405,680**
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100 %	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tercapainya target Penerimaan PBB P2	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	23,510,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Terkait	
				12 Bulan 1 Kegiatan 12 Bulan		Terlaksananya Fasilitasi Kab.Serang Sehat Tk.Kecamatan Terlaksananya Kegiatan P2TP2 Terlaksananya KegiatanPembinaan PKK Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	117,572,000
				1 Kegiatan 70 Pasangan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya AKCF Terlaksananya Isbath Nikah	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	93,064,000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1 Kegiatan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Musrenbang RKPD di Kecamatan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangun a n di Desa	26,422,500
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		1 Kegiatan	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya sosialisasi bahaya miras dan narkoba	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	12,192,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Vertikal di Wilayah Kecamatan	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		1 Kegiatan 1 Kegiatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umumsesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya HUT KAB Terlaksananya PHBN HUT R	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	76,233,000
				5 Kegiatan		Terlaksananya Kegiatan Keagamaan	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan IntrasukuUmat Beragama, Ras, dan Golongan	105,390,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100 %	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya pembinaan tata pemerintahan desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100,000,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		1 tahun	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,796,405,680
				12 Bulan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya alat tulis kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14,245,900
						Terlaksananya Perjalanan dinas dalam daerah Terlaksananya Perjalanan dinas Luar Daerah Tersedianya	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3,600,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						makanan dan minuman rapat		
					12 Bulan	Tersedianya bahan bacaan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangu ndangan	3,600,000
					11 Bulan	Tersedianya makanan dan minuman tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8,250,000
				12 Bulan 12 Bulan 11 Bulan		Terlaksananya Perjalanan dinas dalam daerah Terlaksananya Perjalanan dinas Luar Daerah Tersedianya makanan dan minuman rapat	Penyelengga r aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62,400,000
				12 Bulan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Tersedianya jasa komunikasi SDA Listrik dan Internet	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28,047,600
				12 Bulan		Tersedianya Jasa Keamanan, Kebersihan dan Pramubakti	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	144,000,000
				1 tahun	Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha	Kendaraan dinas yang layak pakai	Penyediaan Jasa Pemeliharaa n , Biaya Pemeliharaa n , Pajak,	101,887,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					n Daerah		dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				12 Bulan		Peralatan kantor yang terpelihara	Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	12,028,000
				12 Bulan		Terpeliharanya Gedung Kantor	Pemeliharaa n /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	67,558,000
7.	**KECAMATAN CIKANDE**							**5,444,725,680**
		PROGRAM PENYELENG GARAAN PEMERINTA HAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100 %	Koordinasi Penyelengga raan Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan	tersinerginya perencanaan dan pelaksanaan kegitanpemerin tah	Koordinasi/S i nergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintaha n dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	50,406,000
					Pelaksanaan Urusan Pemerintaha n yang Dilimpahkan kepada Camat		Pelaksanaan Urusan Pemerintaha n yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1,217,075,252

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100 %	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Des	terlaksananya kegiatan musrenbangdi Kecamatan Cikande	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam ForumMusyawarah Perencanaan Pembangun a n di Desa	18,120,000
				100 % 100 &		terlaksananya pembinaan PKK Kecamatan tersedianya fasilitas P2TP2A	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdaya a n Masyarakat di Wilayah Kecamatan	69,509,000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100 %	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Dana yang di butuhkan	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapka n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahan a n dan Pemeliharaa	53,328,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
				100 %		Dana yang dibutuhkan	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	83,050,000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWAS ANPEMERIN TA HAN DESA		100 %	Fasilitasi, Rekomendas i dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintaha n Desa		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintaha n Desa	102,000,000
				100 %			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	241,108,900
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN		100 %	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	teersedianya gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,070,079,230

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		/KOTA						
				100 %		Tersianya administrasi pelaksana tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11,625,000
				100 %	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	tersedianya jasa jaminan BMD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	42,000,000
				100 %	Administrasi Umum Perangkat Daerah	tersedianya komponen instalasi listrik	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener a ngan Bangunan Kantor	2,950,000
				100 %		Tersedianya peralatan gedung kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapa n Kantor	25,259,500
				100 % 100 %		terdianya ATK Tersedianya makmin aparatur	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41,666,000
				100 %		tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa n	4,231,198
				100 %		penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangunda ngan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangu ndangan	3,600,000
				100 %		terlaksananya rapat-rapat koordinasidan konsultasi	Penyelengga r aan Rapat Koordinasida n Konsultasi	154,240,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						keluar daerah	SKPD	
				100 %	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa surat menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	102,240,000
				100 %		tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45,540,600
				100 %		tersedianya jasa kebersihan kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6,932,000
				100 %	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana yang dibutuhkan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80,405,000
				100 %		tersedianya pemeliharaan rutin gedung kantor	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainny	6,138,000
				100 %		tersedianya pemeliharaan rutin gedung kantor	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13,222,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
8.	**KECAMATAN CIKEUSAL**							**4,218,044,411**
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 Bulan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tercapainya target realisasi PBB	Koordinasi/Si nergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	32,162,000
				1 Keg 1 Keg 1 Keg	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya HUT.Kab Terlaksananya Kegiatan AKCF Terlaksananya Kegiatan Isbat Nikah	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkaitdengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	115,642,500
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1 keg	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Musrenbang RKPD di Kecamatan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangun a n di Desa	25,950,000
				12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan		Dapat Membuat Jera Para Pelaku Kejahatan Seksual dapat meningkatkan perekonomian keuarga dan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdaya a n Masyarakat di Wilayah Kecamatan	110,810,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						masyarakat Terlaksananya Kegiatan Serang Sehat		
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		1 Keg	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Narkoba	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8,712,000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaa	45,915,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
				12 Bulan 1 Keg		Terlaksananya kegiatan keagamaan Terlaksananya Kegiatan MTQ	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	131,970,000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100,000,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,143,044,522
				12 Bulan	Administrasi Umum Perangkat	Tersedianya Alat Tulis kantor	Penyediaan Bahan Logistik	12,540,500

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					Daerah		Kantor	
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa n	3,006,100
				12 Bulan		menambah wawasan para pegawai	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangu ndangan	3,600,000
							Penyelengga r aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106,560,000
				1 keg	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Barang Mebeulair	Pengadaan Mebel	5,609,025
				1 keg		Tersedianya Peralatan kantor guna menunjang pekerjaan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37,950,000
				12 Bulan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Terpenuhinya jasa listrik Dan Internet	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36,755,160
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	109,560,000
				12 Bulan	Pemeliharaa n Barang	Terpeliharanya kendaraan	Penyediaan Jasa	108,574,604

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	dinas operasional /lapangan	Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				12 Bulan		Terpeliharanya gedung kantor	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	79,683,000
9.	**KECAMATAN CINANGKA**							**4,707,885,705**
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 keg 12 bulan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	terciptanya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan intansivertikal terkait terlaksanannya Koordinasi/Sinergi Perencanaan danPelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan	Koordinasi/Si nergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	16,380,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						intansivertikal terkait		
				1 keg 12 bulan		terlaksanannya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terlaksanannya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	50,000,000
				2 keg 12 bulan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Tercapainya Kegiatan Persampahan dan isbath nikah terpenuhinya Pelaksanaan Urusan Pemerintahanyang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1,340,531,035
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1 keg	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksanannya Musrenbang SKPD Tk. Kec	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangun a n di Desa	23,084,500
							Peningkatan Efektifitas Kegiatan	80,996,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	114,099,000
				100 %		terciptanya Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama,	80,330,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				3 keg		Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Terlaksannnya Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100 % 12 bulan		Terciptanya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Terlaksanannya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100,454,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		12 bulan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,407,868,708

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				12 bulan 12 bulan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksanannya penggunaaan Alat/Komponen listrik yang baik Terpenuhinya alat /komponen listrik lainnya	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener a ngan Bangunan Kantor	10,340,000
				100 % 4 unit		Tercapainya pengadaan peralatan kantor Terlaksanannya pengadaan peralatan kanto	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapa n Kantor	47,413,900
				2 unit 100 %		Terlaksanannya Penyediaan Peralatan Rumah tangga Terpenuhinya peralatan Rumahtangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9,045,386
				100 % 12 bulan		Terlaksanannya Dokumen perkantoran Terpenuhinya pemakaian logistik kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19,700,600
				12 bulan 100 %		Tercapainya belanja cetak dan penggandaan di kantor Terlaksanannya barang cetak dan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa n	7,548,800

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						penggandaan		
				12 bulan 100 %		Terlaksanannuya Pembayaran Bahan bacaan dan Perundangundangan terpenuhinya pengetahuan lebih luas aparatur	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	0
							Fasilitasi Kunjungan Tamu	34,763,400
				12 bulan 100 %		Terlaksanannya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terpenuhinya perjalanan Dinas dalam Daerah	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49,350,000
				4 kwh 1 rek 12 bulan 100 %	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terbayarnya Jasa Listrik Kantror terbayarnya jasa wifi kantor Terlaksanannya pembayaran wifi dan listrik kantor terpenuhinya pembayaran listrik dan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32,587,200

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						wifikantor		
				1 Tahun		Terbayarnya jasa pelayanan umum	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	161,520,000
				12 bulan 8 unit	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksanannyaPenyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	104,026,000
				1 tahun 4 unit		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6,903,000
				1 tahun		Terlaksananya Pemeliharaan/R	Pemeliharaan	10,944,176

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				5 unit		ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
10.	**KECAMATAN CIOMAS**							**5,075,116,591**
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		11 Desa	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Tercapainya Pembayaran PBB di seluruh Desa se Kecamatan Ciomas	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	17,946,600
				1 Kegiatan 1 Kegiatan	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Terfasilitasinya Dukungan terhadap Kegiatan AKCF Tahun 2022 terfasilitasinya Dukungan terhadap	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1,031,131,600

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						kegiatan HUT Kab. Serang		
				12 Bulan		Terfasilitasinya kegiatan P2TP2A di Wilayah Kecamatan Ciomas		
				12 Bulan		Terfasilitasinya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan (Persampahan)		
				70 Pasang		Terselenggaranya Kegiatan Isbat Nikah Masal		
		PROGRAM PEMBERDAY AAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100 Percen	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Terlaksananya Kegiatan Musrenbang RKPD Tahun Anggaran 2022	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangun a n di Desa	36,200,000
				2 kegiatan		Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Kepada	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdaya	56,199,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				11 Bulan 12 Bulan		Masyarakat Desa Terselenggaranya Kegiatan Serang Sehat Terselenggaranya Kegiatan TP PKK Kecamatan Ciomas	a n Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
		PROGRAM KOORDINA S I KETENTRA M AN DAN KETERTIBA N UMUM			**Koordinasi Upaya Penyelengg a raan Ketenteram a n dan Ketertiban Umum**		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8,076,000
		PROGRAM PENYELENG GARAAN URUSAN PEMERINTA HAN UMUM		1 Kegiatan	**Penyelengg a raan Urusan Pemerintah a n Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Terlaksananya kegiatan PHBN di wilayah Kecamatan Ciomas	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapk a n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar	34,910,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahan a n dan Pemeliharaa n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
				12 Bulan		Terfasilitasinya kegiatan keagamaan dikecamatan ciomas	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	104,775,000
		PROGRAM PEMBINAA N DAN PENGAWAS AN PEMERINTA		12 Bulan	**Fasilitasi, Rekomenda s i dan Koordinasi Pembinaan dan**	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksanany a Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset	41,550,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		HAN DESA			**Pengawasan Pemerintah a n Desa**		Desa	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		14 bulan / kali	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan Ciomas	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,253,011,582
				12 Bulan	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terpeliharanya Instalasi Listrik di Kantor Kecamatan Ciomas	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener a ngan Bangunan Kantor	4,100,000
				20 unit		Kinerja Pegawai bisa semakin optimal dengan dukungan peralatan yang baik	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapa n Kantor	25,939,897
				12 Bulan		Tersedianya kebutuhan logistik (ATK) Kantor Kecamatan Ciomas	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18,245,200
				1 Tahun		terfasilitasinya kebutuhan cetak dan penggandaan dokumen	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa n	12,375,000
				12 Bulan		Tersedianya bahan	Penyediaan Bahan	7,200,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						bacaan untuk menambah wawasan dan informasi bagi pegawai Kec. Ciomas	Bacaan dan Peraturan Perundangu ndangan	
				12 Bulan		Terpenuhinya kebutuhan Rapat-rapat, tamu dan juga biaya perjalanan dinas	Penyelengga r aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140,274,000
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah a n Daerah		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38,053,200
				12 Bulan		Tersedianya Jasa Pramubakti dan Tenaga Kebersihan Kantor Kecamatan Ciomas	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	118,680,000
				9 unit	**Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah a n Daerah**	Kendaraan dinas bisa tetap baik kondisinya dan juga pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaa n , Biaya Pemeliharaa n , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	86,929,512
				12 Bulan		Terpeliharanya	Pemeliharaa	5,380,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						Peralatan dan Mesin Kantor Kecamatan Ciomas	n Peralatan dan Mesin Lainnya	
				12 Bulan		kondisi gedung / kantor terawat dengan baik	Pemeliharaa n /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	34,140,000
11.	**KECAMATAN CIRUAS**							**6,254,054,680**
		PROGRAM PENYELENG GARAAN PEMERINTA HAN DAN PELAYANA N PUBLIK			**Koordinasi Penyelengg a raan Kegiatan Pemerintah a n di Tingkat Kecamatan**		Koordinasi/S i nergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintaha n dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	31,393,200
					Pelaksanaan Urusan Pemerintah a n yang Dilimpahka n kepada Camat		Pelaksanaan Urusan Pemerintaha n yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1,300,000,000
		PROGRAM PEMBERDA Y AAN			**Koordinasi Kegiatan Pemberdaya an Desa**		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam	47,895,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					Forum Musyawarah Perencanaan Pembangun a n di Desa	
							Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdaya a n Masyarakat di Wilayah Kecamatan	101,320,000
		PROGRAM KOORDINAS I KETENTRAM AN DAN KETERTIBAN UMUM			**Koordinasi Upaya Penyelengg a raan Ketenteram a n dan Ketertiban Umum**		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	16,500,000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			**Penyelengg a raan Urusan Pemerintah a n Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapk a n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan	66,021,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahan a n dan Pemeliharaa n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
							Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	172,800,000
		PROGRAM PEMBINAA N DAN			**Fasilitasi, Rekomenda s i dan**		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintaha	100,110,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			**Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah a n Desa**		n Desa	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,954,054,680
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	154,036,000
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah a n Daerah		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	204,480,000
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah a n Daerah		Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	105,444,800

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
12.	**KECAMATAN GUNUNGSARI**							**3,658,925,680**
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Tahun 1 kali	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Terlaksananya Intensifikasi dan ektensifikasi PBB Terselenggaranya Musrenbang RKPD di Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	20,910,000
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	131,107,000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja	90,350,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Kecamatan	
		PROGRAM KOORDINAS I KETENTRAM AN DAN KETERTIBAN UMUM		1 Kegiatan 1 Kegiatan	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	Terselenggaranya Koordinasi dan Sosialisasi Bahaya Narkoba Terselenggaranya Koordinasi Trantibum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	11,640,000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaa	76,050,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
				1 Tahun 1 Kegiatan 1 Tahun 1 Kegiatan		Terselenggaranya Hari Besar Agama Islam Terselenggaranya kegiatan ke Agamaan Bulan Romadhon Terselenggaranya Pengajian Bulanan Terselewnggaranya Dukungan Kegiatan MTQ	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	101,725,000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		1 Tahun	**Fasilitasi, Rekomendas i dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah a n Desa**	Terselenggaranya Pembinaan Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	116,024,000
		PROGRAM			**Administrasi**		Penyediaan	2,589,732,792

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA			**Keuangan Perangkat Daerah**		Gaji dan Tunjangan ASN	
				1 Tahun	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Terselenggaranya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	18,000,000
				2 Unit	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13,400,000
				1 Tahun		Tersedianya Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10,168,200
				1 Tahun		Tersediannya bahan cetakan dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7,150,000
				1 Tahun		Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan perundang - undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	3,600,000
				1 Tahun		Tersedianya Biaya rapat koordinasi dan konsultasi	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	107,090,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						SKPD	Konsultasi SKPD	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah a n Daerah		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	130,680,000
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28,119,000
				1 Tahun		Terpenuhinya admintrasi umum perangkat daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16,964,100
				1 Tahun	**Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah a n Daerah**	Tersediannya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaa n , Biaya Pemeliharaa n , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	90,610,588
				1 Tahun		Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	4,305,000
				1 Tahun		Terselenggaran ya Pemeliharaan	Pemeliharaa n /Rehabilitasi	91,300,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						Gedung Kantor	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
13.	**KECAMATAN JAWILAN**							**3,729,945,564**
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		14 bulan	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terfasilitasinya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,740,579,064
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0
							Penyediaan Bahan Bacaan dan	0

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Peraturan Perundangu ndangan	
							Fasilitasi Kunjungan Tamu	0
							Penyelengga r aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	989,366,500
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah a n Daerah		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0
					Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah a n Daerah		Penyediaan Jasa Pemeliharaa n , Biaya Pemeliharaa n , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0
							Pemeliharaa n Peralatan dan	0

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Mesin Lainnya	
							Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0
14.	**KECAMATAN KIBIN**							**5,827,067,254**
		PROGRAM PEMBERDAY AAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	37,000,200
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		1 Kegiatan	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan**	Terfasiitasinya Pembinaan Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100,266,300

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					Pemerintah a n Desa			
		PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATE N /KOTA			**Perencanaa n , Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	151,703,000
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,427,068,834
				100 %	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapa n Kantor	26,830,000
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16,650,000
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa n	13,200,000
				100 % 100 %		Terpenuhinya Makanan dan Minuman Terpenuhinya Perjalanan Dinas	Penyelengga r aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	117,344,000
				12 bulan	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	Terpenuhinya kebutuhan listrik dan internet	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	47,521,320

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					Pemerintah a n Daerah		Daya Air dan Listrik	
				12 Bulan		Terpenuhinya kebutuhan Pramubakti,Js.Kebersihan dan Js.Keamanan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	145,352,400
				12 Bulan	**Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah a n Daerah**	Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas/jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaa n , Biaya Pemeliharaa n dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	93,520,800
				12 Bulan		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Pemeliharaa n /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28,375,000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Kegiatan 1 Kegiatan	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintah a n yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat**	Terfasilitasinya pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2) Terselenggaranya	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	106,100,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					Daerah yang ada di Kecamatan	pembinaan PKK Kecamatan		
				1 Kegiatan	**Pelaksanaan Urusan Pemerintah a n yang Dilimpahka n kepada Camat**	terlaksananya pengelolaan persampahan	Pelaksanaan Urusan Pemerintaha n yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	496,656,200
15.	**KECAMATAN KOPO**							**3,703,304,780**
		PROGRAM PENYELENG GARAAN PEMERINTA HAN DAN PELAYANA N PUBLIK		12 bulan	**Koordinasi Penyelengg a raan Kegiatan Pemerintah a n di Tingkat Kecamatan**	Terfasilitasinya kegiatan Instensifikasi dan ekstensifikasi PBB	Koordinasi/S i nergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintaha n dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	15,704,000
				4 kegiatan	**Pelaksanaan Urusan Pemerintah a n yang Dilimpahka n kepada Camat**	Terlaksananya Keg HUT KAB, BBGR, AFC dan Isbath Nikah	Pelaksanaan Urusan Pemerintaha n yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	67,521,000
		PROGRAM PEMBERDA Y		1 kegiatan	**Koordinasi Kegiatan Pemberdaya**	Terlaksananya Keg. Musyawarah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat	18,238,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		AAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			**an Desa**	RKPD Kec.Kopo	dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangun a n di Desa	
				3 kegiatan		Terlaksananya kegiatan P2TP2A dan PKK dan BBGRM di Kec.Kopo	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdaya a n Masyarakat di Wilayah Kecamatan	96,286,400
		PROGRAM KOORDINAS I KETENTRAM AN DAN KETERTIBAN UMUM		1 kegiatan	**Koordinasi Upaya Penyelengg a raan Ketenteram a n dan Ketertiban Umum**	Terlaksananya kegiatan Trantibum di Kec.Kopo	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8,670,000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		1 kegiatan	**Penyelengg a raan Urusan Pemerintah a n Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Terlaksananya kegiatan HUT RI di Kec.Kopo	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapk a n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan	54,527,500

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
				5 kegiatan		Terlaksananya kegiatan MTQ dan Keagamaan di Kec.Kopo	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	133,640,000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN		1 kegiatan	**Fasilitasi, Rekomendasi dan**	Terlaksananya keg.Pembinaan Tata Pemerintahan	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan	99,999,950

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			**Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah a n Desa**	Desa di Kec.Kopo	Desa	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		1 tahun	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terpenuhinya gaji dan tpp pegawai	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,703,368,558
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50,752,000
				1 Tahun		Terpenuhinya kebutuhan Logistik	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9,034,500
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1,450,000
							Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94,706,000
				12 bulan	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	Terpenuhinya kebutuhan listrik dan internet	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	22,403,472

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					Pemerintah a n Daerah		Daya Air dan Listrik	
				12 bulan		Meningkatnya Pelayanan di Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	236,400,000
				12 bulan	**Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah a n Daerah**	Tersedianya biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaa n , Biaya Pemeliharaa n , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74,598,000
				12 bulan		Tersedianya biaya pemeliharaan, Peralatan Kantor	Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	6,876,000
				12 bulan		Terpeliharanya gedung kantor	Pemeliharaa n /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9,129,400
16.	**KECAMATAN KRAGILAN**							**6,165,201,374**
		PROGRAM PENYELENG GARAAN PEMERINTA HAN DAN		100 %	**Koordinasi Penyelengg a raan Kegiatan**	Capaian Koordinasi Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/S i nergi Perencanaan dan	29,584,800

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		PELAYANAN PUBLIK			**Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	dalam Kegiatan Intensifikasi dan Extensifikasi PBBP2	Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
				100 %	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	Capaian peningkatkan P2TP2A, PKK, dan Senam SEhat	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	91,352,100
				1 Unit 1 Dokumen 1 Unit	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	Capaian Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prsarana DPA SKPD Kec. Kragilan Peningkatan Sarana dan Prasarana	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	75,002,020

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				100 %	**Pelaksanaan Urusan Pemerintah a n yang Dilimpahka n kepada Camat**	Capaian pelaksanaan Pengelola Persampahan, AKCF, HUTDA, Sidang Istbath Nikah, MTQ, dan PHBN	Pelaksanaan Urusan Pemerintaha n yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1,495,573,658
		PROGRAM PEMBERDA Y AAN MASYARAK AT DESA DAN KELURAHA N		100 %	**Koordinasi Kegiatan Pemberdaya an Desa**	peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perncanaan pembangunan di desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangun a n di Desa	17,750,000
		PROGRAM PENYELENG GARAAN URUSAN PEMERINTA HAN UMUM		100 %	**Penyelengg a raan Urusan Pemerintah a n Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Capaian Kegiatan Keagamaan	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	26,678,000
		PROGRAM PEMBINAA N DAN PENGAWAS		100 %	**Fasilitasi, Rekomenda si dan Koordinasi Pembinaan**	fasilitas administrasi tata pemerintahan desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintaha n	100,000,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		AN PEMERINTAHAN DESA			**dan Pengawasan Pemerintah a n Desa**		Desa	
				100 %		fasilitas penyelenggaraan ketentraman dan ketretiban umum	Fasilitasi Penyelenggar aan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8,665,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		100 %	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,790,201,375
				100 %	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Capaian Komponen Instalasi Listrik dan Peralatan Listrik	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener a Ngan Bangunan Kantor	6,000,000
				100 %		Capaian Peralatan dan Perlengkapan Kerja Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapa n Kantor	25,498,000
				100 %		Capaian Persidiaan Lgostik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	89,518,000
				100 %		Capaian Percetakan	Penyediaan Barang	9,799,151

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						dan Penggandaan	Cetakan dan Penggandaa n	
				100 %		Capaian Persediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundangu ndangan	4,320,000
				100 Persen		Capaian rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelengga r aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53,450,000
				100 %	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah a n Daerah**	Capaian Sumber daya air, listrik dan wipi	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42,649,510
				100 %		Capaian Pemeliharaan Jasa Peralatan dan Perlelngkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapa n Kantor	18,000,000
				100 %		Capaian Penyedia Jasa Layanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	176,400,000
				100 %	**Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	Capaian penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak	Penyediaan Jasa Pemeliharaa n , Biaya Pemeliharaa n	95,962,600

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					a n Daerah	kendaraan peroragan dinas atau kendaraan dinas jabatan	dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				100 %		Capaian pemeliharaan/rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainya	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8,797,160
17.	**KECAMATAN KRAMAT WATU**							**6,626,685,916**
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2,363,993,000
		PROGRAM			**Koordinasi**		Peningkatan	0

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		PEMBERDAY AAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			**Kegiatan Pemberdayaan Desa**		Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangun a n di Desa	
		PROGRAM KOORDINAS I KETENTRAM AN DAN KETERTIBAN UMUM			**Koordinasi Upaya Penyelengg a raan Ketenteram a n dan Ketertiban Umum**		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10,300,000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			**Penyelengg a raan Urusan Pemerintah a n Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapk a n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika	0

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							serta Pemertahan a n dan Pemeliharaa n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
							Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	0
		PROGRAM PEMBINAA N DAN PENGAWAS AN PEMERINTA HAN DESA			**Fasilitasi, Rekomenda s i dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah a n Desa**		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintaha n Desa	0
		PROGRAM PENUNJAN G			**Administrasi Keuangan Perangkat**		Penyediaan Gaji dan Tunjangan	4,252,392,916

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA			**Daerah**		ASN	
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah a n Daerah		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0
18.	**KECAMATAN LEBAK WANGI**							**3,840,385,680**
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		2 Kegiatan	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah a n di Tingkat Kecamatan**	terfasilitasinya koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah Daerah dengan perangkat Daerah dan instansi Vertikal terkait	Koordinasi/Si nergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	11,850,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Terkait	
				4 Kegiatan	**Pelaksanaan Urusan Pemerintah a n yang Dilimpahka n kepada Camat**	Terlaksananya Kegiatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintaha n yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	99,340,000
		PROGRAM PEMBERDA Y AAN MASYARAK AT DESA DAN KELURAHA N			**Koordinasi Kegiatan Pemberdaya an Desa**		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangun a n di Desa	27,995,000
				1 Kegiatan		kebutuhan penunjang kegiatan pembinaaan TP. PKK Kec Lebak Wangi dapat terpenuhi	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdaya a n Masyarakat di Wilayah Kecamatan	41,257,100
		PROGRAM KOORDINA S I KETENTRA M AN DAN KETERTIBA N UMUM		1 Kegiatan	**Koordinasi Upaya Penyelengg a raan Ketenteram a n dan Ketertiban Umum**	terlaksananya kegiatan Pembinaan trantibum di wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5,905,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		1 Kegiatan	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	terlaksananya kegiatan Hari Ulang Tahun RI	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	70,320,000
							Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan	103,033,500

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		1 Kegiatan	**Fasilitasi, Rekomendas i dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah a n Desa**	terfasilitasi dan meningkatnya kualitas administrasi Desa dan hasil Dana Desa akan lebih baik	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100,000,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		1 Tahun	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	terpenuhi penerangan bangunan kantor	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,145,000
				1 Tahun	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis	Penyediaan Bahan Logistik	15,884,500
				1 Tahun		terpenuhi penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener a ngan Bangunan Kantor	3,145,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				1 Tahun		Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15,884,500
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa n	3,850,000
				1 Tahun		tersedianya bahan bacaan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangu ndangan	3,600,000
				1 Tahun 1 Tahun		Terpenuhi Kebutuhan makan dan minum Rapat Terpenuhi kebutuhan Transfortasi dan akomodasi	Penyelengga r aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	113,495,000
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51,243,400
				1 Tahun	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah a n Daerah**	tersedianya fasilitasi terbayarkan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41,238,000
							Penyediaan Jasa Pelayanan	148,680,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Umum Kantor	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan	96,453,000
				1 tahun		tersedianya kebutuhan Dana perawatan dan perbaikan peralatan kerja dan peralatan gedung kantor	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27,250,600
							Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20,328,000
19.	**KECAMATAN MANCAK**							**3,668,745,680**
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANA			**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah**		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan	9,000,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		N PUBLIK			**a n di Tingkat Kecamatan**		Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
				4 kegiatan	**Pelaksanaan Urusan Pemerintah a n yang Dilimpahkan kepada Camat**	Terlaksananya kegiatan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	116,579,174
		PROGRAM PEMBERDAY AAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		4 kegiatan	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdaya a n Masyarakat di Wilayah Kecamatan	132,636,000
		PROGRAM KOORDINAS I KETENTRAM AN DAN KETERTIBAN UMUM			**Koordinasi Upaya Penyelengg a raan Ketenteram an dan Ketertiban Umum**		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6,000,000
				1 Tahun		Terciptanya kondisi keamanan	Harmonisasi Hubungan Dengan	6,000,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						dan ketertiban umum	Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		1 kegiatan	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Terlaksananya HUT RI Tingkat Kecamatan	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50,290,000
				2 kegiatan		Terselenggaranya kegiatan keagamaan dan	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan	56,551,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						dukungan MTQ	Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		1 Tahun	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan pemerintahan desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100,000,000
				1 Tahun		Terlaksananya kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi PBB P2	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	22,000,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATE		1 Tahun	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,593,756,960

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		N /KOTA						
				12 bulan	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Tersedianya jasa keamanan kantor	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	51,120,000
				1 Tahun	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terbaharuinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	2,200,000
				1 Tahun		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,620,000
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1,260,000
				12 bulan		Tersedianya makanan dan minuman	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27,055,000
				1 Tahun		Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3,500,500
				12 bulan		Tersedianya informasi dan publikasi	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	18,300,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						Terselenggaranya rapat, koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94,538,000
				1 Tahun	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38,000,000
				1 Tahun		Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lain	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42,366,386
				1 Tahun 12 bulan	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK) Tersedianya jasa Pramubakti	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	81,152,800
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28,909,860
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Terpelihara kendaraan dinas/operasional dan terbayarnya pajak	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	76,680,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					a n Daerah	kendaraan bermotor	dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				1 Tahun	**Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah a n Daerah**	Terpelihara kendaraan dinas/operasion al dan terbayarnya pajak kendaraan bermotor	Penyediaan Jasa Pemeliharaa n , Biaya Pemeliharaa n dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100,050,000
				1 Tahun		Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	9,180,000
20.	**KECAMATAN PABUARAN**							**4,797,265,645**
		PROGRAM PENYELENG GARAAN PEMERINTA HAN DAN PELAYANA N PUBLIK			**Koordinasi Penyelengg a raan Kegiatan Pemerintah a n di Tingkat Kecamatan**		Koordinasi/S i nergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintaha n dengan Perangkat Daerah dan Instansi	22,800,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Vertikal Terkait	
					Pelaksanaan Urusan Pemerintah a n yang Dilimpahka n kepada Camat		Pelaksanaan Urusan Pemerintaha n yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1,239,030,000
		PROGRAM PEMBERDA Y AAN MASYARAK AT DESA DAN KELURAHA N			**Koordinasi Kegiatan Pemberdaya an Desa**		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangun a n di Desa	22,400,000
							Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdaya a n Masyarakat di Wilayah Kecamatan	132,780,000
		PROGRAM PENYELENG GARAAN URUSAN PEMERINTA HAN UMUM			**Penyelengg a raan Urusan Pemerintah a n Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapk a n Pengamalan Pancasila,	59,505,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahan a n dan Pemeliharaa n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
							Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	77,920,000
							Pelaksanaan Tugas Forum	4,320,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			**Fasilitasi, Rekomendas i dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah a n Desa**		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100,000,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,572,265,645
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	4,774,000
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21,093,250
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	114,840,400
							Penyediaan	9,172,750

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Barang Cetakan dan Penggandaan	
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	3,600,000
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21,920,000
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29,185,500
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	139,560,000
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	68,956,600

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Lapangan	
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13,573,000
							Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	139,569,500
21.	**KECAMATAN PADARINCANG**							**4,820,065,680**
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		70 %	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Terpenuhinya target PBB	Koordinasi/Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	33,792,000
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1,231,168,000
		PROGRAM					**Koordinasi**	1,231,168,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		PEMBERDAY AAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					**Kegiatan Pemberdayaan Desa**	
				100 %		Terlaksnanya Musrenbang Kec.Padarincang	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangun a n di Desa	22,554,000
							Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdaya a n Masyarakat di Wilayah Kecamatan	130,753,000
		PROGRAM KOORDINAS I KETENTRAM AN DAN KETERTIBAN UMUM		1 keg	**Koordinasi Upaya Penyelengg a raan Ketenteram a n dan Ketertiban Umum**	Terlaksananya kegiatan Trantibum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10,491,000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN		1 Keg	**Penyelengg a raan Urusan**	Terlaksananya kegiatan PHBN	Pembinaan Wawasan Kebangsaan	58,782,900

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			**Pemerintah a n Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapk a n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahan a n dan Pemeliharaa n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
				4 Keg		Terlaksananya MTQ dan Keg2 Kegamaan	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna	96,447,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		1 Keg	**Fasilitasi, Rekomendas i dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Terlaksananya keg2 Pembinaan Tata Pememrintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100,000,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		1 tahun	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terpenuhinya gaji dan tpp pegawai	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,695,065,680
				1 tahun	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	terpenuhinya komponen instalasi listrik	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	3,501,500
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34,000,000
				100 %		Terpenuhinya kebutuhan	Penyediaan Bahan	15,017,800

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						Alat Tulis Kantor	Logistik Kantor	
				100 %		Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa n	5,003,600
							Fasilitasi Kunjungan Tamu	65,888,000
						Terselenggaran ya rapatrapat, koordinasi dan konsultasi	Penyelengga r aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48,770,000
				12 bulan	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah a n Daerah**	Terpenuhinya kebutuhan listrik dan internet	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32,010,000
				12 bulan		Terpenuhinya kebutuhan js.pramubakti, Js Kebersihan dan keamanan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	144,960,000
				12 bulan	**Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah**	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas	Penyediaan Jasa Pemeliharaa n , Biaya Pemeliharaa n , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	83,441,200

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Lapangan	
				100 %		Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan gedung kantor	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8,420,000
22.	**KECAMATAN PAMARAYAN**							**3,810,865,843**
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 kegiatan	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	terlaksananya Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	39,455,900
				1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Terlaksananya Kegiatan Anyer Krakatau Culture Festival terlaksananya kegiatan Hari Ulang Tahun Daerah Terlaksananya Kegiatan Isbat Nikah	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	181,492,100

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		PROGRAM PEMBERDAY AAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1 kegiatan	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Terlaksananya Kegiatan Musrenbang RKPD di Kecamatan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangun a n di Desa	28,990,000
				1 kegiatan 1 kegiatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdaya a n Masyarakat Terlaksanany a Pembinaan PKK		terlaksanany a Kegiatan Fasilitasi P2TP2A di Wilayah Kecamatan	92,827,000
		PROGRAM KOORDINA S I KETENTRA M AN DAN KETERTIBA N UMUM		1 kegiatan	**Koordinasi Upaya Penyelengg a raan Ketenteram a n dan Ketertiban Umum**	terlaksananya kegiatan Sosialisasi Narkoba	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	17,300,000
		PROGRAM PEMBINAA N DAN PENGAWAS AN PEMERINTA		1 tahun	**Fasilitasi, Rekomenda s i dan Koordinasi Pembinaan dan**	Terlaksananya Pembinaan Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintaha n Desa	100,000,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		HAN DESA			**Pengawasan Pemerintah a n Desa**			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		1 kegiatan	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintah a n Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	terlaksananya Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapka n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahan a n dan Pemeliharaa n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	38,725,000
				1 kegiatan 1 kegiatan		Terlaksananya Kegiatan Keagamaan Terlaksananya	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan	98,450,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten	Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		1 tahun	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,810,886,880
				1 tahun	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	tersedianya komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	5,224,000
				1 tahun		Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39,134,338
				1 tahun		Tersedianya Alat Tulis Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15,384,000
				1 tahun		Tersedianya	Penyediaan	3,637,500

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaa n	
				1 tahun		Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundangunda ngan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangu ndangan	3,600,000
				1 tahun		Tersedianya Makan dan Minum Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7,598,000
				1 tahun		Tersedianya Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Penyelengga r aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27,000,000
				1 tahun	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah a n Daerah**	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41,516,400
				1 tahun		Terbayarnya Jasa Kebersihan dan Peralatan Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	157,680,000
				1 tahun	**Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah a n Daerah**	terpeliharanya kendaraan dinas operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaa n , Biaya Pemeliharaa n , Pajak, dan Perizinan Kendaraan	95,188,225

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Dinas Operasional atau Lapangan	
				1 tahun 1 tahun		terehabnya rumah dinas kecamatan Terpeliharanya Gedung Kantor	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6,776,500
23.	**KECAMATAN PETIR**							**3,614,730,382**
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN		12 Bulan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terfasilitasinya Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB	Koordinasi/Si nergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkai	28,925,000
				1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terfasilitasinya AKCF Terfasilitasinya HUT Kab Terlaksananya kegiatan Istbat Nikah	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	89,785,000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN		12 Bulan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Musrenbang RKPD Kecamatan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	31,192,100

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		KELURAHAN					Perencanaan Pembangun a n di Desa	
				12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan		Terfasilitasinya kegiatan Serang Sehat Terfasilitasinya pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Terlaksananya kegiatan PKK	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdaya a n Masyarakat di Wilayah Kecamatan	94,616,000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		1 Kegiatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya kegiatan HUT RI	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapk a n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUnd ang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahan	57,725,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							a n dan Pemeliharaa n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
				1 Kegiatan 1 Tahun 1 Tahun		Terlaksananya dukungan MTQ Terlaksananya kegiatan Hari Besar Islam Terlaksananya Kegiatan Keagamaan	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	92,530,000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWAS AN PEMERINTA HAN DESA		12 Bulan	Fasilitasi, Rekomendas i dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintaha n Desa	Terfasilitasinya tata pemerintahan desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintaha n Desa	100,000,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		12 Bulan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan PNS	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,614,730,537
				12 Bulan	Administrasi	Terlaksananya	Pengamanan	24,000,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	jasa keamanan kantor	Barang Milik Daerah SKPD	
				12 Bulan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kanator	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener a ngan Bangunan Kantor	
				12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan		Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya makanan dan minuman Tersedianya peralatan dan bahan pembersih	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				12 Bulan		Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa n	15,636,400
				12 Bulan		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangunda ngan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangu ndangan	3,600,000
				12 Bulan		Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelengga r aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45,812,000
				1 Tahun	Pengadaan	tersedianya	Pengadaan	29,106,945

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	belanja mebel	Mebel	
				12 Bulan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terbayarkannya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37,080,000
				12 Bulan		tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	112,560,000
				12 Bulan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya bbm, service dan pajak KDO	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	103,930,000
				12 Bulan		tersedianya jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24,540,000
				12 Bulan		tersedianya jasa pemeliharaan bangunan gedungkantor	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19,950,000
24.	**KECAMATAN**							**4,963,285,434**

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
	PONTANG							
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 kegiatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	terlaksananya Musrembang Kecamatan	Koordinasi/Si nergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1 tahun	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlakasanya peningkatan Efektivitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdaya a n Masyarakat di Wilayah Kecamatan	104,636,400
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	7,925,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Kecamatan	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Pembinaan Kerukunan Antarsukuda n Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	0
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		1 tahun	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	51,700,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		1 tahun	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	pembayaran gaji dan tunjangan ASN kec pontang	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,838,288,294
				1 kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener a ngan Bangunan Kantor	35,379,500
				1 tahun		tersedianya	Penyediaan	0

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						peralatan dan perlengkapankantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				1 tahun		terlaksananya bahan logistik kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37,000,000
				1 tahun		terlaksananya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	0
							Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,555,464,000
				1 tahun	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terbanyarnya jasa surat menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	308,400,000
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24,492,240
				1 tahun		terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha		Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak	0

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					n Daerah		Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				1 kegiatan		Terlaksanya pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0
25.	**KECAMATAN PULO AMPEL**							**3,818,705,700**
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100 %	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terpenuhinya target pencapaian PBB	Koordinasi/Si nergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	21,540,000
				100 %	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terselenggaranya keg.Istbat Nikah	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	70,900,000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		100 %	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terselenggaranya Keg.Musrenbang Tk.Kec	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	19,300,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		DAN KELURAHAN					Musyawarah Perencanaan Pembangun a n di Desa	
				100 % 100 %		Terselenggaran ya Keg.P2TP2A Terselenggaran ya Keg.PKK Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdaya a n Masyarakat di Wilayah Kecamatan	73,120,000
		PROGRAM PENYELENG GARAAN URUSAN PEMERINTA HAN UMUM		100 % 100 %	Penyelengga raan Urusan Pemerintaha n Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaran ya HUT KAB Terselenggaran ya keg.HUT RI	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapk a n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUnd ang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahan a n dan Pemeliharaa nKeutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	48,950,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				100 %		Terselenggaranya MTQ	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasiona	71,400,000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100 %	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya kdgiatan pembinaan adminstrasi pemerintahan desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100,550,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		12 Bulan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,818,836,280
				150 Unit	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0
				12 Bula		Terpenuhinya kebutuhan ATK	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14,662,800

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				12 bulan		Terpenuhinya barang cetakan dan pengganndaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa n	7,200,000
				12 bulan		Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangu ndangan	3,600,000
				12 Bulan 12 Bulan		Terpenuhinya kebutuhan Makanan dan Minuman Terpenuhinya kebutuhan Perjalanan Dinas	Penyelengga r aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	185,130,000
				12 Bulan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Terpenuhinya kebutuhan listrik dan internet	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32,978,400
				1 Kegiatan		Terfasilitasinya kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	153,360,000
				12 Bulan	Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Terpenihinya kebutuhan pemeliharaan kend.dinaas	Penyediaan Jasa Pemeliharaa n , Biaya Pemeliharaa n dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	126,390,220

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				12 bulan		Terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan mesin kantor	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48,170,000
				12 bulan		Terpeliharanya gedung kantor dgn baik	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22,618,000
26.	**KECAMATAN TANARA**							**4,792,765,680**
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 Bulan 12 Bulan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tercapainya Target/Realisasi PBB P2 Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi PBB P2	Koordinasi/Si nergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	17,445,000
				1 Tahun 1 Tahun	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Anyer Krakatau CultureFestival Terlaksananya Itsbat Nikah Terpadu	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkaitdengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1,208,762,400
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN		1 Kegiatan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Musrenbang RKPD di Kecamatan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	24,675,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		KELURAHAN					Perencanaan Pembangun a n di Desa	
				12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan		Terlaksananya KabupatenSera ng Sehat Terlaksananya Pelayanan Terpadu P2TP2A Terlaksananya Pembinaan PKK Kecamatan dan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdaya a n Masyarakat di Wilayah Kecamatan	99,125,600
		PROGRAM KOORDINAS IKETENTRA M AN DAN KETERTIBAN UMUM		1 Tahun	Koordinasi Upaya Penyelengga raan Ketenterama n dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi antara Kepolisian, TNI, dan Instansi Vertikal Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13,600,000
		PROGRAM PENYELENG GARAAN URUSAN PEMERINTA HAN UMUM		1 Kegiatan 1 Kegiatan	Penyelengga raan Urusan Pemerintaha n Umum sesuai Penugasan KepalaDaera h	Terlaksananya Peringatan Hut Kabupaten Serang Terlaksananya Peringatan HUT RI Tahun 2022	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapk a n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUnd	69,207,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							ang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahan a n dan Pemeliharaa n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
				1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Tahun 1 Kegiatan 1 Kegiatan		Terlaksananya Gebyar Muharram Terlaksananya MTQ Tingkat Kabupaten Serang Terlaksananya Pengajian Rutin Bulanan Terlaksananya Peringatan Maulid Nabi Terlaksanya Taraweh Berkunjung Tingkat Kecamatan	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, danGolonga n Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	151,310,000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN		1 Tahun	Fasilitasi, Rekomendas i dan	Terlaksananya Evaluasi APBDes Tahun	Fasilitasi Administrasi Tata	100,020,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		1 Tahun 1 Tahun	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2021 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi APBDes Terlaksananya Rekonsiliasi APBDes Tahun 2021	Pemerintahan Desa	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		12 Bulan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terealisasinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,667,765,680
				12 Bulan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersediannya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	4,050,000
				12 Bulan		Tersedianya Alat Tulis Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16,855,500
				12 Bulan		Tersedianya Barang Cetakan, Foto Copy, dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3,000,000
				12 Bulan		Tersedianya Bahan Bacaan/Surat Kabar	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	3,600,000
				11 Bulan		Tersedianya Makanan dan	Fasilitasi Kunjungan	5,821,500

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
						Minuman Jamuan Tamu	Tamu	
				12 Bulan		Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Perajalanan Dinas Keluar Daerah, dan Belanja Makananan dan minuman Rapat	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91,620,000
					Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah		Pengadaan Mebel	10,500,000
				1 Tahun		Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19,350,000
				12 Bulan 12 Bulan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terbayarnya Listrik Kantor dan Rumah Dinas Terbayarnya Wifi Kantor	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29,448,000
				12 Bulan 12 Bulan		Terbayarnya Jasa Petugas Keamanan Kantor Terbyarnya Jasa Pramubakti Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	105,120,000
				12 Bulan	Pemeliharaan Barang	Terlaksananya Pemeliharaan	Penyediaan Jasa	84,114,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				12 Bulan		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Peralatan dan Perlengkapan Kantor (AC, Laptop/Komputer, Printer, CCTV)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10,960,000
				12 Bulan 1 Tahun 12 Bulan		Terbayarnya Jasa Petugas Kebersihan Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Pengecetan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan dan Bahan Pembersih Kantor	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	56,416,000
27.	**KECAMATAN TIRTAYASA**							**5,161,045,840**
		PROGRAM PENYELENGGARAAN		100 %	Koordinasi Penyelenggaraan	Terpenuhinya target PBB	Koordinasi/Si nergi	24,814,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
				2 Kegiatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya kegiatan Isbat Nikah dan AKCF	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	48,586,000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100 %	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya keg.Musrenbang Tk.Kecamatan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangun a n di Desa	21,825,000
				100 %		Terlaksanaya Keg.PKK, P2TP2A danSerang sehat	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	102,676,000
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN		100 %	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan	Terselenggaranya kegiatan pembinaan trantibum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	8,444,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		UMUM			Ketertiban Umum		Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100 %	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya keg.PHBN	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	70,018,500
				100 %		Terselenggaranya Keg.MTQ dan Keg.Keagamaan	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku,	0

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		4 Kegiatan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terfasilitasi nya keg.Pembinaan Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	99,988,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		1 Tahun	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,043,127,272
				12 Bulan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener a ngan Bangunan Kantor	4,907,500
				100 %		Terpenuhinya kebutuhan pengadaanperalatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51,030,168

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				12 Bulan		Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6,940,400
				12 Bulan		Terpenuhinya kebutuhan cetakan dan penggandaaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa n	6,400,000
				12 Bulan		Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan/koran	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangu ndangan	3,600,000
				12 Bulan 12 Bulan		Tepenuhinya kebutuhan Perjalanan Dinas Terpenuhinya kebutuhan Makanan dan Minuman	Penyelengga r aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,380,509,000
				12 Bulan	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPeme rintaha n Daerah	Terpenuhinya kebutuhan listrik dan internet	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38,450,000
				12 Bulan		Terpenuhinya Js.Pramubakti, Js.Kebersihan dan Js.Keamanan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	134,400,000
				12 Bulan	Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Tefpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas/operasion al Kecamatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaa n , Biaya Pemeliharaa n dan Pajak Kendaraan Perorangan	89,399,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				12 Bulan		Terpenuhinya pemeliharaan perlatan danperlengkapan kantor	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19,436,000
				100 %		Terpeliharaan gedung kantor	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6,495,000
28.	**KECAMATAN TUNJUNG TEJA**							**3,580,205,680**
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Tahun	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB	Koordinasi/Si nergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan InstansiVertikal Terkait	37,610,000
				3 Kegiatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Kegiatan Hutkab, AKCF dan Isbath Nikah	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	115,720,000
		PROGRAM PEMBERDAY		1 Tahun	Koordinasi Kegiatan	Terlaksananya kegiatan	Peningkatan Partisipasi	29,410,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		AAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Pemberdayaan Desa	Musrenbang RKPD Tk. Kecamatan	Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangun a n di Desa	
				1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan		Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Kabupaten Serang Sehat Terlaksananya Kegiatan P2TP2A Terlaksananya Pembinaan PKK	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdaya a n Masyarakat di Wilayah Kecamatan	102,710,000
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan	14,040,000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		1 Kegiatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Kegiatan HUTRI	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapk	40,810,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							a n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUnd ang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika sertaPemert ahana n dan Pemeliharaa n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
				1 Kegiatan 1 Kegiatan		Terlaksananya kegiatan keagamaan Terlaksananya Kegiatan MTQ	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	133,630,000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWAS			Fasilitasi, Rekomendas i dan Koordinasi		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintaha	100,000,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		AN PEMERINTAHAN DESA			Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		n Desa	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		12 Bulan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya gaji dan Tunjangan pegawai	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,480,205,680
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener a ngan Bangunan Kantor	13,393,500
				1 Tahun		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17,750,000
				1 Tahun		Tersedianya Meja Makan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0
				1 Tahun			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17,249,200
							Penyediaan Barang Cetakan dan	6,150,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Penggandaa n	
				1 Tahun		Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,600,000
				1 Tahun		Tersedianya Makan dan Mikum Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14,593,000
				1 Tahun 1 Tahun		Terlaksananya Rapat koordinasi Luar dan dalam Daerah Tersedianya Makan dan Minum rapat	Penyelengga r aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81,630,000
				1 Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tersedianya kursi tamu pejabat	Pengadaan Mebel	0
				1 Tahun	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Terbayarnya Listrik dan Internet	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38,962,200
				1 Tahun		Terbayarnya jasa pramubakti, Kebersihan dan Keamanan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	171,360,000
				1 Tahun	Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang	Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas	Penyediaan Jasa Pemeliharaa n , Biaya	98,718,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				1 Tahun	Urusan Pemerintahan Daerah	Operasional Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				100 Persen		Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,500,000
				1 Tahun		Terpeliharanya Gedung kantor dan bangunan lainnya	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	61,164,100
29.	**KECAMATAN WARINGIN KURUNG**							**4,665,646,514**
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	29,000,000
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan	1,317,851,400

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					Camat		Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	28,550,000
							Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	102,506,000
		ROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	17,300,000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai PenugasanKepala Daerah		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang	74,090,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahan a n dan Pemeliharaa n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
							Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	58,900,000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWAS AN PEMERINTA HAN DESA			Fasilitasi, Rekomendas i dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintaha		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintaha n Desa	100,000,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					n Desa			
							Koordinasi Pelaksanaan Pembangun a n Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	11,960,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,540,681,835
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor	5,698,000
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12,502,973
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa n	20,500,000
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangu ndangan	3,600,000
							Fasilitasi Kunjungan Tamu	12,444,000
							Penyelengga	80,176,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39,896,650
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35,128,656
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	96,000,000
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	78,861,000

NO	OPD	NAMA PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	OUTPUT	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
							Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

Sumber : Dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Serang tahun 2021-2026

Berdasarkan pengelompokan Belanja Daerah Kabupaten Serang tahun 2022, maka berikut disampaikan **Pagu pada masing – masing Perangkat daerah dalam Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Serang Tahun 2022** adalah sebagai berikut:

NO	PERANGKAT DAERAH	RENCANA PENDANAAN 2022
1	DINAS PENDIDIKAN	739,389,952,017
2	DINAS KESEHATAN	226,718,179,685
3	RSDP	244,252,182,228
4	DPUPR	324,053,203,756
5	DPKPTB	118,343,375,762
6	SATPOL PP	17,373,381,781
7	BPBD	16,917,810,504
8	DINAS SOSIAL	12,088,152,011
9	DISNAKERTRANS	14,302,498,855
10	DKPP	14,463,721,760
11	D L H	69,831,349,427
12	DISDUKCAPIL	18,730,771,326
13	DPMD	434,883,169,753
14	DKBP3A	15,224,802,141
15	DISHUB	40,404,256,767
16	DISKOMINFO	15,799,107,033
17	DISKOPERINDAG	16,776,721,946
18	DPMPTSP	12,665,378,659
19	DISPORAPAR	13,894,530,780
20	DPKD	6,955,732,155
21	DINAS PERTANIAN	26,287,700,710
22	SEKRETARIAT DAERAH	117,055,545,184
23	SEKRETARIAT DPRD	113,612,734,154
24	BAPPEDA	17,100,000,000
25	BAPENDA	43,635,308,366
26	BPKAD	21,881,811,088
27	BKPSDM	25,745,090,023
28	INSPEKTORAT	22,709,892,000
29	BADAN KESBANGPOL	12,480,315,780
	KECAMATAN	
30	KECAMATAN ANYAR	4,999,625,680
31	KECAMATAN BANDUNG	3,412,625,680
32	KECAMATAN BAROS	5,145,405,754
33	KECAMATAN BINUANG	3,354,405,680
34	KECAMATAN BOJONEGARA	3,819,605,818
35	KECAMATAN CARENANG	3,796,405,680
36	KECAMATAN CIKANDE	5,444,725,680
37	KECAMATAN CIKEUSAL	4,218,044,411

NO	PERANGKAT DAERAH	RENCANA PENDANAAN 2022
38	KECAMATAN CINANGKA	4,707,885,705
39	KECAMATAN CIOMAS	5,075,116,591
40	KECAMATAN CIRUAS	6,254,054,680
41	KECAMATAN GUNUNGSARI	3,658,925,680
42	KECAMATAN JAWILAN	3,729,945,564
43	KECAMATAN KIBIN	5,827,067,254
44	KECAMATAN KOPO	3,703,304,780
45	KECAMATAN KRAGILAN	6,165,201,374
46	KECAMATAN KRAMATWATU	6,626,685,916
47	KECAMATAN LEBAKWANGI	3,840,385,680
48	KECAMATAN MANCAK	3,668,745,680
49	KECAMATAN PABUARAN	4,797,265,645
50	KECAMATAN PADARINCANG	4,820,065,680
51	KECAMATAN PAMARAYAN	3,810,865,843
52	KECAMATAN PETIR	3,614,730,382
53	KECAMATAN PONTANG	4,963,285,434
54	KECAMATAN PULO AMPEL	3,818,705,700
55	KECAMATAN TANARA	4,792,765,680
56	KECAMATAN TIRTAYASA	5,161,045,840
57	KECAMATAN TUNJUNGTEJA	3,580,205,680
58	KECAMATAN WARINGINKURUNG	4,665,646,514
	T O T A L	**2,905,049,421,318**

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiPembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerahtentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah wajib menetapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan dalam target Visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Serang dengan mengacu pada kriteria indikator dalam peraturan perundang-undangan tersebut, tercantum dalam Tabel 6.1. dan 6.2 berikut :

Tabel 6.1

Indikator Sasaran Makro Daerah Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2022

TARGET INDIKATOR SASARAN MAKRO DAERAH	TAHUN 2022
Laju Pertumbuhan Ekonomi	**2,97**

TARGET INDIKATOR SASARAN MAKRO DAERAH	TAHUN 2022
Laju Inflasi	**1,59**
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	**67,29**
Persentase Tingkat Kemiskinan	**4,22**
Tingkat Pengangguran Terbuka	**11,89**

Sumber: Rancangan RPJMD Kab.Serang 2021-2026

Tabel 6.2

Indikator kinerja utama penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2022

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2022
Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah	Meningkatkan kualitas pendidikan yang unggul dan kelestarian tradisi seni budaya lokal yang didukung peran generasi muda untuk pembangunan daerah	Meningkatnya Aksesibilitas, Kualitas dan Manajemen Pendidikan	Angka Pendidikan Dasar yang ditamatkan	24,03
		Meningkatnya kearifan dan kelestasian seni budaya lokal serta daya dukung generasi muda bagi daerah	Cakupan event budaya skala kabupaten	100
			Persentase prestasi bidang kepemudaan dan olahraga yang dicapai	25

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2022
masyarakat				
Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau yang didukung oleh tenaga kesehatan yang profesional	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan mayarakat	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi Utama dan Paripurna	50
			Presentase Pemenuhan Standar Akreditasi Rumah Sakit	80%
Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman yang memadai dan berkualitas	Meningkatkan pemerataan pembangunan Infrastruktur dan Komektivitas antar Wilayah yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur kawasan dan daerah serta aksesibilitas antar wilayah	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	87.58
			Persentase desa/kelurahan yang telah mendapat layanan air minum	89.88
			Persentase Rumah Tangga mendapatkan akses pengelolaan air limbah domestik	72.69

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2022
			Persentase jumlah bangunan gedung daerah dengan kondisi baik	60
			Persentase drainase kota dengan kondisi baik	52.5
			Tingkat Ketersediaan Sarpras Pengelolaan Persampahan	30
			Proporsi Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik	62.5
			Tingkat pemantaatan informasi tata ruang dalam pembangunan	33.39
			Tingkat pemanfaatan informasi tata ruang dalam pembangunan	100
			Persentase	0.18

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		2022
			kawasan kumuh		
			Persentase Rumah Layak Huni		89.88%
			Cakupan aksesibilitas antar wilayah		100%
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumberdaya alam	Indeks Pencemaran Lingkungan	IKA	50.25
				IKU	82.75
			Indeks Tutupan Vegetasi		69.990
			Persentase Penanganan Sampah		17.44
Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan	Meningkatkan daya dukung kemandirian perekonomian daerah berbasis masyarakat dan desa	Meningkatnya produktivitas, ketahanan, dan peran ekonomi sektor pertanian dalam arti luas	Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian		4.15
			Indeks Ketahanan Pangan		78.50%
			Pertumbuhan PDRB sektor Perikanan		4.15
		Meningkatnya kapasitas UMKM yang sinergi dengan dunia usaha	Pertumbuhan Wirausaha Baru		19.29
			Pertumbuhan sektor		9.6

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2022
		perdagangan dan industri	perdagangan dalam PDRB	
			Pertumbuhan sektor industri dalam PDRB	49.43
		Meningkatnya kemandirian masyarakat dan desa	Prosentase desa maju dan mandiri didasarkan dari IDM	15.95
		Meningkatnya dayasaing dan produktivitas tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	20
		Meningkatnya investasi daerah	Pertumbuhan Nilai Investasi daerah PMA PMDN	3% 3%
		meningkatnya kontribusi sektor pariwisata bagi perekonomian daerah	Kontribusi PAD Pariwisata	18.000.000.000
	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan sosial serta pengendalian	Persentase PMKS yang tertangani	3
			Partisipasi angkatan kerja perempuan	43,43%
			Persentase kasus	55

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2022
		penduduk	KDRT dan kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak anak terselesaikan	
			Laju pertumbuhah penduduk	1,40
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai LPPD / SAKIP	4.10 / BB
			Indek Penilaian Reformasi Birokrasi	B
			Tingkat Layanan dan fasilitasi Fungsi DPRD	100
			Tingkat layanan pendukung urusan pemerintahan	100
			Cakupan penyelenggaraan urusan dan pembinaan kewilayahan yang ditangani	100
		Meningkatnya	Tingkat Maturitas	3,20

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2022
		Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	SPIP	
			Persentase temuan Inspektorat yang ditindaklanjuti di Wilayah Kerja IRBAN	72%
		Meningkatnya Pendapatan dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	WTP
		Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah berbasis data, penelitian, dan pengembangan inovasi	Prosentase kesesuaian Dokumen Perencanaan OPD dengan Dokumen Perencanaan Pemerintah daerah	100
			Prosentase Kesesuain Pelaksanaan Kegiatan OPD dengan Perencanaan	100
			Indek / Kategori	Sangat inovatif

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2022
			Inovasi Daerah	
		Meningkatnya kualitas SDM aparatur	Cakupan standar kompetensi pegawai	6.90
			Tingkat Capaian kinerja pegawai kategori sangat baik (91-100)	94
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan informasi publik yang didukung kemajuan TI	Cakupan pelayanan Smart City	100
			Cakupan kepemilikan Dokumen Kependudukan dan pencatatan sipil	84.80
			Prosentasi kerjasama dinas kependudukan dan pencatatan sipil dengan lintas sektoral melalui aplikasi berbasis SIAK	25.00
			Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	26,17%

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2022
			Persentase masyarakat yang melakukan kunjungan ke perpustakaan	2,37%
			Cakupan penyelesaian masalah pertanahan	100
			Tingkat Keamanan informasi	100
		Meningkatnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan ketertiban umum dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Rasio Penduduk Terkena Tindak Pelanggaran trantibum, Perda dan Perkada per 100.000 penduduk	0,25
			Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran di wilayah Kabupaten Serang	100
			Cakupan pelayanan penanggulangan	100

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2022
			bencana di wilayah Kabupaten Serang	
Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara	Meningkatnya penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi di masyarakat	Indek Demokrasi Indonesia (IDI)	73.50
			Indeks Kerukunan Umat Beragama	87.40

BAB VII

PENUTUP

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Serang Tahun 2022 telah selesai disusun untuk selanjutnya diharapkan dapat berfungsi:

1. Menjadi pedoman bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah terutama OPD Kabupaten Serang dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Serang pada Tahun 2022.
2. Menjadi Dasar untuk Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kabupaten Serang Tahun 2022.
3. Menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) final Perangkat daerah Kabupaten Serang Tahun 2022.

Berpijak pada upaya untuk mewujudkan keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan, baik dalam lingkup wilayah (keterpaduan pembangunan dalam konstelasi Provinsi Banten dan Nasional) maupun lingkup waktu (menjamin keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan tahunan daerah di Kabupaten Serang maka diperlukan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang yang dijabarkan setiap tahun dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Serang.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Serang Tahun 2022 bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Serang pada umumnya, dalam rangka proses mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Komitmen dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam melaksanakan RKPD Kabupaten Serang Tahun 2022 merupakan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan dalam mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026.

BUPATI SERANG,

Hj. RATU TATU CHASANAH, SE, M.Ak